

EDISI #41 MARET 2024



PRABOWO-GIBRAN MENANG, JOKOWI PASTI 3 PERIODE



Rp75.000,-

SETELAH
JAKARTA
BUKAN
IBU KOTA

KUA
UNTUK
SEMUA
AGAMA

IJECK ATAU
BOBBY
NASUTION
UNTUK SUMUT

AGENDA
WISATA DI
TAHUN
POLITIK

SOSOK
PENANTANG
KHOFIFAH INДАР
PARAWANSA

TIGA KALI
GAGAL BENI
K HARMAN
MAJU LAGI

info indonesia

inovasi untuk negeri



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

**SELAMAT & SUKSES
ATAS TERPILIHNYA
SEBAGAI PRESIDEN RI DAN
WAKIL PRESIDEN RI
YANG KE-8**



PRABOWO SUBIANTO

GIBRAN RAKABUMING RAKA

EDISI
BULAN
MARET
2024

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun pasangan pesaingnya, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bersiap mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.



26

INFO SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.



32

INFO KALTIM

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan, Kaltim masih mengandalkan pasokan dari Jawa dan Sulawesi.



36

INFO OTONOMI

Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang kini semakin ramai dengan sosok-sosok ternama, kandidat Calon Wali Kota (Cawako) mulai tebar pesona, tidak hanya mengandalkan popularitas tapi juga elektabilitas.



54

INFO NASIONAL

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dalam satu hingga dua bulan ke depan harga pangan di tengah masyarakat dapat stabil.



68

INFO MUBA

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi salah daerah yang menjadi percontohan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kabupaten Muba berhasil menurunkan angka kemiskinan yang cukup besar dari 4,9 persen menjadi 0,9 persen saja.



87

INFO KHUSUS

Agenda Pemilu 2024 telah berlangsung dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk lima tahun ke depan. Setelah Pemilu, akan ada Pilkada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

72 INFO PALEMBANG

74 INFO OKI

76 INFO OGAN ILIR

78 INFO PALI

82 INFO ISTANA

86 KAJI

40

INFO PILKADA

Khofifah Indar Parawansa mulus melaju menuju Pemilihan Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim) 2024. Ia mendapat dukungan untuk maju sebagai calon gubernur dari empat partai politik, yakni PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

PROSES

Proses suksesi (pergantian) kepemimpinan nasional masih berlangsung. Hasilnya terjadwal pada 20 Oktober 2024, hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Layaknya sebuah proses, rangkaian atau serangkaian kegiatan yang saling berbalas aksi dan reaksi untuk menghasilkan suatu hasil, banyak faktor dan peran yang terlibat di dalamnya. Begitu pula suksesi kepemimpinan nasional yang masih berlangsung.

Kita bisa mencatat antara lain rangkaian rekapitulasi hasil Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum yang berperan menghitung dan mengumumkan hasil Pilpres 2024 masih sibuk di hari-hari terakhir menjelang tenggat, batas akhir, rekapitulasi.

Dalam pernyataan resmi KPU pada Minggu, 17 Maret 2023, tiga hari menjelang jadwal pengumuman hasil Pemilu 2024, sudah 33 provinsi menyelesaikan rekapitulasi hasil Pilpres 2024. Dari 38 provinsi, lima yang belum selesai tercatat adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Kita berharap proses rekapitulasi itu akan selesai tepat jadwal.

Hasil sementara Pilpres hingga 33 provinsi menunjukkan keunggulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka unggul dalam penghitungan suara. Dari 137 juta suara lebih yang masuk dari 33 provinsi, pasangan calon nomor urut 2 itu sudah menghimpun 76 juta lebih suara. Jika menghitung angka perolehan suara, pasangan Prabowo-Gibran akan memenangi Pilpres 2024.

Nah, jika hasil itu sudah diketahui, lazimnya pasangan yang memenangi Pilpres akan mendapat ucapan selamat dari pasangan kalah dalam pemilihan. Dalam hal ini pasangan nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Toh ucapan selamat itu belum tampak tanda-tandanya. Yang mencolok malah reaksi yang meragukan proses Pilpres 2024 berlangsung sebagaimana seharusnya. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto misalnya, menyebut kecenderungan terjadinya rekayasa dalam Pemilu 2024.

Melihat perkembangan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa proses suksesi masih akan berlanjut dengan aksi dan reaksi lain lagi usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi perolehan suara dalam Pilpres dan Pemilu 2024.

Apakah aksi dan reaksi lain lagi itu berbentuk sengketa di Mahkamah Konstitusi, juga penggunaan Hak Angket terkait Pemilu 2024? Kita dapat menyaksikannya setelah 20 Maret 2024.

Apapun perkembangan berikutnya, semua pihak terkait hendaknya tetap memegang asas penting dalam proses suksesi kepemimpinan nasional: salus populi suprema lex esto, diindonesiakan sebagai keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang telah dikemukakan oleh Cicero di masa sebelum masehi. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Rusdiyono

REDAKTUR: Melati Tagore, Irma Yani, Nina Erlina, Ega Tri Gustina **REPORTER:** Mario CH, Budi Prasetya, Nefri, Indra Hadi, Sadam M, Hardi Aar, Beni Martha Daya, Reno, Aldi Rinaldi, M Iqbal, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fiqri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah

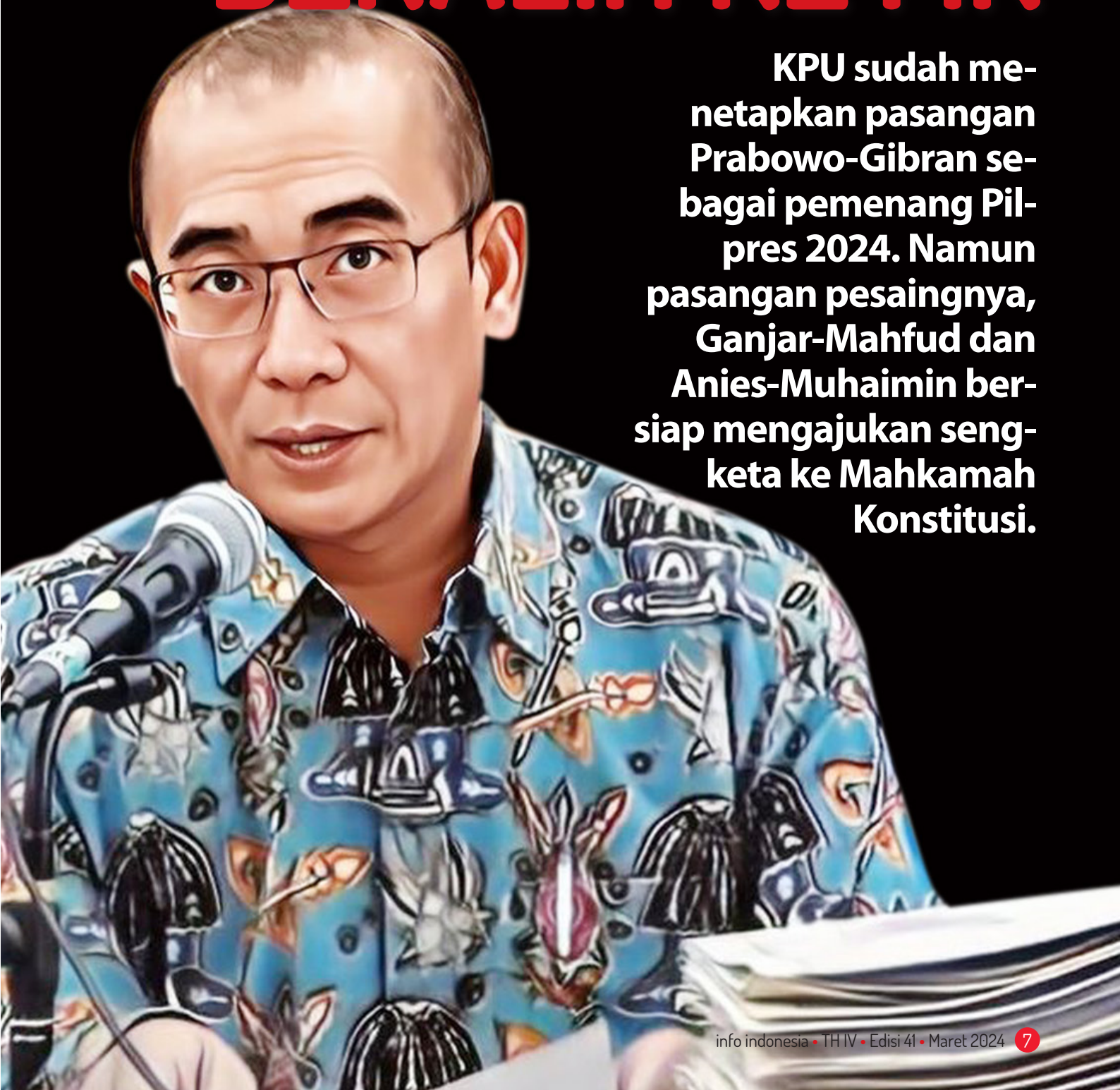
DISTRIBUSI: Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



PENTAS PILPRES 2024 BERALIH KE MK

KPU sudah menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun pasangan pesaingnya, Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin bersiap mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.



• INFO UTAMA

Tak ada yang mengejutkan. Hasil rekapitulasi nasional Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) boleh dibilang tak berbeda jauh dengan hasil hitung cepat (quick count) oleh berbagai lembaga jajak pendapat di hari pemungutan suara: Mendekati namun tak sampai 60 persen suara memilih pasangan Prabowo-Gibran.

KPU mengungkapkan hasil reka-

setara dengan 58,59 persen pemilih. Selanjutnya Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD mengumpulkan 27.040.878 suara setara dengan 16,47 persen pemilih.

Rekapitulasi nasional Pilpres 2024 juga menunjukkan partisipasi pemilih yang menggunakan hak suaranya mencapai 168.422.011 atau 82,23 persen total hak pilih. Dari jumlah itu,

Sumatera Barat.

Hasil rekapitulasi itu terhimpun lengkap setelah Papua menjadi provinsi terakhir yang direkap KPU RI pada Rabu, 20 Maret 2024 petang. "Demikian tadi pembahasan rekapitulasi hasil Pemilu presiden dan wakil presiden di Provinsi di Papua. Bisa kita sahkan ya? Bismillah sah," kata Ketua KPU Hasyim Asyari di Panel A, Ruang Sidang KPU RI Jakarta.



pitulasi nasional Pilpres 2024 di 38 provinsi dan di luar negeri menunjukkan pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan - Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara setara dengan 24,95 persen pemilih. Sedangkan Paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara

4.194.536 atau 2,49 persen suara dinyatakan tidak sah. Sedangkan suara yang sah mencapai 164.227.475 atau 97,51 persen.

Dari perhitungan jumlah Dapil, Paslon nomor urut 2 memenangi Pilpres di 36 provinsi dan luar negeri. Sedangkan Paslon nomor urut 1 meraih kemenangan di dua provinsi: Aceh dan

Toh pengumuman resmi hasil rekapitulasi Pilpres itu masih menunggu penyelesaian rekapitulasi Pemilu legislatif. KPU memilih saatnya setelah waktu berbuka puasa Ramadan tiba.

"Mungkin kalau waktu (pengumuman) definitifnya kemungkinan pasca, kita ambil jeda sampai menjalankan ibadah puasa, ya waktu berbuka.

Semacam itu,” kata Komisioner KPU August Mellaz.

Kegiatan pada hari terakhir rekapitulasi Pilpres dan Pileg 2024 itu tampak lancar-lancar saja, meskipun di depan kantor KPU berlangsung aksi massa yang mendukung maupun menyoal hasil rekapitulasi yang sedang berlangsung. Setidaknya sejak Senin, 18 Maret 2024 aksi berlangsung setiap hari di



depan Kantor KPU dan bubar setelah malam tiba.

Aksi massa di depan Kantor KPU pada Rabu 20 Maret 2024 pun bubar berangsur-angsur setelah waktu buka puasa tiba. Meski sempat terjadi pembakaran atribut demo dan material lain yang dapat menyala, juga orasi yang menyerukan pemakzulan Presiden

Joko Widodo (Jokowi) dan penolakan terhadap pemilu curang, sejak pukul 19.00 WIB boleh dibilang aksi massa sudah selesai.

Nah, saat jeda waktu menjelang berbuka puasa itu, ketiga Paslon memiliki kegiatan masing-masing. Paslon nomor urut 1 memenuhi undangan mantan Wapres HM Jusuf Kalla (JK). “Saya mengundang untuk buka puasa teman-teman, Bung Sur, Anies dengan Cak Imin, acaranya cuma itu sambil tentu diskusi apa yang terjadi, tapi tujuannya silaturahmi aja,” kata JK kepada media di kediamannya, Jakarta Selatan, Rabu petang 20 Maret 2024.

Sedangkan Anies Baswedan mengemukakan diskusi bersama Cak Imin, JK dan Paloh berlangsung seru. “Alhamdulillah tadi kita berbuka puasa

mumkan secara resmi baru nanti ada respons. Ada respons dari paslon. Nanti ada respons juga dari partai partai pengusung,” ujar Anies.

Toh JK mengungkapkan pertemuan itu membahas rencana dalam waktu dekat. “Tidak spesial untuk berbicara tentang hasil Pemilu ini. Kita bicara tidak mundur tapi berbicara Indonesia masa depan. Oh pasti ada itu MK,” kata JK.

Di tempat lain, Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md menghadiri acara buka puasa bersama dengan jajaran Tim Pemenangan Nasional (TPN). Acaranya berlangsung di Posko TPN, kawasan Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat.

Capres Ganjar Pranowo tiba di lokasi acara sekitar pukul 18.10 WIB. Menya-



bersama, teman-teman juga ikut berbuka. Kita senang sekali atas undangan dari Pak Jusuf Kalla pada malam ini, berjumpa dengan begitu banyak teman-teman, dan diskusinya juga seru,” ujarnya.

Ia mengakui sedang menunggu pengumuman akhir hasil Pilpres 2024 dari KPU. “Kita sambil menunggu ini jam-jam hari akhir pengumuman dari KPU,” kata Anies.

Anies menegaskan, tak ada arahan apapun dalam buka bersama kali ini. Pasangan AMIN, menurut dia, belum akan merespons perihal hasil Pilpres 2024 sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi final yang direncanakan pada Rabu malam ini juga.

“Kita nanti sesudah KPU mengu-

pa awak media, Ganjar mengisyaratkan akan berbicara setelah KPU resmi mengumumkan hasil rekapitulasi. “Buka puasa dulu ya,” ungkap Ganjar.

Usai buka puasa, Ganjar pun angkat bicara. Ia menyatakan siap mendengarkan hasil pemilihan presiden 2024 oleh KPU. “Kita sudah siap. Kita sudah nyiapin banyak hal,” kata Ganjar.

Setelah buka puasa, Ganjar menyatakan ia Mahfud MD melanjutkan aktivitas masing-masing, antara lain pulang ke rumah dan beribadah salat tarawih. “Kita mau tarawih dulu, di TV ada (pengumuman KPU),” ungkap Ganjar.

Ia juga menegaskan pasangan Ganjar-Mahfud akan melanjutkan proses ke Mahkamah Konstitusi. Malah Ganjar siap hadir mendaftarkan gugatan

ke MK. Sedangkan materi yang akan dibawa ke MK sudah dimatangkan oleh tim hukum TPN.

Sedangkan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengemukakan, timnya siap mengajukan permohonan sengketa Pilpres ke MK pada Minggu, 24 Maret 2024. Ia menjelaskan, pasangan Ganjar-Mah-

yang terjadi, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara antarkan-didat.

"Karena kalau Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pada perolehan suara dan perbedaan perolehan suara, menjadi 'mahkamah kalkulator', itu tidak akan menyelesaikan persoalan," kata dia.



fud mengajukan sengketa ke MK bukan masalah menang dan kalah, melainkan karena merasa ada kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024.

Menurut dia, ada intervensi kekuasaan, melalui politisasi bansos serta kriminalisasi terhadap kepala desa yang mengarahkan pemilih untuk memilih kandidat tertentu. Oleh sebab itu, Todung berharap MK memberi kesempatan bagi kubu Ganjar-Mahfud membeberkan segala bentuk kecurangan

Sedangkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menantikan pengumuman KPU di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Tiba di kediamannya sekitar pukul 17.59, Prabowo yang pulang dari kegiatan kerjanya sebagai Menteri Pertahanan langsung masuk ke ruang dalam yang sudah lebih dulu didatangi oleh elite Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

Tampak antara lain Ketua Umum

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kae-sang Pangarep, ketua umum relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi, sekretaris jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekjen Golkar Lodewijk Paulus. Hadir pula Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengemukakan, Prabowo akan memantau pengumuman penetapan hasil Pemilu 2024 dari rumahnya di Kertanegara. Setelah acara buka puasa bersama, lanjut Muzani, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pernyataannya.

Usai penetapan oleh KPU Prabowo Subianto mengajak masyarakat untuk tetap bersatu dan saling bergandengan tangan. "Kami ajak semua masyarakat Indonesia untuk sama-sama bersatu, tatap ke depan dan gandengan tangan," ujar Prabowo dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Maret 2024 malam.

Sebelumnya, sekitar pukul 22.20 WIB, Ketua KPU membacakan keputusan KPU yang menetapkan hasil Pemilu serentak dan Pilpres 2024. Hasilnya dituangkan KPU RI dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024.

"Memutuskan, menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Hadir dalam acara penetapan KPU itu antara lain Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto. Tampak pula Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, serta jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Toh, proses belum berakhir. Pentas politik terkait Pemilu dan Pilpres 2024 akan beralih ke Mahkamah Konstitusi. ●

TANPA PARTAI BARU DI DPR

Bukan bertambah, jumlah partai yang lolos mengirimkan wakilnya ke DPR dari Pemilu 2024 malah berkurang. Pada Pemilu 2019, ada sembilan partai yang masuk DPR, sedangkan hasil Pemilu 2024 tinggal delapan saja sebagaimana hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU berikut ini:

1. PDI-P: 25.387.279 (16,72 persen)
2. Golkar: 23.208.654 (15,29 persen)

Pasal 414, bahwa ambang batas parlemen (parliamentary threshold) paling rendah 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan kursi anggota DPR.

Alhasil, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gagal merebut kursi DPR RI pada pemilu 2024 setelah hanya mampu meraup 3,86 persen suara. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai

"Ya sekitar 4,04 atau 4,05 persen. Jadi memang dari yang diumumkan oleh KPU kalau berdasarkan rekapitulasi tidak jauh berbeda. Ada selisih 100.000 hingga 250.000 suara," tandas Awiek.

Awiek menduga terdapat pergeseran suara PPP ke partai lain. Selain itu, terdapat penggunaan surat suara untuk kepentingan pihak tertentu.

"Ada ketidakwajaran suara sah di sejumlah dapil itu juga menjadi soro-



3. Gerindra: 20.071.708 (13,22 persen)
4. PKB: 16.115.655 (10,62 persen)
5. Nasdem: 14.660.516 (9,66 persen)
6. PKS: 12.781.353 (8,42 persen)
7. Demokrat: 11.283.160 (7,43 persen)
8. PAN: 10.984.003 (7,24 persen)
9. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
10. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
11. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
12. Partai Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
13. Partai Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
14. Partai Buruh: 972.910 (0,64 persen)
15. Partai Ummat: 642.545 (0,42 persen)
16. PBB: 484.486 (0,32 persen)
17. Partai Garuda: 406.883 (0,27 persen)
18. PKN: 326.800 (0,215 persen)

Dari hasil rekapitulasi itu partai dengan perolehan suara nomor urut 9-18 gagal memenuhi syarat parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Sebagaimana ketentuan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum

berlambang ka'bah itu hanya mampu memperoleh 5.878.777 dari 84 Dapil yang tersebar di 38 provinsi.

Dari total 151.796.630 suara, jumlah rekapitulasi PPP itu hanya mampu mengantongi 3,86 persen. Maka perolehan suara tersebut pertanda gagal masuk ke parlemen. Toh PPP berniat mengajukan sengketa hasil rekapitulasi itu ke Mahkamah Konstitusi.

"Sesuai mekanisme konstitusi yang diatur undang-undang kami memiliki waktu tiga hari, setelah pengumuman resmi dari KPU untuk mengajukan gugatan Mahkamah Konstitusi," ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau biasa disapa Awiek di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024.

Ia menjelaskan, jika merujuk pada data internal, PPP meraih 4,04 persen atau lolos PT dan masuk ke Senayan. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 100.000 hingga 250.000 suara.

tan bagi kami. Tidak logis ketika suara sah mencapai 99,8 persen berarti 0,02 persen yang tidak sah, artinya 100 persen terpakai. Nah, yang seperti itu tentu harus jadi catatan bagi penyelenggara Pemilu ke depan" jelas Awiek.

Sedangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang perolehan suaranya sempat melonjak dalam proses penghitungan KPU akhirnya juga gagal memenuhi ambang batas parlemen 4 persen. Menanggapi penetapan KPU itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden RI Joko Widodo itu mengisyaratkan partainya akan menanggapi hasil rekapitulasi KPU itu di kantor DPP PSI.

"Besok di DPP ya. Besok kumpul di DPP aja ya," kata Kaesang usai berbuka puasa bersama TPN Prabowo-Gibran, Rabu, 20 Maret 2024.

Apa mau ke MK juga? Semua akan lebih jelas pada saatnya. •



BELUM RESMI SUDAH BICARA KURSI MENTERI

Pengumuman hasil Pilpres 2024 belum juga keluar. Tapi, kursi kabinet sudah menjadi wacana Partai Golkar. Pengaruh dinamika internal dan eksternal.

Acara Buka Bersama DPP Partai Golkar di Hotel The Mulia, Nusa Dua, Bali itu memang meriah. Tak terelakkan acara itu juga merupakan syukuran atas perolehan kursi legislatif DPR.

Dalam beberapa kesempatan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim Golkar unggul dalam perolehan kursi di 15 dari 38 provinsi dalam Pemilu Legislatif kali ini.

Nah, di Bali, Airlangga merinci lagi dengan menyebutkan ada 102 kadernya yang berhasil meraih tiket menuju Senayan. Dihitung-hitung, angka ini naik 20 persen dari perolehan kursi partai beringin itu pada Pemilu 2019.

Belum lagi, kata dia, ada 2-4 hasil yang masih menjadi sengketa. Jadi, masih ter-

buka peluang Partai Golkar menambah kursi lagi di DPR RI.

"Di Bali kita bisa berkonsentrasi, sekaligus beberapa bulan lalu kita juga menyelenggarakan rapat di Bali dan saya janjikan Partai Golkar akan merebut kembali kemenangan," kata Airlangga di acara yang berlangsung pada Jumat, 15 Maret 2024.

Airlangga pun bersyukur atas kemenangan di 15 dari 38 provinsi, ia mengakui sejumlah ketua DPD harus gagal lolos dalam kontestasi namun baginya semua kader telah berupaya memenangkan partai. Antara lain Jawa Barat, dan Sumatera Utara.

"Di sini ada Pak Ace Hasan, Ketua Golkar Institute dan Ketua DPD Jawa Barat. Ini untuk pertama kali Golkar kembali



merebut Jawa Barat,” ucapnya.

“Yang luar biasa Pak Ijeck (Musa Rajekshah), ini tidak memalukan, kampungnya Ketua Dewan Penasihat (Luhut Binsar Pandjaitan), Golkar menang naik 100 persen di Sumatera Utara, dari empat kursi jadi delapan,” kata Airlangga di acara yang mengundang 38 Ketua DPD Partai Golkar dari seluruh provinsi.

Tak urung, Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menyinggung proyeksi hasil Pilpres 2024. Airlangga mengklaim sebanyak 80-90 persen pemilih Partai Golkar ikut memilih Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, menurut dia, Partai Golkar terdepan mendukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024. Oleh sebab itu, Airlangga berharap partainya mendapat posisi lebih banyak di kabinet jika Prabowo-Gibran telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

“Saya sampaikan ke Pak Prabowo, kontribusi Golkar ke Pak Prabowo karena kita 15 dari 38 provinsi, maka kita

kontribusi 25 persen,” kata Airlangga.

“Jadi kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya, banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [kursi kabinet] itu minimal tapi kalau dihitung proporsi 25 persen room (ruang) masih banyak,” sambungnya.

Menanggapi pernyataan Airlangga, Ketua Harian Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sufmi Dasco Ahmad mengemukakan, alokasi kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memang akan berdasarkan kinerja dan dukungan pada pelaksanaan Pilpres 2024.

Dasco menegaskan, partai-partai yang bekerja maksimal bisa mendapat lebih dari lima. “Kalau ada minta jatah menteri berapa pun, itu kita lihat dari kinerja dan dukungan pada waktu Pilpres,” ujar Dasco, Senin, 18 Maret 2024.

Sehingga, sambung Dasco, kinerjanya akan dinilai dulu, “Kalau kita nilai kerjanya maksimal, mungkin bisa lebih. Atau juga sebaliknya,” kata dia.

Dasco mengatakan, partai koalisi yang mengusung pasangan Prabowo-

Gibran pasti membicarakannya bersama-sama. Namun demikian, dia mengingatkan bahwa Prabowo sebagai presiden terpilih juga akan memiliki pertimbangannya sendiri dalam memilih menteri-menterinya.

“Jadi apa pun itu nanti akan kita putuskan bersama, dan Pak Prabowo jika nanti sudah nanti ditetapkan sebagai presiden terpilih tentunya (ada) pertimbangan sendiri,” ungkap Dasco.

Sedangkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyatakan partainya yang menjadi bagian dari koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran mengemukakan alokasi menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kami sampaikan, kami akan sepenuhnya menghormati hak prerogatif Bapak Prabowo sebagai, insya Allah Presiden terpilih nantinya untuk kemudian menetapkan dan berbicara dengan pimpinan partai politik,” kata Eddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Eddy menegaskan, pada saatnya

nanti Prabowo Subianto bakal berbicara dengan pimpinan partai politik pengu-sung. Menurut dia, tentu saja pembicaraan itu membahas alokasi yang diterima partai politik pengusung.

"Bagi kami PAN, domain itu ada di ketua umum dan tentu bagi kami akan menghormati sepenuhnya apa yang disampaikan kelak nanti oleh Pak Prabowo dalam menjalankan hak pre-

lebih luas tidak hanya sekadar masalah kabinet ke depannya," tandasnya.

Dari Partai Demokrat yang juga mengusung pasangan Prabowo-Gibran, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melihat masih terlalu dini membicarakan kabinet sementara pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 belum keluar.

la mengibaratkan Pilpres 2024 bagai-

kapitulasi oleh KPU selesai, partai pendukung bisa mempersiapkan kabinet yang akan datang. Dia menyebut, Presiden dan Wapres terpilih pasti akan membicarakan kabinet bersama-sama dengan parpol pendukung.

Hinca mengingatkan bahwa Demokrat sudah punya pengalaman selama 10 tahun membentuk kabinet sendiri. Yakni saat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden pada 2004-2014.

"Demokrat itu berpengalaman dua kali membentuk kabinet, ketika 10 tahun kita berpemerintahan. Itu juga termasuk mendengarkan kawan-kawan yang dulu kita sebut ada namanya Setgab, Sekretariat Gabungan. Setgab itu untuk menampung kawan-kawan semua berbicara, memikirkan dan bagaimana menjalankan pemerintahan," ujarnya.

Hinca pun mengemukakan Demokrat memiliki kader yang mumpuni untuk menjadi bagian dari pemerintahan. "Jadi soal jumlahnya, soal banyaknya, soal siapa, tentu harus dibicarakan lah sama-sama. Dan saya yakin sekali Pak Prabowo dan Mas Gibran akan memanggil dan berdialog," ucap dia.

Pada sisi lain, Billy David Nerotumile-na, salah satu juru bicara Timnas AMIN (pasangan Capres Anies-Muhaimin), mengkritisi Airlangga yang sudah mewacanakan kursi kabinet sebelum Komisi Pemilihan Umum menyampaikan secara resmi hasil Pilpres 2024. "Saya rasa tidak patut dilakukan kita harus menunggu sampai hasil pemilu diumumkan KPU dan langkah konstitusional lainnya juga patut kita tunggu," kata Billy, Senin, 18 Maret 2024.

la menambahkan, wacana alokasi kursi menteri yang dikemukakan oleh Airlangga itu merupakan indikasi politik transaksional. "Ini perlu menjadi perhatian kita semua bagaimana politik transaksional ini dilakukan jauh jauh hari bahkan sebelum hasil pemilu diumumkan dan Timnas AMIN tetap berkomitmen menjaga iklim demokrasi agar proses demokrasi berjalan bagaimana mestinya," kata Billy.

Toh wacana alokasi Menteri yang dikemukakan oleh Airlangga di Nusa Dua, Bali itu, memiliki sisi internal dan eksternal. Secara internal, Partai Golkar



rogatifnya," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Soal apakah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sudah bertemu Prabowo, Eddy mengakui pertemuan itu sudah berlangsung. "Tentu tidak bisa saya sampaikan di sini, tetapi saya yakini karena hubungan baik kita dengan Pak Prabowo sudah dalam tiga Pilpres kemarin, saya yakini Pak Zul dengan Pak Prabowo sudah melakukan pembahasan yang

kan pertandingan sepak bola yang wasitnya belum meniup peluit panjang tanda pertandingan usai. "Demokrat memandang perlu untuk selesaikan dulu pertandingan ini kan seperti layaknya pertandingan kan sebelum wasit meniup peluit, ya enggak boleh selebrasi. Tunggulah (dalam waktu) dekat, beberapa menit lagi tanggal 20 (Maret) selesai," ujar Hinca Senin, 18 Maret 2023.

Hinca berharap, setelah proses re-

memiliki agenda Musyawarah Nasional pada Desember 2024. Sedangkan secara eksternal, Partai Golkar juga memiliki kepentingan menjaga posisi tawar yang tinggi di antara partai-partai lain yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran.

Titik temunya adalah menjaga kesinambungan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga sebagaimana yang ia kemukakan di Bali. Sebagai tempat DPD Golkar mendeklarasikan satu komando.

"Kita melakukan syukuran atas kemenangan kita dan disinilah para senior Pak Luhut Panjaitan, Aburizal Bakrie, Muhammad Hatta berterima kasih kepada seluruh pejuang-pejuang Golkar yang menunjang kita menang di 15 dari 38

Badung, Bali, sejak Jumat lalu. Mereka mendukung Airlangga Hartarto tetap menjadi ketua umum (ketum) partai ber lambang pohon beringin itu. Dukungan tersebut diberikan secara tertulis dan di dalam rapat secara tertutup.

Pemberian dukungan untuk Airlangga tersebut merupakan agenda khusus dalam pertemuan itu di samping membahas hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 dengan suasana silaturahmi Buka Puasa bersama di bulan Ramadhan. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat Maman Abdurrahman mengakui pemberian dukungan kepada Airlangga.

Maman mengungkapkan bahwa dukungan tersebut adalah kado bagi Airlangga yang dinilai berprestasi, salah satunya adalah perolehan kursi Golkar

mengungkapkan surat dukungan tersebut isinya antara lain memohon, mengusulkan, dan memilih Airlangga untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029. Dia mengatakan, surat dukungan tersebut di Bali mewakili pengurus di tingkat kabupaten dan provinsi.

Ia pun meyakini bahwa surat dukungan itu bakal menjadi dukungan mutlak untuk Airlangga pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar pada Desember 2024. "Jika ada pihak lain yang ingin (menjadi Ketua Umum Golkar) silakan. Tapi, pemilik suara sudah sama bahasanya," ungkap Korry.

Nah, bagaimana dengan alokasi menteri? Setelah kembali dari Bali, Airlangga menjelaskan soal permintaan lima kursi menteri masih dalam tahap



(provinsi)," kata Airlangga.

Ia juga berpesan agar Golkar jangan mau dipecah belah oleh pihak luar. "Saya menyemangati, Golkar jangan mau dipecah. Jangan mau dimanfaatkan dari sekarang sampai ke Munas, pasti akan ada yang berusaha memecah belah Golkar. Tetapi dengan kehadiran di sini, ini dibuktikan dengan senior partai Golkar bersama kita," kata Airlangga.

Alhasil, para pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar se-Indonesia berkumpul di Nusa Dua, Kabupaten

di DPR pada Pileg 2024. "Memberikan kado terindah atas kepemimpinan Pak Airlangga. Menyampaikan agar ke depan memimpin Partai Golkar," kata Maman.

Dia menjelaskan, dukungan tersebut merupakan inisiatif para Ketua DPD Golkar provinsi se-Indonesia yang hadir di pertemuan itu. Maman menambahkan, kesuksesan Golkar pada Pileg 2024 tak terlepas dari tangan dingin Airlangga.

Sedangkan Ketua DPD Golkar Provinsi Bali I Nyoman Sugawa Korry

pembahasan. Selain itu, dia mengatakan, Golkar juga masih menanti hasil resmi Pemilu 2024 oleh KPU.

"Kalau itu masih dalam pembahasan. Kita tunggu pengumuman besok," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024.

Saat ditanya lebih lanjut soal posisi menteri apa saja yang ditargetkan untuk lima kursi yang dimaksud, Airlangga menegaskan bahwa pihaknya belum meminta apa pun. "Kita belum minta. Terima kasih," kata Airlangga. ●

PEMILU BERLANJUT DI PILKADA SERENTAK

Tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 mulai berlangsung. Utak-atik ketentuan Pilkada terjadi juga.

Usai Pilpres dan Pilkada, tahapan Pilkada 2024 pun bergulir. Malah di Boyolali, Jawa Tengah, sudah terpasang baliho salah satu kandidat yang berniat maju di pemilihan bupati.

Di sisi penyelenggara, sekitar dua pekan sebelum Hari H Pemungutan Suara Pemilu Legislatif dan Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah mensosialisasikan Peraturan teknis Pilkada secara serentak yang mencakup 545 daerah.

Rinciannya, Pilkada 2024 mencakup Pemilihan Gubernur di 37 provinsi, Pe-

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Toh tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak memang sudah berjalan sejak PKPU itu berlaku. Malah di lingkup Partai Golkar, Dewan pimpinan Pusatnya sudah mulai menugaskan para kader sejak November 2023, setahun sebelum hari pemungutan suara Pilkada serentak 2024.

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang berpeluang menjadi petahana pada Pilkada 2024 malah mengungkapkan mendapat dua surat penugasan dari DPP Partai Golkar untuk maju pada



milihan Bupati di 415 kabupaten, dan Pemilihan Wali Kota di 93 kota, secara serentak seluruh Indonesia. Peraturan KPU (PKPU) sudah menetapkan jadwal pemungutan suara dalam Pilkada 2024 itu. "Pelaksanaan pemungutan suara pada Rabu, 27 November 2024," demikian bunyi PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Pemilihan Kepala Daerah 2024.

"Saya itu mendapatkan dua surat penugasan, satu di Jabar, dua di DKI (Jakarta). Jadi, suratnya dua," kata Ridwan saat menghadiri Rakerda Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jabar di Bandung, Kamis, 23 November 2023.

Mengenai ke mana akan menentukan arah politiknya pada 2024, Ridwan

Kamil mengaku masih memprioritaskan untuk tetap berada di Jabar. Namun, berdasarkan surat tugas yang diberikan DPP Partai Golkar, tidak menutup kemungkinan dia akan berkiprah di DKI Jakarta.

"Karena dikasih dua, prioritas tetap di Jabar, tapi diminta tetap mencoba berkiprah sesuai penugasan di DKI Jakarta," kata Kang Emil, panggilan ringkasnya.

Nah, surat tugas yang dikeluarkan oleh Partai Golkar ternyata memang banyak, sudah lebih dari seribu sejak November 2023. Harap maklum mengingat Pilkada berlangsung di 545 daerah dari berbagai tingkatan.

Ke wilayah yang jauh pun, Partai Golkar menjangkau para kadernya yang ditugasi mengikuti kontestasi Pilkada 2024. "Kita kasih surat tugas kepada 1.117 Bakal Calon Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indo-

diusung sebagai calon Gubernur Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni Yohanes Manibuy Balon Bupati dan Alimudin Baedu Balon Wakil Bupati. Orgenes Wonggor Balon Bupati Pegaf. Ferry Auparay Balon Bupati Teluk Wondama. Kabupaten Manokwari diberikan kepada Haryono M.K. May dan Hermus Indou. Kabupaten Manokwari Selatan diberikan surat tugas kepada Orpa Nelce Dedaida, Bernard Mandacan serta Apolos Mandosir. Sementara Kabupaten Fakfak, Samaun Dahlan serta Kabupaten Kaimana surat penugasan diberikan kepada Hasbullah Fuarada dan Hasan Achmad.

Airlangga menegaskan surat tugas yang diberikan kepada kader Golkar dan juga anak bangsa yang berpotensi sebagai kepala daerah belum final. Pasalnya, penerima surat tugas akan mensosialisasikan diri dan memenangkan partai berlambang pohon beringin pada pesta demokrasi Pemilihan Legislatif pada 14 Februari 2024.

Dengan hasil Pileg 2024, lanjut Air-

yang menerima surat tugas sama dengan yang akan direkomendasi Golkar dalam kontestasi Pilkada serentak 2024. "Belum tentu ya, akan berubah karena akan dilakukan evaluasi dan hasil survei," tandasnya.

Nah, usai Pilprs dan Pileg, Airlangga seperti mengingatkan kembali soal evaluasi dan survei elektabilitas menjelang Pilkada 2024. "Hari ini kita sudah mempersiapkan untuk Pilkada ke depan. Jadi Partai Golkar sudah mengeluarkan lebih dari 1.040 penugasan 1.040 penugasan untuk bupati, wali kota, gubernur," kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Minggu, 10 Maret 2024.

Ia juga mengemukakan kembali soal evaluasi dan survei elektabilitas para kadernya yang mendapat tugas. "Tentu kita akan melihat kelanjutan daripada mekanisme pilkada nanti dan oleh karena itu dalam tiga-empat bulan ke depan, Partai Golkar akan berkonsentrasi ke sana," sambung Airlangga.

Partai Golkar akan terlebih dahulu



nesia, termasuk didalamnya Pak Paulus Waterpauw sebagai Bakal Calon Gubernur Papua Barat," ucap Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartanto usai melantik pengurus DPD Golkar Papua Barat di Ballroom Aston Niu Manokwari, akhir 2023 lalu

Khusus Papua Barat, surat penugasan bakal calon kepala daerah diberikan kepada Paulus Waterpuw yang



langga, akan menjadi tiket bagi para Bakal Calon Kepala Daerah menerima rekomendasi dukungan politik dari Partai Golkar bertarung pada pilkada serentak. Tentunya, pesan Airlangga, bukan hanya hasil kursi Pileg 2024 menjadi ukuran para penerima surat tugas menerima rekomendasi calon kepala daerah, tetapi masih perlu dilakukan survei elektabilitas dari internal dan juga sejumlah lembaga survei.

"Surat penugasan belum final, masih ada evaluasi pasca hasil pileg dan mereka yang menerima surat tugas itu masih perlu dilakukan survei elektabilitasnya," sebut Airlangga.

Hasil survei lanjut Airlangga juga belum tentu bakal calon kepala daerah

melakukan survei untuk Pilkada. Hal ini untuk menilai kesiapan kader-kader Partai Golkar yang akan maju dalam Pilkada 2024.

"Karena ada calon yang sesudah pileg dinyatakan lanjut, ada calon yang sudah mengatakan tidak akan lanjut, dan ada calon yang baru kemarin dalam pemilu legislatif angkanya tembus ratusan ribu, sehingga ini semua akan dievaluasi untuk Pilkada mendatang," imbuh dia.

Rupanya memang ada kemungkinan politisi yang terpilih menjadi anggota legislatif pada Pemilu 2024 dapat bersaing dalam Pilkada. Namun ini menimbulkan dilema karena ada ketentuan anggota legislatif harus mundur jika mencalon-

kan diri sebagai calon kepala daerah. Soal ini pun sempat menjadi permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi pada awal Februari 2024.

Adalah dua orang mahasiswa, Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan yang mengajukan permohonan pengujian soal itu. Pokok uji materi adalah Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Sidang Pendahuluan dari Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 ini dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (2/2/2024) oleh Panel Hakim yakni Ketua MK Suhartoyo, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh.

Nah, Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada menyatakan, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan."

Nur Fauzi menyebutkan pasal tersebut menyatakan pengunduran diri dari posisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang ingin menjadi peserta dalam pemilihan kepada daerah (pilkada). Namun pada pasal tersebut tidak mengkomodir soal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang belum dilantik. Akibatnya, dikhawatirkan adanya konflik status antara caleg terpilih Pemilu 2024 dengan pasangan calon peserta Pilkada 2024. Bahkan jika dilanjutkan,

sambung Fauzi, hal demikian bisa menghalangi proses kaderisasi dalam partai politik.

"Partai politik berfungsi sebagai pengkaderan, potensi dari permohonan ini karena hal demikian berpotensi mencederai kaderisasi pada partai politik," sampai Fauzi yang hadir bersama dengan Ahmad Alfarizy di Ruang Sidang Pleno, Gedung I, MK.

Lebih lanjut Alfarizy meneruskan alasan permohonan bahwa pelaksanaan pemilu dan pilkada yang dilakukan serentak pada 2024 ini berpotensi besar pada munculnya dual mandate bagi peserta yang ikut dalam

tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak akan terganggu apabila di kemudian hari Mahkamah mengabulkan perkara ini; dan 2) memberikan kepastian waktu bagi caleg DPR, DPRD, atau DPD yang hendak maju juga pada Pilkada 2024 untuk berpikir secara matang dan konsekuen terhadap rencana tersebut," ungkap Alfarizy.

Apa putusan terhadap uji materi aturan Pilkada ini? MK menyatakan menolak seluruh permohonan Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan sebagaimana terungkap dalam Sidang Pengucapan Putusan Nomor 12/PUU-XXII/2024 ini digelar di Ruang Sidang Pleno MK pada Kamis, 29 Februari 2024 yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangan hukum Mahkamah, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyebutkan status calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang terpilih sesungguhnya belum melekat hak dan kewajiban konstitusional yang berpotensi dapat disalahgunakan oleh calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika hal ini dikaitkan dengan kekhawatiran para Pemohon sebagai pemilih yang berpotensi tidak mendapatkan jaminan adanya pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelaksanaan yang memberi rasa keadilan bagi para pemilih, maka kekhawatiran demikian adalah hal yang berlebihan.

Alasannya, jika dicermati berkenaan dengan sequence waktu yang ada saat ini, masih terdapat selisih waktu antara pelantikan calon anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD terpilih dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang hingga saat ini direncanakan akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Dengan demikian, maka belum relevan untuk memberlakukan syarat pengunduran diri bagi calon anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Namun demikian, sambung Daniel,



kontestasi pesta demokrasi tersebut. Kondisi ini menurut para Pemohon merugikan masyarakat yang pada awalnya memilih seseorang untuk mengisi satu posisi saja, justru harus menerima realitas terdapat kandidat yang dipilihnya dalam pemilu legislatif kemudian maju menjadi kepala daerah tanpa mengundurkan diri.

"Apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka ada dua jaminan yang dapat diberikan, 1) memas-

penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersyaratkan bagi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi sebagai anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD apabila tetap ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan dalil para Pemohon mengenai belum diakomodirnya ketentuan pengaturan pengunduran diri terhadap calon anggota DPR, DPD, DPRD yang akan menjadi calon kepala daerah bukan menjadi penyebab calon anggota dewan atau calon kepala daerah tersebut mengingkari amanat yang diberikan oleh pemilihnya, termasuk menjadi "second option" dalam memilih jabatan baginya. Terhadap jabatan yang masuk dalam rumpun "jabatan yang dipilih", menurut Mahkamah hal demikian menjadi suatu bentuk keleluasaan atau kebebasan bagi para pemilih untuk menentukan pilihannya. Alasannya, tidak tertutup kemungkinan penilaian kapabilitas dan integritas dari calon yang bersangkutan, lebih diketahui dan dirasakan oleh pemilih. Sebab pemilih merupakan "pengguna" dari calon anggota DPR, DPD, DPRD, dan bahkan calon kepala daerah yang bersangkutan.

"Oleh karena itu, menurut Mahkamah belum diakomodirnya persoalan tersebut tidak harus memperluas pemaaknaan ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada, namun hal tersebut cukup diakomodir dengan penambahan syarat. Bahwa pengunduran diri calon anggota DPR, DPD, DPRD sebelum ditetapkan sebagai anggota justru berpotensi mengabaikan prinsip kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945," ungkap Daniel.

Nah, apakah peraturan KPU yang mengatur tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada akan menyesuaikan isinya dengan putusan MK, proses dan Peraturan KPU berikutnya dapat menjadi tolok-ukurnya.

Sementara ini PKPU Nomor 2 Tahun 2024 masih menjadi pedoman. PKPU Nomor 2 itu sudah mengatur banyak ta-

hapan yang harus dilalui sebelum sampai ke hari pemungutan suara. Namun secara umum, PKPU No 2 Tahun 2024 itu terdiri dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024.

Di tahap persiapan, berlangsung pembentukan PPK, PPS, dan KPPS yang terjadwal pada 17 April-5 November 2024. Sedangkan pembentukan panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas lapangan, dan pengawas tempat pemungutan suara: Sesuai ketetapan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selanjutnya, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan: 27 Februari-16 November 2024. Disusul

etapan pasangan calon, berlangsung masa kampanye pada 25 September-23 November 2024. Diselingi masa tenang beberapa hari setelah masa kampanye berakhir, tibalah pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024.

Selanjutnya penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasinya yang terjadwal pada 27 November-16 Desember 2024. Pada tahap ini dapat terjadi sengketa hasil penghitungan suara.

Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan informasi permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) ke KPU. Pilkada yang



dengan penyerahan daftar penduduk potensial pemilih: 24 April-31 Mei 2024. Tahap persiapan diakhiri dengan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terjadwal pada 31 Mei-23 September 2024.

Beriringan dengan tahap persiapan, proses penyelenggaraan pun berlangsung dengan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon yang terjadwal pada 5 Mei 2024-19 Agustus 2024. Berlanjut dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon: 24-26 Agustus 2024.

Sedangkan pendaftaran pasangan calon terjadwal pada 27-29 Agustus 2024 beriringan dengan penelitian persyaratan calon pada 27 Agustus-21 September 2024.

Usai itu, barulah berlangsung penetapan pasangan calon oleh KPU pada 22 September 2024. Tiga hari sesudah pen-

tanpa sengketa akan ditetapkan paling lambat lima hari setelah pengumuman sengketa yang terdaftar di MK.

Sedangkan Pilkada yang bersengketa di MK akan menunggu putusan akhir sebelum ditetapkan oleh KPU. Sedangkan KPU menjadwalkan penetapan pemenang Pilkada yang bersengketa adalah lima hari setelah sengketa mendapat putusan MK.

Akhirnya, setelah tahap penyelenggaraan selesai, KPU akan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan calon terpilih. Waktunya, paling lama tiga hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Usai itu tinggal menunggu jadwal pelantikan bagi pasangan kepala daerah yang terpilih.

Nah, meski jadwalnya sudah tersusun, utak-atik peraturan sebagaimana uji materi di MK masih bisa terjadi. Perlu jugaantisipasi. ●

INDONESIA DAN DEMOKRASI

Oleh: Farid Muttaqin

Departemen Antropologi, Binghamton University, New York

Pengelola LETSS Talk (Let's Talk about Sex n Sexualities)

Indonesia pasca-Reformasi 1998 diklaim sebagai salah satu negara terbesar demokrasi. Dalam banyak studi antropologi, sosiologi, dan ilmu politik, Indonesia dirujuk sebagai contoh penting kompatibilitas dan keharmonisan relasi Islam dan demokrasi; di Indonesia, Islam dan demokrasi tidak saling kontradiktif dan konflik. Sebagai contoh, feminisme—salah satu praxis demokrasi—menjadi agenda aktivisme yang hidup di kalangan Muslim Indonesia.

Pemilu 2024 memunculkan pertanyaan, apakah demokrasi benar-benar bisa menjadi bagian sistem dan budaya politik yang mapan di Indonesia? Pada pemilu lalu, beberapa kalangan akademisi dan aktivis menunjukkan keresahannya terkait degradasi demokrasi (democratic backlash) yang dipertontonkan melalui berbagai manuver politik yang melibatkan kekuasaan.

Pertanyaan di atas penting menjadi pemikiran dan refleksi bersama karena keresahan para akademisi dan aktivis yang, meski viral di internet, tidak menjadi alat kritik yang bisa memengaruhi politik elektoral. Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung “susu dan makan gratis” dan paling menjadi target kritik degradasi demokrasi menjadi pasangan paling unggul, mendapatkan hampir 60 persen suara. Sekali lagi, meski viral di internet, kampanye mengusung demokrasi masih sangat jauh dari populer.

Para analis, terutama dari elite terdidik, menunjuk kalangan menengah ke bawah sebagai kelompok pemilih mayoritas yang menentukan pilihannya atas dasar kepentingan pragmatis, seperti susu dan makan gratis, beasiswa, dan proyek-proyek pembangunan infrastruktur daripada agenda demokrasi. Dengan jumlah suara hampir 60 persen, pilihan atas dasar kepentingan pragmatis ini sesungguhnya melintasi banyak kategori. Tidak hanya kelas, tetapi juga generasi, profesi, agama, jender, dan geografi.

Pemilih muda yang menjadi faktor determinan termasuk bagian dari kelompok pemilih yang tidak terlalu tertarik menjadikan isu-isu demokrasi sebagai pertimbangan utama. Bahkan, yang menarik, saya menemukan, seorang transjender yang merupakan kelompok paling minoritas dan termarginal—dianggap paling perlu demokrasi—tak terusik dengan kampanye krisis demokrasi, tetap yakin untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

Secara global, saat ini, demokrasi banyak mengalami resistansi dari negara-negara Islam setelah Amerika Serikat dan beberapa negara demokrasi dianggap tidak konsisten menjalankan demokrasi dengan keterlibatannya dalam serangan terhadap Irak, Afghanistan, dan tidak memberikan perlindungan terhadap rakyat Palestina dari serangan Israel. Di negara-negara yang memiliki akar dan konteks sejarah demokrasi,

demokrasi juga sedang mengalami tantangan internal.

Meski demikian, sebagai bagian dari sejarah mereka, demokrasi akan selalu hidup dan menjadi sistem dan budaya politik yang solid di sana. Ketika demokrasi bahkan di tempat asalnya sedang mengalami tantangan, tentu, di rumah tetangga yang sangat jauh, seperti Indonesia, bukan hal strategis dan populer menjadikannya tema kampanye dalam politik elektoral.

Akar Geneologis

Demokrasi sebagai sistem dan budaya politik, secara historis tidak mempunyai akar geneologis dalam masyarakat kita. Kita tidak mengalami Revolusi Akal (Enlightenment) yang melahirkan rasionalisme, liberalisme, dan individualisme—basis filosofis demokrasi.

“Demokrasi merupakan produk Barat yang tidak (sepe-nuhnya) pas dengan budaya Indonesia” menjadi narasi yang legitimate. Usaha-usaha untuk menerapkan demokrasi tidak lain adalah usaha untuk mereplikasi sistem politik negara-negara yang mempunyai sejarah demokrasi, seperti Amerika Serikat.

Menggunakan historical anthropology ala Talal Asad, Indonesia tidak memiliki material condition yang “valid” dan “legitimate” dari segi historis, tradisi, dan sosiologis untuk menjadi negara demokrasi. Demokrasi tidak berkembang dari kehampaan sejarah (vacuum of history) yang merevolusi tradisi-tradisi yang tidak mendukung demokrasi.

Kita bisa mereplikasi beberapa praksis demokrasi, seperti pemilu, kebebasan bersuara di internet, kebebasan berserikat, dan kebebasan akademik—hasil paling menonjol dari reformasi. Hanya itu! Masih banyak praktik budaya dan tradisi yang tidak compatible dengan prinsip dasar demokrasi. Feodalisme masih berlangsung sangat dominan dalam relasi personal, keluarga, masyarakat, dan bernegara.

Kita belum sepenuhnya memahami apalagi menghormati dan melindungi kebebasan individual (individual freedom) dan hak asasi manusia untuk mengekspresikan identitasnya. Alih-alih, kita akan punya undang-undang yang bisa melindungi hak perkawinan non-heteroseksual—sebuah utopia yang hampir mustahil menjadi kenyataan di Indonesia—kriminalisasi dan persekusi terhadap LGBTIQ masih menjadi praktik yang lumrah.

Aborsi aman sebagai hak dan keadilan reproduksi entah kapan akan terwujud. Tidak semua penganut agama dan kepercayaan bisa bebas mendirikan rumah ibadah. Marxisme dan komunisme masih menjadi ideologi terlarang.

Kita juga masih menghadapi problem persamaan di depan hukum (equality before the law), salah satu prinsip utama demokrasi. Bukan saja banyak pelanggaran berat masa lalu

yang tidak diproses secara hukum (apalagi secara adil), banyak penyalahgunaan kekuasaan menjadi manuver politik yang tidak mendapatkan penegakan hukum yang kuat. Di sini, penting sekali memahami spektrum demokrasi yang tak sekadar kebebasan berbicara dalam internet, yang memang sudah berkembang sangat baik.

Seperti sekularisme sebagai hasil kesejarahan sosial-politik konflik agama dan negara dalam masyarakat Eropa, demokrasi tidak punya akar sejarah dan geneologis di Indonesia yang memungkinkannya menjadi sistem dan budaya politik mapan. Demokrasi bukanlah national heritage bagi kita, yang membuat kita bangga dan "mati-matian" mempertahankannya dengan ongkos apa pun.

Perkembangan demokrasi pasca-reformasi yang menjadikan Indonesia diklaim sebagai negara kuat demokrasi adalah upaya

hadir di lembaga pendidikan.

Melihat perkembangan terakhir politik yang mengecilkan isu-isu demokrasi, kita perlu memikirkan ulang tesis Indonesia sebagai the most promising country untuk sekadar mereplikasi demokrasi dan menjadi sampel keharmonisan relasi Islam dan demokrasi, apalagi menjadi negara demokrasi yang mapan. Meski demikian, usaha untuk menghadirkan demokrasi harus terus dilakukan, justru perlu diperkuat. Orientasi membangun trayek sejarah harus menjadi landasan utama gerakan demokrasi di Indonesia.

Gerakan demokrasi adalah gerakan mengubah sejarah sekaligus budaya, upaya learn, unlearn, dan relearn untuk mengubah cara pandang dan cara berpikir: tentang relasi kekuasaan, hak dan kebebasan individu, dan kesetaraan di depan hukum. Usaha ini menuntut investasi berkelanjutan,



mengubah trayek sejarah yang butuh waktu sangat panjang. Tanpa geneologi historis sebagai material condition demokrasi, perubahan trayek sejarah tidak akan pernah stabil dan solid.

Tidak jarang, dalam kondisi tertentu, gagasan-gagasan demokrasi mengalami tantangan dan resistensi, bahkan dari mereka yang menggunakannya untuk mengekspresikan pilihan politiknya pada saat pemilu. Bisa jadi, para akademisi yang menyampaikan kritik atas degradasi demokrasi pada saat pemilu adalah orang yang sama yang melarang LGBTIQ

bukan sekadar temporer memanfaatkan momen pemilu.

Demokrasi yang tidak populer di kalangan orang muda adalah kegagalan gerakan demokrasi yang tidak mengagenda-kan pembangunan ruang-ruang belajar, di dalam atau di luar sekolah, bagi mereka untuk melalui proses learn, unlearn, dan relearn itu. Pertanyaan tentang posisi demokrasi pasca-pemilu perlu mendorong kita membangun agenda-agenda strategis penguatan demokrasi, sekali lagi, dalam konteks membangun trayek sejarah. ●



LAKUKAN PERBAIKAN RTLH DAN SANITASI SERENTAK

Upaya perbaikan infrastruktur di masyarakat terus dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni salah satunya dengan menggelar perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan perbaikan sanitasi serentak se-Sumsel. Kegiatan ini dipusatkan Gang Kaleng, Plaju Ilir, Plaju, Palembang, Sumatera Selatan.

Terdapat 8.391 yang masuk dalam kategori rumah yang akan dibedah, kedepannya jumlah tersebut akan terus bertambah. Terkait bantuan sanitasi tercatat berjumlah lebih dari 6.984 dan akan diberikan kepada masyarakat se-Sumsel.

Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pemberian sanitasi serentak se-Sumsel merupakan rangkaian dari tiga kegiatan yang telah dilaunching Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian sebelumnya. Diantaranya Gerakan Bedah Rumah Serentak se Sumsel (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se Sumsel (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting di Sumsel.

"Gerakan serentak ini terus kita lakukan agar pembangunan yang ada di Sumsel lebih efektif, efisien, tepat sasaran serta dirasakan oleh masyarakat,"

ucap Fatoni.

Kemudian, Fatoni juga berterima kasih kepada seluruh pihak terlibat yang membantu menyukseskan kegiatan tersebut. Ini dikarenakan dana untuk mewujudkan program bedah rumah berasal dari APBN, APBD Provinsi Sumsel dan kabupaten/kota, Baznas serta CSR perusahaan.

"Gerakan ini sangat baik dan bagus dalam mengentaskan kemiskinan. Sudah ada data bedah rumah itu 8.391 yang akan dibedah. Ini data sementara dan ini akan terus bertambah, termasuk sanitasi ini juga akan terus bertambah," katanya.

Fatoni menyebut berbagai Gerakan Serentak yang telah di launching oleh Pemprov Sumsel merupakan prestasi yang membanggakan. Selain itu, kedepannya diharapkan melalui berbagai Gerakan Serentak dapat tepat sasaran dan efektif pada masyarakat. Terkait, pemberian sanitasi saat ini sudah terkumpul 6.984 penerima dan

akan terus bertambah juga diharapkan dapat menjadi yang terbesar dalam skala nasional.

"Nanti diharapkan pada HUT Provinsi Sumsel ke-78 pada tanggal 15 Mei 2024 nanti, akan kita resmikan apa yang kita launching ini," tuturnya.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Basyaruddin Akhmad dalam laporannya menye-

ing 7 dibedah 5 dari BSB dan 2 Jamkrida," sambungnya.

Nantinya, pada hari jadi Provinsi Sumsel yang ke-78 Tahun, akan diresmikan 78 unit rumah di Palembang dan 1.700 di wilayah Provinsi Sumsel. Launching RLTH yang diinisiasi Pj Gubernur Agus Fatoni tersebut mendapatkan sambutan antusias dari warga sekitar



but gerakan launching Bedah Rumah Tidak Layak Huni dan Penyerahan Sanitasi Serentak di Sumsel sangat bermanfaat bagi masyarakat. Program bedah rumah ini merupakan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik BUMN, BUMD, perusahaan swasta, Baznas, APBN dan APBD.

"Alhamdulillah, bedah rumah ini merupakan inisiasi Pj Gubernur Agus Fatoni," katanya.

"Menurut catatan kami ada bedah rumah sebanyak 8.000 lebih dan ini belum pernah terjadi secara serentak. Kami paparkan disini akan di launch-

Seperti yang diungkapkan Yuli, dirinya mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Agus Fatoni yang akan membedah tempat tinggalnya.

"Alhamdulillah senang rumah kami dibedah," ucapnya.

Gencarkan Gerakan Bedah Rumah

Pemprov Sumsel juga baru saja menggelar Gerakan Bedah Rumah Serentak (GBR) se Sumatera Selatan. Melalui program tersebut, Pemprov Sumsel bakal membenahi 8.391 unit rumah secara berkala nantinya angka tersebut akan terus bertambah.

"Jumlah ini kita harapkan akan terus bertambah karena kita akan menginventarisir data masyarakat yang akan ikut serta bedah rumah," ucap Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni di Jl Pangeran Sido Ing Kenayan, Karang Anyar, Gandus, Palembang.

Fatoni mengatakan ribuan unit rumah tersebut akan diresmikan pada HUT ke-78 Provinsi Sumsel tanggal 15 Mei 2024 mendatang. Diharapkan angka tersebut bisa menembus rekor MURI.

"Ini kita berharap pada saat peresmian pada saat HUT Provinsi Sumsel nanti kita bisa masukan ke rekor MURI," kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, bantuan dana dari CSR dapat dianggarkan untuk membedah 75 rumah, kemudian dari APBD 3.666 rumah, APBN 1.345 rumah, Baznas Provinsi, kabupaten/kota 345 rumah dan akan tetap bertambah. Bahkan, Baznas kabupaten/kota nantinya akan membangun 10 rumah setiap bulannya.

"Kalau dari dana desa ada 1.293 rumah ini akan kita tambahkan, nantinya akan kita sosialisasikan terus karena bisa digunakan untuk bedah rumah," ucap Fatoni.

"Dari Dinas Sosial bantuan untuk sanitasi juga banyak, dari bantuan keuangan Pemprov juga ada Rp 2 miliar per kabupaten/kota sehingga akan membangun 20 rumah dalam bedah rumah, jadi minimal ada 8.931 rumah yang akan bisa dibedah rumah," sambungnya.

Agus Fatoni mengajak seluruh stakeholder, salah satunya Tim Penggerak PKK untuk dapat bersama-sama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersatu padu penuh semangat, bekerja keras, menjaga nilai-nilai kebersamaan dan perdamaian membangun Sumatera Selatan. Ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat Tri Tito Karnavian mengatakan kunjungannya kali ini sebagai upaya percepatan pembangunan dalam melayani masyarakat. Dia juga berharap Provinsi Sumsel dapat menjadi daerah percontohan dalam penanganan stunting. ●



GELAR GSMP DARI SEKOLAH DAN KANTOR

Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang telah digagas kepala daerah sebelumnya dinilai berperan besar dalam mengendalikan inflasi. Melihat manfaat yang besar itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni terus melanjutkan bahkan mengembangkan program tersebut lebih masif lagi.

Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang telah digagas kepala daerah sebelumnya dinilai berperan besar dalam mengendalikan inflasi. Melihat manfaat yang besar itu Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni terus melanjutkan bahkan mengembangkan program tersebut lebih masif lagi.

Diinal efektif menekan laju inflasi, Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni meluncurkan GSMP Goes to School and Goes to Office atau menanam dari lingkungan sekolah dan kantor. Kegiatan ini dilaksanakan di Plaza Stadion Gelo- ra Sriwijaya Jakabaring Sport City (JSC)

Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/2/2024) lalu.

GSMP Goes to School and Goes to Office merupakan bentuk siner- gitas antara Pemprov Sumsel ber- sama Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi Sumsel. Program ini merupa- kan bagian dari Gerakan Pengendali- an Inflasi Serentak Sumatera Selatan (GPISS) yang selaras dengan Gera- kan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Fatoni mengatakan GSMP Goes to School Goes to Office sebagai bentuk keseriusan Pemprov Sumsel dalam mengendalikan inflasi. Nantinya pem- berian bibit tersebut bersumber dari

APBD Provinsi Sumsel yang nantinya ditanam oleh pihak sekolah dan per- kantoran di lahan sekitar.

"Kita sudah mengalokasikan angga- ran yang cukup banyak dari provinsi, juga bisa ditambah dari APBD kabu- paten/kota, juga bisa ditambah dari yang bersumber dari APBD desa. Ini semua perlu kita lakukan secara masif agar gerakan Sumsel Mandiri Pangan ini betul-betul membuat Sumsel Man- diri akan pangannya dan juga kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari," kata Fatoni.

Fatoni mengimbau para kepala se- kolah untuk segera melaporkan kebu- tuhan bibit yang diperlukan sehingga

dapat menjadi dasar Pemprov Sumsel dalam memberikan bantuan bibit ke masing-masing sekolah.

"Kepala sekolah segera laporkan kebutuhan bibitnya, karena ini menjadi dasar kita untuk memberikan bantuan. Saya juga berpesan agar kegiatan ini dipublikasikan secara luas, sehingga yang kita lakukan diketahui masyarakat bahwa kita banyak melakukan upaya untuk memajukan Sumsel terutama untuk kesejahteraan masyarakatnya," ucap Pj Gubernur Agus Fatoni.

Kedepannya sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Sumsel maupun kantor instansi vertikal akan menanam bibit-bibit yang diberikan, termasuk juga di desa kelurahan dan kecamatan. Bibit tersebut berupa tanaman cabai, bawang merah dan komoditas lainnya.

"Terus kita lakukan gerakan ini, untuk melengkapi upaya gerakan kita dari

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta seluruh instansi dan masyarakat dalam rangka penanganan dan pengendalian inflasi. Surat edaran sudah saya tandatangani, saya sudah minta ke sekolah, BUMN, BUMD, Bupati/Walikota sebelum launching, untuk turut serta mensukseskan gerakan ini, mulai dari pembagian bibit, penganggaran dan monitoring," jelas Fatoni.

Belum lama ini, Pemprov Sumsel telah melaunching Gerakan Bedah Rumah Secara Serentak se-Sumatera Selatan (GBRSS), Gerakan Pembangunan Sanitasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPSSS) dan Gerakan Penanganan Stunting se-Sumatera Selatan (GPStSS).

Bahkan sebelumnya juga Pemprov Sumsel telah melaunching secara resmi Gerakan Penanganan Inflasi

Serentak se-Sumsel (GPISS) dan Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumsel (GPMSS).

"Melalui Gerakan Pasar Murah Serentak se-Sumatera Selatan, Pemprov Sumsel mengadakan Operasi Pasar Murah yang berlangsung di 17 kabupaten/kota se-Sumsel secara serentak setiap hari Senin, Selasa dan Kamis hingga Idul Fitri mendatang. Langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat, dan diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumsel," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BI Perwakilan Sumsel Ricky Perdana Gozali mengatakan Provinsi Sumsel patut berbangga karena capaian inflasi pada tahun 2023 inflasi gabungan dua kota di Provinsi Sumsel tercatat sebesar 3,17 persen year on year.

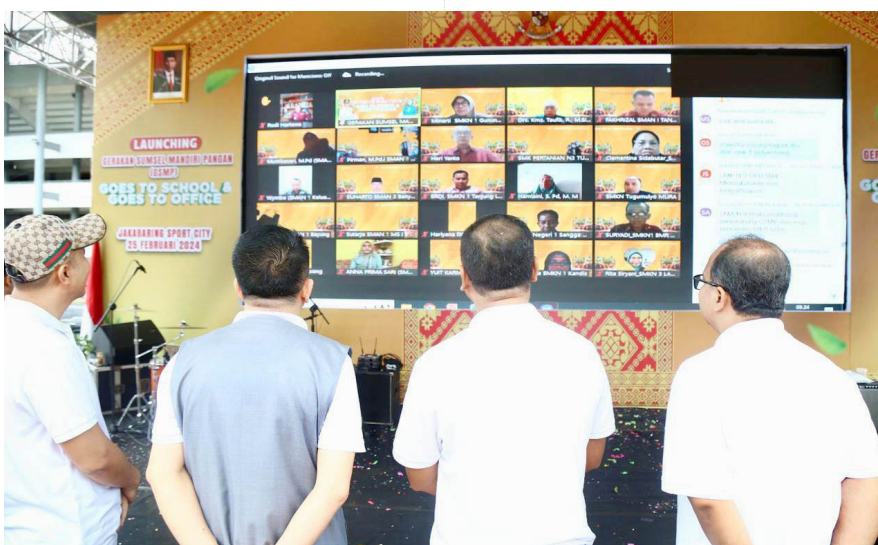
Hasil itu lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada Tahun 2022 sebesar 5,94 persen. BI Perwakilan Sumsel telah bersinergi dengan Pemprov Sumsel untuk menginisiasi launching GSMP Goes To School and Goes to Office sejalan dengan gerakan nasional pengendalian inflasi Pangan atau GNPIP.

"Sejalan juga dengan arahan bapak Presiden Republik Indonesia pada rakornas inflasi Tahun 2022 lalu, tahun ini gerakan Sumsel Mandiri Pangan kembali diperkuat dengan perluasan inovasi yang menysasar pelajar serta pegawai instansi dan koperasi swasta se-sumatera Selatan," katanya.

Prosesi launching GSMP Goes To School and Goes to Office ditandai dengan hand scanning oleh Pj Gubernur Agus Fatoni didampingi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky Perdana Gozali dan Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan Badan Pangan Nasional Kelik Budiana.

Pada kesempatan yang sama juga dilakukan pemberian piagam penghargaan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel kepada Pemprov Sumsel, atas upaya perluasan digitalisasi daerah melalui Qris di Provinsi Sumsel tahun 2023.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Ricky Perdana Gozali kepada Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni. •





REAKTIVASI BANDARA GATOT SOEBROTO BERI MANFAAT BESAR BAGI SUMSEL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung penuh reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan karena dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Untuk mewujudkan hal tersebut Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menyatakan siap mendukung percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan bersama seluruh pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur Sumsel, Kabupaten OKU, dan Kabupaten OKU Selatan Sumsel.

Dukungan seluruh daerah ini menjadi dasar utama bagi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menyetujui aktivasi bandara tersebut. Menhub Budi Karya Sumadi bahkan mengupayakan ketersediaan pesawat ATR guna mendukung percepatan reaktivasi bandara.

"Ops pertama itu pesawat ATR, itu kami upayakan untuk disediakan ya, kami akan upayakan semaksimal mungkin. Tapi pada prinsipnya kami akan upayakan percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan akan segera beroperasi untuk komersil kembali," kata Menhub di Kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia (RI), Jakarta.

"Ini jadi bisa silahkan dilakukan saja

reaktivasi aja. Itu berita baiknya ya," tegas Menhub.

Keputusan ini membuat Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni menyambut baik opsi dari Menhub Budi Karya Sumadi. Dia berharap reaktivasi Bandara Gatot Soebroto akan kembali beroperasi sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 mendatang.

"Terima kasih Bapak Menteri, bahagia sekali kami. Mudah-mudahan sebelum lebaran sudah bisa beroperasi," ucap Fatoni.

Fatoni mengatakan dalam audiensi kali ini seluruh kepala daerah baik itu di Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung yang berdekatan dengan lokasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan hadir langsung.

Hal ini sebagai bentuk komitmen nyata dari mereka guna mewujudkan rencana reaktivasi bandara tersebut. Bahkan semua bupati sudah melakukan MoU bersama.

"Kebetulan juga dari Kemendagri mengawal ini terus, waktu itu juga saya kebetulan selaku Dirjen Keuangan Daerah tau cara menganggarkannya walaupun belum ada anggarannya itu bisa dianggarkan melalui BTT Pak, itu bisa

dialokasikan. Jadi saya minta dari Bapak-bapak Bupati, Kadishub Provinsi segera menggeser anggaran dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah terkait BTT ini dan surat dari Kemendagri sudah disiapkan untuk pergeseran anggaran ini," sambungnya.

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengaku Pemerintah Kabupaten Way Kanan sudah menyiapkan anggaran khusus guna percepatan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan.

"Terima kasih Pak Menteri, jadi kami sudah banyak membangun kantor yang baru untuk keberangkatan dan kedatangan. Kami sudah dianggarkan, kami ready anggarannya. Kami prinsipnya siap," kata Adipati.

Kemudian, Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Lanosin juga sangat berharap pengaktifan kembali Bandara Gatot Soebroto Way Kanan. Hal ini dikarenakan Kabupaten OKU Timur nantinya akan mendapatkan keuntungan dari seluruh penerbangan yang ada.

"Jadi atas yang diprakarsai tempo dulu OKU Timur siap, bahwasanya OKU Timur lah yang dapat berkah dari semua penerbangan yang ada. Saya mohon izin untuk segera dioperasikan," ucapn-

ya.

Selain itu, Pemerintah Kota Baturaja juga berharap pada Kementerian Perhubungan untuk dapat menghibahkan shuttle menuju Bandara Gatot Soebroto Way Kanan jika sudah beroperasi kembali.

Senada dengan hal tersebut, Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo mengaku siap berkomitmen dan mendukung semaksimal mungkin dikarenakan demi kebutuhan masyarakat luas juga mempromosikan wisata di daerah tersebut.

"Wisata OKU Selatan, yaitu Danau Ranau sangat indah sekali namun permasalahannya adalah terkait transportasi. Besar harapan kami dengan adanya bandara ini membuat wisata lebih bagus. Ada bendungan Tiga Dihaji, Insya Allah tahun ini bendungan akan selesai," kata Popo.

Siap Mendukung Percepatan Reaktivasi

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni memastikan reaktivasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan Lampung yang berbatasan langsung dengan tiga kabupaten Provinsi Sumatera Selatan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Untuk itu kita hadirkan seluruh Bupati yang ada di situ. Ada Bupati Way Kanan, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, OKU Selatan dan Lampung Barat dan Pemda siap mendukung ini," ucap Fatoni kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Bahkan Pemda dari sisi anggaran sudah siap mendukung. Kemudian komunikasi dengan perusahaan-perusahaan pendukung sudah siap. Bandara sudah siap hanya perlu pembenahan sebentar, sedikit lagi sudah lebih siap lagi.

Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangat penting karena bukan hanya satu daerah saja yang menerima manfaat, melainkan akan ada enam kabupaten sekaligus. Salah satu faktornya adalah lokasi Bandara Gatot Soebroto Way Kanan berada di perbatasan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

"Yang terdekat justru itu di Kabupaten OKU Timur ibu kotanya Martapura, kemudian Way Kanan, Batu Raja, Muara Dua kemudian Lampung Barat. Ini

semua mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat dan bisa dioperasikan oleh masyarakat Sumsel dan Lampung," kata Agus Fatoni.

Keberadaan Bandara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan, Lampung, selama ini hanya digunakan untuk keperluan TNI Angkatan Darat menjadi kemewahan yang hanya dilihat dari jauh. Dengan dibukanya penerbangan sipil di Bandara Gatot Soebroto dengan lan-

namun masih belum terlalu banyak. Sehingga Menhub memastikan akan ada penambahan rute penerbangan baru untuk destinasi tersebut.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni mengusulkan pembukaan rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali, Palembang-Batam, Palembang-Singapura dan Palembang-Batam. Hal ini dikarenakan permintaan yang cukup



das pacu seluas 2.100 meter x 40 meter, masyarakat dapat menikmati kemewahan konektivitas udara.

Setujui Rute Penerbangan Palembang-Bali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni untuk membuka rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali.

Saat ini, sudah terdapat rute penerbangan langsung Palembang-Batam

tinggi, terutama saat perayaan Hari Raya Imlek.

"Kami ingin mengajukan penambahan rute penerbangan, pertama ke Bali, Batam, Singapura dan Malaysia. Data kami dengan manajer bandara itu kemarin cukup tinggi permintaan ke sana cukup banyak," ucap Fatoni.

Menurutnya, momen Hari Raya Imlek menjadi momentum untuk menambah pendapat daerah. Ini dikarenakan, melalui penerbangan langsung rute tersebut Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II akan ramai oleh wisatawan. ●

TERIMA PENGHARGAAN MENKUMHAM RI, AGUS FATONI BERHASIL TEGAKKAN HAM PADA TINGKAT KORPORASI



Sebagai kepala daerah hal yang paling penting adalah bagaimana memahami permasalahan dan kondisi dihadapi sehingga bisa diselesaikan tanpa meninggalkan konflik. Kemampuan ini cukup dikuasai Agus Fatoni sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Selatan.

Atas kinerjanya itu juga Agus Fatoni meraih penghargaan Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Menteri Hukum dan HAM (Kumham) Republik Indonesia (RI). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Auditorium Bina Praja Pemprov Sumsel, Palembang, Sumatera Selatan.

Piagam tersebut diberikan atas upaya pemerintah daerah (Pemda) dalam penegakan HAM di korporasi. Tercatat pada tahun 2023 ada 12 kabupaten/kota di Sumsel yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM.

"Di Sumsel ada 12 Kabupaten/kota yang mendapatkan penghargaan Peduli HAM, atas upaya Pemda dalam penegakan HAM di Korporasi," ungkap Agus Fatoni.

Dijelaskan Fatoni, Kabupaten/kota tersebut adalah Pagar Alam, Palembang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Muara Enim, Lahat, Pali, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Timur dan OKU Selatan.

"Sesuai ketentuan Kemenkumham karena 50 persen telah mendapatkan penghargaan peduli HAM, maka provinsi diberikan penghargaan karena telah melakukan pembinaan," ucapnya.

Fatoni menyebut saat ini isu HAM

masih menjadi sorotan baik dari Non Governmental Organization (NGO) dan negara-negara maju. Dimana isu HAM bukan hanya menjadi perhatian dari pihak pemerintah melainkan pihak korporasi.

"Isu HAM ini juga menjadi perhatian pihak korporasi, bersama dengan pemerintah. Mengingat isu ini masih menjadi sorotan NGO dan negara-ne-

mum propinsi/upah minimum kabupaten/kota serta perbudakan, masih menjadi isu sentral hingga saat ini," ungkapnya.

Melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM, isu miring HAM di sektor bisnis diharapkan dapat diminimalisir. Untuk mencapai hal tersebut perlu sinergitas antara pelaku usaha dengan pemerintah.



gara maju," jelasnya.

Untuk itu, guna memberikan pemenuhan HAM terhadap pelaku usaha/bisnis maka dibentuk Gugus Tugas Bisnis dan HAM Provinsi Sumsel yang dikukuhkan hari ini.

Hal ini dikarenakan kewajiban dalam memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM tak hanya menjadi milik negara melainkan juga tanggung jawab korporasi di bidang bisnis.

"Berbagai isu HAM di bidang bisnis, seperti penggunaan tenaga kerja anak (di bawah umur), hak-hak tenaga kerja wanita, gaji yang di bawah upah mini-

Fatoni menyebut permasalahan HAM merupakan permasalahan global yang muncul di setiap negara, tidak terkecuali bagi negara-negara berkembang. Sehingga semua pihak telah bersepakat untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan menegakkan HAM.

"Kami menyambut baik Kementerian Hukum dan HAM yang ditunjuk sebagai focal point Nasional Bisnis dan HAM dan diharapkan dapat memberikan dukungan moral bagi semua pihak dalam menciptakan bisnis yang berbasis HAM di negara yang kita cintai ini,"

ujar Fatoni.

Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM yang dikukuhkan pada hari ini akan bekerja secara maksimal untuk dapat memastikan para pelaku usaha telah memenuhi, melindungi dan menegakkan HAM di lingkungan Provinsi Sumsel.

Fatoni berharap melalui tim tersebut dapat menjaga silaturahmi dan koordinasi antar lembaga instansi pemerintah, menjaga rasa persatuan dan kesatuan dengan kesadaran dan semangat kebersamaan untuk terwujudnya bisnis yang sehat, akomodatif, responsif, dan kooperatif baik antar sesama pelaku usaha maupun dalam penggunaan tenaga kerja serta tidak adanya diskriminatif sehingga tercipta hubungan industrial yang lebih baik.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini. Harapan kami semoga momen pengukuhan Tim Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Sumsel ini dapat memperbaiki citra bisnis yang lebih baik dan membantu memberikan kontribusi serta terus bersinergi dengan Pemprov Sumsel," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ilham Djaya menyebut pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM bertujuan untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan Bisnis dan HAM di tingkat daerah, serta melaporkan aksi Bisnis dan HAM kepada Gugus Tugas Bisnis dan HAM di tingkat nasional.

"Tercatat pada tahun 2023 lalu terdapat 12 kabupaten/kota di Provinsi Sumsel meraih penghargaan Peduli HAM," terangnya.

Gugus Tugas Bisnis dan HAM di daerah diketuai Gubernur dan keanggotaan oleh unsur instansi daerah dengan masa keanggotaan 3 tahun. Dimana tugasnya yaitu mengkoordinasikan dan menyelaraskan bisnis dan HAM.

Kemudian melakukan pemantauan strategi nasional (stranas) Bisnis HAM di tingkat daerah, dan melaporkan aksi Bisnis HAM ke tingkat nasional.

"Mudah-mudahan dengan dukungan Pj Gubernur, semua kabupaten/kota di Sumsel bisa mendapatkan penghargaan Peduli HAM," katanya. ●

MASYARAKAT SUMSEL BISA MENIKMATI PROGRAM MUDIK GRATIS SERENTAK

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) meluncurkan program Gerakan Mudik Gratis Serentak se-Sumsel (GMGSS).

Program ini merupakan upaya konkret dalam mengakomodir keinginan masyarakat yang hendak mudik lebaran di kampung halaman pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah mendatang.

"Kami ingin menginformasikan kepada rekan-rekan media bahwa Pak Gubernur telah meluncurkan program mudik gratis, yang mana mudik gratis ini diperuntukan untuk masyarakat Sumsel," ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumsel Ari Narsa di kantor Gubernur Sumsel Palembang, Sumatera Selatan.

Pemprov Sumsel menyiapkan dua jenis moda transportasi melalui jalur darat, yaitu menggunakan bus dan kereta api.

"Untuk keseluruhan ada 18 bus dengan total penumpang kurang lebih 700 orang, begitu juga dengan kereta api terdapat dua rute masing-masing satu rangkaian,"ujarnya.

Rute dalam Provinsi yang tersedia dimulai dari Palembang, Muara Enim - Lahat - Tebing Tinggi - Kota Padang - Lubuk Linggau dengan jumlah penumpang 529.

Sedangkan untuk luar Provinsi, di antaranya Palembang - Prabumulih - Baturaja - Martapura - Tanjung Karang (Lampung) dengan jumlah penumpang 520 orang.

Pendaftaran mudik gratis telah dibuka secara online pada tanggal 20 Maret 2024. Terkait jadwal keberangkatan akan dilakukan pada tanggal 6 dan 9 April 2024 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Mudik gratis ini akan dilepas langsung oleh Bapak Pj Gubernur pada 6 April nanti. Kami juga telah merencanakan sekitar tanggal 20 Maret pendaftaran mudik gratis akan dibuka secara online. Kita juga bekerja sama dengan pihak Jasa Raharja untuk penumpang darat diberikan asuransi selama 7 hari," ucap Ari.

Adapun syarat tambahan bagi masyarakat yang hendak menjadi peserta mudik gratis, harus menunjukkan bukti telah membayar pajak kendaraan dengan menunjukkan STNK asli secara fisik atas nama yang bersangkutan.

"Kita utamakan penduduk yang berdomisili di Sumsel baik itu Kota maupun Kabupaten. Adapun bukti lunas pajak kendaraan ini kita lakukan untuk membuat masyarakat taat membayar pajak," tandasnya.

Buka Rute Penerbangan Palembang-Bali

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyetujui usulan dari Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni untuk membuka rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali.

Agus Fatoni mengusulkan pembukaan rute penerbangan baru, yaitu Palembang-Bali, Palembang-Batam, Palembang-Singapura dan Palembang-Palembang-Batam.

Hal ini dikarenakan permintaan yang cukup tinggi, terutama saat perayaan Hari Raya Imlek.

"Kami ingin mengajukan penambahan rute penerbangan, pertama ke Bali, Batam, Singapura dan Malaysia. Data kami dengan manajer bandara itu kemarin cukup tinggi permintaan ke sana cukup banyak," ucap Fatoni.

Menurutnya, momen Hari Raya Imlek dan Idul Fitri menjadi momentum untuk menambah pendapat daerah. Ini dikarenakan, melalui penerbangan langsung rute tersebut Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II akan ramai oleh wisatawan.

Selain itu, melalui kesempatan ini Fatoni juga mengharapkan aktivasi Bandara Gatot Subroto Way Kanan secepatnya. Menurutnya, kehadiran Bandara Gatot Subroto Way Kanan sangatlah penting. Ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang besar dan berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar.

"Kami sampaikan kebutuhannya sangat besar juga potensinya sangat besar dan bandara juga sudah siap. Oleh karena itu, kita sampaikan semua, kita hadirkan seluruh Bupati yang ada di situ, ada Kabupaten Way Kanan, Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, OKU, OKU Selatan dan Lampung

siap mendukung ini," jelas Fatoni. ●



RUTE ANGKUTAN BUS GERAKAN MUDIK GRATIS SERENTAK SE-SUMSEL

1. Palembang - Lahat - Pagar Alam - Pendopo,
2. Palembang - Lahat - Tebing Tinggi,
3. Palembang - Musi Banyuasin - Lubuklinggau - Musi Rawas Utara,
4. Palembang - Kayu Agung - Belitang - Muara Dua,
5. Palembang - Muara Enim - Baturaja - Martapura - Muaradua.

SEDANGKAN UNTUK RUTE LUAR PROVINSI MELIPUTI:

1. Palembang - Padang Sidempuan (Medan),
2. Palembang - Kota Medan,
3. Palembang Bukit Tinggi (Padang),
4. Palembang - Solok - Lubuk basung (Padang),
5. Palembang - Solo (Terminal Tipe A Tirtonadi),
6. Palembang - Surabaya (Terminal Tipe A Purbaya).

DINKOMINFO MUBA RAIH PRESTASI TERBAIK NASIONAL BIDANG AUDIO VISUAL

Berbagai terobosan yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) membuahkan hasil manis. Keras dan komitmen yang dibangun dalam memberikan pelayanan informasi dan komunikasi menorehkan prestasi yang membanggakan di tingkat nasional dalam ajang Anugerah Media Center (AMC) 2024.

Dalam ajang tersebut, Dinkominfo Muba meraih juara terbaik tiga tingkat nasional kategori Kontribusi Konten Audio Visual. Penganugerahan ini berlangsung di Trans Convention Centre, Bandung Jawa Barat.

Anugerah AMC 2024 ini diadakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bentuk apresiasi Kominfo News-room kepada media center di berbagai daerah yang telah berkontribusi dalam pengelolaan media, produksi konten, diseminasi, dan kolaborasi bersama Kominfo pusat dan Kominfo seluruh daerah.

Ada 11 kategori dalam penilaian AMC 2024 dan Dinkominfo Muba mendapatkan peringkat III dalam kategori kabupaten/kota (Indonesia Barat) terbaik untuk kontribusi konten audio visual.

Penyerahan piagam penghargaan langsung dilakukan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Wamen Kominfo, Nezar Patria menyampaikan sebagai humas pemerintah, Kominfo harus memanfaatkan teknologi digital sebagai upaya memaksimalkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

"Saya mengapresiasi Anugerah Media Center 2024 dan mengucapkan selamat kepada penerima anugerah tahun ini. Ini bisa memotivasi kita untuk terus bekerja keras memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang

dari kabupaten/kota seluruh Indonesia khususnya Indonesia bagian barat.

"Kita menjadi salah satu yang terbaik Indonesia Bagian Barat walau saat ini masih di posisi terbaik tiga. Ini merupakan motivasi bagi kita dengan seluruh tim bidang informasi dan komunikasi untuk menjadi penyemangat kerja dan kita berharap kedepannya menjadi juara satu," harapnya.

Meski begitu Dinkominfo Muba tetap semangat dan bangga karena peringkat



faktual dan berimbang," ungkapnya.

Nezar Patria melihat masih ada beberapa konten yang sedikit ketinggalan zaman. Namun hal ini bisa diubah

sesuai perkembangan zaman. Apalagi di era digital banyak tools yang bisa digunakan di platform media sosial yang bisa memberikan informasi yang positif.

Sementara itu Kepala Dinkominfo Muba Herryandi Sinulingga AP mengatakan, prestasi AMC tahun 2024 kategori "Kontribusi Konten Audio Visual" ini dapat menyisihkan ratusan peserta

1 dan 2 diraih kota di Pulau Jawa.

Lingga mengatakan bahwa Ini adalah prestasi kerja tim bersama seluruh masyarakat Muba. Ini akan menjadi motivasi bagi seluruh tim jajaran Dinkominfo Muba untuk terus meningkatkan kinerja bidang konten audio visual termasuk bidang Kominfo lainnya.

"Prestasi ini berkat dukungan, komitmen pimpinan pak Pj Bupati Apriadi, Pj Sekda Musni Wijaya, para Asisten dan seluruh kepala perangkat daerah di Kabupaten Muba. Melalui program program kerja masing masing yang kita jadikan pemberitaan lewat konten audio visual sehingga saat ini memperoleh juara ketiga tingkat nasional," ucapnya. ●



KEMBANGKAN GREEN HOUSE KUATKAN KETAHANAN PANGAN

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa saat ini untuk memenuhi kebutuhan sayuran dan buah-buahan, Kaltim masih mengandalkan pasokan dari Jawa dan Sulawesi.

Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan Pemerintah Provinsi Kaltim. Melalui pembangunan green house, Pemprov Kaltim mencoba memanfaatkan lahan sempit menjadi lahan per-

gi budidaya tanaman yang modern. Dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan untuk budidaya tanaman yang memiliki struktur atap dan dinding yang bersifat tembus cahaya. Yang berfungsi memanipulasi lingkungan agar tanaman di dalamnya dapat berkembang.

"Kami meminta instansi vertikal untuk membuat percontohan ini. Karena Kaltim belum berdaulat pangan. Masih mendatangkan bahan pangan dari luar pulau, salah satunya adalah Sulawesi. Kami coba sayur dulu. Kemudian kita coba cabai. Lalu komoditas-komoditas yang selama ini menyumbangkan inflasi di Kaltim," kata Akmal saat berkunjung ke Greenhouse UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Rabu, 6 Maret 2024.

Selain di UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Pemprov Kaltim juga membangun green house di Sekolah Khusus Olahragawan Internasional (SKOI) Kaltim di Samarinda. SKOI ini di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim.

"Dan Alhamdulillah di SKOI sudah sukses. Setiap hari panen, kangkung dan sayuran lainnya. Tinggal buah yang belum," ujarnya.

Pada kunjungannya tersebut, Akmal Malik meninjau langsung sayuran dan buah-buahan yang ditanam green house tersebut. Dia sekaligus memanen sayuran kangkung dan bayam, yang sudah ditanam menggunakan metode hidroponik selama 15 hari tanam. Sejak pekan ketiga Februari hingga pekan pertama Maret 2024. Hasil panen kangkung dan bayam dari green house itu, menurut Akmal Malik cukup bagus.

"Karena ini berhasil dan bagus, kami minta betul Asrama Haji menjadi percontohan. Dan akan ditambah tiga lagi. Semoga bisa di anggaran 2024," terang dia.

Selain itu, Akmal Malik juga meminta green house tersebut bisa menjadi destinasi untuk pendidikan. Sehingga menjadi percontohan bagaimana instansi pemerintah mampu untuk mena-



tanian untuk menghasilkan berbagai macam hasil pangan.

Salah satu green house yang coba dikembangkan Pemprov Kaltim berada di Halaman Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Embarkasi Balikpapan, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur.

Ada tiga green house yang dikembangkan di halaman bangunan instansi vertikal di bawah Kementerian Agama ini. Green house merupakan salah satu bagian dari teknolo-



nam sayuran dan buah-buahan. Caranya dengan memanfaatkan pekarangan maupun halaman yang tidak begitu luas, untuk bercocok tanam.

Tak hanya itu, dia akan memperluas jenis tanaman yang akan dikembangkan di green house dengan menanam cabai. "Dan ini percontohan saja dulu," ucapnya.

Anggaran yang dialokasikan Pemprov Kaltim untuk membangun tiga green house di halaman UPT Asrama Haji Embarkasi Balikpapan mencapai Rp380 juta. Salah satu yang akan dikembangkan adalah budidaya buah anggur. Dengan satu kali tanam dapat dipanen selama 20 tahun.

"Begitu juga melon, menguntungkan. Cuma kita belum coba, mudahan percontohan ini bisa diikuti yang lain," pesan Akmal Malik.

Rizkiansyah, Direktur Royal Rizky Farm selaku pihak ketiga yang ditunjuk membangun green house ini menerangkan, pihaknya memulai pengerjaan sejak awal Januari 2024. Kemudian pada Februari, dilakukan instalasi pembibitan budidaya sayuran dan buah-buahan jenis anggur dan melon.

Untuk sayuran, kata dia, menggunakan sistem rakit apung (floating raft). Sistem hidroponik ini menggunakan teknik penggenangan air dan nutrisi di daerah perakitan tanaman secara terus-menerus.

"Kalau melon kita gunakan sistem NFT (Nutrient Film Technique atau teknik meletakkan akar tanaman pada lapisan air yang dangkal). Karena kalau di hidroponik itu ada beberapa macam sistem. Ada NFT, ada DFT (Deep Flow Technique), ada sistem rakit apung, dan fertigasi sistem tetes," ujar dia.

Rizki menambahkan, khusus buah anggur yang dikembangkan menggunakan sistem hidroponik, masa panennya memang sedikit lama. Karena proses tanam hingga panen hingga 10 bulan.

"Jadi akhir November atau awal Desember sudah bisa kita panen buat anggur. Buat melon pada waktu masuk musim haji sudah bisa kita panen," imbuh dia.

Dia menerangkan, ada 3.600 lubang tanam yang dipersiapkan untuk tanaman sayuran pada green house tersebut. Lubang-lubang tersebut dapat digunakan untuk menanam kangkung,

bayam, selada, dan pakcoy.

"Di situ terdata, dari tanggal 20 Februari kita tanam, dan 6 Maret sudah bisa panen. Artinya selama 15 hari kangkung dan bayam sudah bisa panen. Kalau pakcoy, mungkin 10 hari setelah ini sudah bisa panen. Dan empat hari kemudian selada sudah bisa panen," ungkap Rizki.

Dia menjelaskan, satu green house memiliki luas 128 meter persegi. Dengan demikian, tiga green house memiliki luas keseluruhan 384 meter persegi. Adapun pembangunannya menggunakan APBD Kaltim 2024 untuk keseluruhan pembangunan green house beserta media tanam, pendampingan, dan perawatan bibit.

"Kami hanya melakukan pembangunan dan mendampingi merawat sampai sukses panen. Dengan mentransfer ilmu

kan bentuk kontribusi nyata TNI dan pemerintah daerah dalam upaya keadilan ketahanan pangan nasional dan pemenuhan beras lokal di pasaran.

"Kami mengucapkan terima kasih ke jajaran Kodam VI/Mulawarman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merespons cepat tantangan kita, yaitu tingginya harga beras. Mudah-mudahan produksi ini bisa sedikit menekan harga beras dan membantu masyarakat, khususnya menjelang bulan puasa," paparnya.

Akmal berharap, ke depan tidak ada lagi kendala yang menghambat produksi padi di daerah ini, seperti kekurangan air atau kerusakan irigasi. Pemprov Kaltim terus membangun kolaborasi dan bersinergi bersama Kodam VI/Mula-



baru perlahan dilepas ke UPT Asrama Haji. Untuk penambahan lagi pelaksana nunggu instruksi dari Pemprov Kaltim," tegasnya.

Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik melakukan panen raya padi bersama Kodam VI/Mulawarman di Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu, 2 Maret 2024. Panen raya tersebut adalah upaya untuk memenuhi ketahanan pangan nasional di tengah melambungnya harga beras saat ini.

"Panen raya padi ini melibatkan empat kelompok tani yang menggarap lahan seluas 200 hektar dengan estimasi produksi mencapai 1.000 ton," kata Akmal Malik.

la mengatakan, kegiatan ini merupa-

warman dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Kuncinya ialah fokus dan bersama-sama mengatasi masalah ini," imbuh Akmal Malik.

Sementara, perwakilan Kodam VI/Mulawarman, Kasrem 091/Asn Kolonel Inf Priyanto Eko Widodo mengatakan, panen raya ini merupakan salah satu tugas pokok TNI dalam membantu mensejahterakan masyarakat.

"Ini merupakan komitmen kami bekerja sama dengan Kementerian Pertanian," ucapnya.

Pihaknya turut membantu pemerintah daerah setempat untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya, khususnya di Kutai Kartanegara. ●

DATA AKURAT DAN PRESISI JAGA IKLIM INVESTASI KALTIM

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tengah menyiapkan data akurat dan presisi terkait ekonomi sosial dan demografi dalam rangka memperkuat iklim investasi dan bisnis di daerah.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, mengakui, tidak jarang pengusaha tertipu akibat penyajian data pemerintah yang tidak akurat. Oleh sebab itu, pemerintah dituntut menyiapkan data yang presisi agar investasi bisa terus

di kegiatan Forum Bisnis Bankaltimtara 2024 di Ballroom Floor 2 Ritz-Carlton Hotel, Kamis, 7 Maret 2024.

Akmal meyakini semua kebijakan yang baik harus didasarkan pada data yang akurat dan presisi. Demikian pula dengan bisnis dan investasi.



mengalir deras dan ekonomi daerah terus bertumbuh.

"Kebanyakan bisnis kena 'prank' ketika hanya disajikan data yang bagus-bagus. Data yang hebat-hebat saja. Sejatinya data harus berbasis detil. Bisnis perlu data yang detil dan presisi," kata Akmal Malik saat memberikan arahan

Akmal mengatakan, 841 desa dan 130 kelurahan di Kaltim harus dipetakan dengan baik agar kebijakan bisa dibuat lebih tepat arah dan sasaran. Ini pun akan lebih memudahkan para calon investor menghitung rencana bisnis mereka.

Akmal menegaskan ke depan

pemerintah akan menyiapkan data yang akurat untuk para pebisnis. "Ini yang akan kami bangun. Kami akan menghadirkan tata kelola pemerintahan berbasis data digital," ungkapnya.

Data-data itu, kata Akmal Malik, nantinya akan dipegang kepala daerah hingga para kepala desa.

"Pengusaha bisa tanyakan langsung ke mereka. Kami akan menyajikan kejujuran dalam berbisnis. Bagi saya kunci bisnis itu adalah 'trust'. Kaltim siap menyambut para pebisnis. Kami akan siapkan kejujuran data di dalamnya. Keputusan di tangan anda karena anda yang punya anggaran," tegas Akmal.

Akmal yakin dengan kejujuran, ekonomi dan investasi Kaltim ke depan akan lebih baik.

Dia juga mengungkapkan, kerja sama telah dilakukan dengan Bankaltimtara dan IPB untuk membuat data akurat di Kaltim. Tujuannya agar investasi dan ekonomi Kaltim ke depan lebih maju dan terukur.

Untuk tahap awal pemetaan sudah dilakukan di 40 desa di Penajam Paser Utara (PPU). Indikatornya meliputi ekonomi, demografi, sosial dan lain-lain. Total terdapat 238 indikator dalam pemetaan tersebut.

"Saya harap kerja sama Pemprov Kaltim, Bankaltimtara, dan IPB Bogor untuk memetakan data akurat atas potensi di Kaltim diharapkan dapat menarik investasi sehingga lebih tepat sasaran," tegasnya.

Akmal menambahkan, kunci semua bisnis itu market dan resources, harus baca pasar dengan baik. "Ini karena di Forum Bisnis. Bagi saya para pebisnis ketika tidak punya angka jelas, tidak bisa forecasting. Ketika bisnis tidak punya data kuat dalam Big Data, maka

tidak bertahan lama," kata Akmal.

Deputi Komisioner Internasional APU/PPT dan Daerah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bambang Mukti Riyadi, mengatakan, kendati masih menghadapi ketidakpastian akibat konflik geopolitik dan lainnya, perekonomian global masih bertumbuh positif pada tahun 2023.

Demikian juga dengan perekonomian nasional tahun 2023 masih tumbuh 5,05 persen. Kendati perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian, tetapi ekonomi domestik masih tumbuh positif.

Industri keuangan, katanya, juga masih tumbuh positif seperti kredit tumbuh 11,3 persen pada tahun 2023. Bahkan, kredit di Kaltim tumbuh lebih tinggi dari rerata nasional, yaitu 12 persen dan di Kaltara naik signifikan hingga mencapai 23 persen.

"Proyek infrastruktur tidak seperti sprint 100 meter, tapi maraton. Menjaga stamina dan nafas agar bagaimana bisa bertahan dalam jangka panjang," katanya.

Selain itu, Bambang memberikan pesan kepada Bankaltimara untuk memperkuat kapasitas SDM dan organisasi. "OJK dukung (Bankaltimara). Kami dari policy dukung BPD agar bisa makin berperan, terus tumbuh. Proyek jangka panjang agar di-manage dengan baik. Saya percaya visi dan misi Bankaltimara bisa memainkan fungsi dan pelopor pembangunan di Kaltim dan Kaltara," urainya.

Sebagai informasi, Kalimantan Timur berhasil mencatatkan realisasi investasi yang mengesankan pada 2023. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kaltim, realisasi investasi di Benua Etam mencapai Rp71,89 triliun, atau 111,47 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp64,5 triliun.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp16,01 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar USD414,08 juta atau sekitar Rp6,12 triliun.

Kepala DPMPSTSP Kaltim, Puguh Harjanto, menyatakan sektor-sektor yang

mendominasi investasi di Kaltim antara lain industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi; tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan; industri makanan; transportasi, gudang, dan komunikasi; serta industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya.

"Negara-negara asal investasi PMA terbesar adalah Hongkong, Singapura dan Tiongkok," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 20 Februari 2024.

Berdasarkan angka realisasi investasi yang telah dijelaskan di atas, dapat dikumulatikan dari Oktober-Desember 2023, realisasi PMDN dan PMA di Kalimantan Timur mencapai angka Rp22,14 triliun. Angka itu terdiri atas PMDN sebe-



sar Rp16,01 triliun dan PMA sebesar Rp6,12 Triliun. Jika dikomparasikan dengan target realisasi investasi pada 2023 mencapai angka 34,34 persen.

Dia menuturkan, total proyek yang tercatat sebanyak 3.175 dan total tenaga kerja yang terserap sebanyak 9.850 orang, terdiri dari tenaga kerja Indonesia sebanyak 9.552 orang dan tenaga kerja asing sebanyak 298 orang.

Utamakan Produk Lokal

Sekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menginstruksikan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Kaltim agar menyosialisasikan hasil dari Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Bali.

"Ini tugas Biro PBJ untuk menjelaskan kepada seluruh perangkat daerah agar mengutamakan belanja produk dalam negeri," kata Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis, 7 Maret 2024.

Sri Wahyuni mengatakan Pemprov

Kaltim menyambut baik perhelatan Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2024 di Bali agar setiap instansi pemerintahan, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dapat melakukan pengadaan barang dan jasa secara efisien dan bermanfaat.

Menurut Sri Wahyuni, Biro PJB telah mengikuti pembukaan Business Matching 2024 Belanja Produk Dalam Negeri di Bali, sehingga pengetahuan yang didapatkan harus disebarluaskan kepada instansi lain di pemerintahan daerah.

"Kita harap Biro PBJ menyosialisasikan kepada seluruh kuasa pemegang anggaran di masing-masing

instansi hasil dari Business Matching selama empat hari di Bali itu, terutama bagaimana melakukan pengadaan barang produk dalam negeri sendiri," katanya.

Setiap OPD, lanjutnya, harus memperhatikan tata aturan dan prosedur serta hal-hal penting dalam pengadaan barang dan jasa. "Pengadaan barang itu tetap bagaimana berdaya guna, berkualitas dan tahan lama," tegasnya.

Pada kegiatan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menjelaskan pemerintah percaya optimalisasi belanja produk dalam negeri akan memberikan dampak ganda dan nilai tambah yang berlipat-lipat untuk sektor industri.

"Sehingga akan mengakselerasi program pendalaman, penyebaran dan pemerataan sektor industri," jelasnya di acara yang dibuka Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mewakili Presiden Joko Widodo itu. •



RASYID RAJASA SIAP TANTANG RATU DEWA DAN FITRIANTI AGUSTINDA DI PILWAKO PALEMBANG

Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Palembang kini semakin ramai dengan sosok-sosok ternama, kandidat Calon Wali Kota (Cawako) mulai tebar pesona, tidak hanya mengandalkan popularitas tapi juga elektabilitas.

Nama Rasyid Rajasa sedang dipersiapkan oleh DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel sebagai calon potensial untuk posisi Wali Kota Palembang sebagai penantang Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda (Finda).

Diketahui DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Sumsel telah mengonfirmasi bahwa mereka telah menyiapkan Rasyid Rajasa putra Hatta Rajasa untuk maju dalam Pilwako Palembang November 2024.

Tidak hanya itu, DPW PAN Sumsel juga menyiapkan beberapa kader untuk bersaing dalam Pilkada di Provinsi Sumsel pada November 2024 mendatang.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW PAN Sumsel, Abdul Aziz Kamis menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan kader-kader yang sangat siap untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah.

Beberapa kader yang siap diusung oleh PAN termasuk Fery Antoni, mantan Wakil Bupati OKU Timur yang akan maju dalam Pilkada Muara Enim, serta Yudhi Purna Nurgraha untuk OKU, dan kandidat lainnya untuk kabupaten-kabupaten lain.

"Salah satu fokus utama PAN adalah mantan Bupati Empat Lawang periode 2019-2024, Joncik Muhammad, serta mantan Bupati OKI dua periode, Iskandar, yang akan di-

sung sebagai calon Gubernur Sumsel," kata Abdul Aziz.

Abdul Aziz juga menyebutkan bahwa PAN akan segera melakukan survei dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan berharap hasilnya akan menunjukkan kinerja positif dari kader-kader mereka.

Joncik Muhammad menambahkan bahwa PAN telah menyiapkan sejumlah kader untuk berkompetisi dalam pilkada serentak, seperti Fery Antoni untuk kabupaten Muara Enim dan Rasyid Rajasa, putra Hatta Rajasa, sebagai calon Wali Kota Palembang.

Dengan peningkatan perolehan kursi di beberapa kabupaten seperti OKU, PALI, dan Empat Lawang, PAN optimis akan menghadirkan persaingan yang ketat dalam pilkada serentak ini.

Joncik Muhammad juga menegaskan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Gubernur yang akan diadakan pada bulan November mendatang, jika diminta oleh partai.

"Jika partai meminta, pasti kami siap. Dengan semangat dan kesiapan kader-kader yang dimiliki, PAN Sumsel berharap dapat

meraih hasil yang memuaskan dalam pemilihan kepala daerah serentak mendatang," katanya.

Fery Antoni sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Muara Enim. Dalam pernyataannya, Fery Antoni menegaskan bahwa jika partai menginginkannya untuk terlibat dalam kontestasi politik di Muara Enim, ia akan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Dengan menegaskan komitmennya terhadap partai, Fery Antoni menyatakan bahwa tugas dari partai adalah prioritasnya. Oleh karena itu, ia siap untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh partai untuk maju dalam Pilkada Muara Enim.

Kesiapan Fery Antoni ini menunjukkan tekadnya untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perubahan positif bagi Kabupaten Muara Enim. Dengan dukungan dari partai dan masyarakat, Fery Antoni berharap dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan daerah tersebut.

"Kita siap untuk maju dalam Pilkada Muara Enim, apalagi jika ada perintah dari Partai. Muara Enim bagi saya bukan hal yang asing. Sejak SD hingga SMA, saya sudah banyak mengenal tokoh-tokoh di sana," pungkas Fery.

Artinya, Ratu Dewa dan Finda akan menambah daftar panjang penantang di Pilwako Palembang. Padahal berdasarkan hasil pemetaan (mapping) politik di Kota Palembang ada beberapa sosok kuat untuk Pilwako.

Koordinator Public Trust Institute (PUTIN) Wilayah Sumsel Publik Lembaga Survei dan Kajian Politik Kebijakan Fatkurohman menjelaskan kandidat itu adalah Ratu Dewa yang saat ini menjabat Pj Walikota Palembang



dan mantan Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda dan disusul oleh Ketua DPC Gerindra Palembang Prima Salam pada posisi tiga.

"Jelang akhir masa kampanye pileg lalu, Ratu Dewa berada diangka rentang elektabilitas 35 - 47 persen. Kemudian Finda diangka diatas 15 persen," kata dia.

Dilanjutkannya sebagai kuda hitam data atau yang menempati posisi 3 ada Ketua DPC Gerindra Palembang Prima Salam diangka 5 persen dan posisi 4 Basyaruddin Ahmad (Birokrat Pemprov Sumsel), selisih tipis dengan Akbar Alfaro.

"Prima Salam peraih suara terbanyak pemilu 2019 dan 2024 dapil Sumsel 1 DPRD Provinsi, sangat memungkinkan muncul sebagai kandidat Pilwako, apalagi sebagai ketua parpol besar di Palembang,"ucap pria yang akrab disapa Bung FK ini

Kemudian, dibawah 4 besar, ada sejumlah nama bertengger yang bisa saja menggeser elektabilitas diatasnya seperti Basyaruddin ataupun Prima Salam jika terus bergerak ke masyarakat.

"Sejumlah nama tersebut adalah Akbar Alfaro, Yudha Mahyudin, H Nasrun Umar, Syaiful Fadli dan Charma,"ujarnya.

Dalam mapping juga digambarkan meningkatnya elektabilitas Ratu Dewa, selain kapasitasnya sebagai Pj Wali Kota Palembang, masyarakat juga melihat sosok Ratu Dewa sebagai tokoh yang melekat sederhana, dekat dan perhatian pada rakyat.

"Jika nanti benar-benar maju Pilwako dan mundur jadi Pj Wali Kota Palembang bakal menjadi pesaing terberat Fitrianti Agustinda. Begitu juga dengan Finda jika ingin bersaing mulai menimang pasangan yang tepat,"terang Alumni FISIP Un-sri ini.

Secara elektoral untuk bisa bersaing menuju pilkada dikatakan-nya, tokoh tersebut harus bisa

masuk di top 4. Untuk itu, para calon kandidat harus sudah mulai untuk mendekatkan diri pada pemilih dan sosialisasi untuk mendongkrak popularitas.

"Praktis baru Ratu Dewa dan Fitrianti Agustinda yang popularitasnya sudah diatas 60 persen,"jelasnya.

Rasyid Rajasa dan Prima Salam tampaknya akan menjadi bayang-bayang bagi elektabilitas dan popularitas Ratu Dewa dan Finda. Mengingat, Prima Salam dan Rasyid Rajasa berasal dari dua partai berkoalisi dalam Pil-pres 2024 yang sukses menghantarkan Prabowo-Gibran dengan perolehan suara terbanyak di Sumsel.

Prima Salam menyatakan, siap maju menjadi Cawako Palembang apabila benar-benar dicalonkan oleh partainya.

Hal itu tentunya terlebih lagi apabila sudah resmi mendapatkan instruksi dari Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra

kebetulan Prabowo Subianto memiliki keinginan kepala daerah Palembang (Wako) harus dari kader Gerindra begitu juga kepala daerah Sumsel (Cawagub).

"Masalah mencalonkan jadi Wali Kota Palembang kalau sudah takdirnya nanti saya siap, saya percaya takdir jadi jalan-kan saja. Pak Prabowo juga menginginkannya pemimpin Palembang harus kader Gerindra Sumsel juga harus kader Gerindra,"kata dia dikutip dari channel YouTube @InfoIndonesiaTV.

Dia menyebut tujuan pribadinya apabila menjadi Wali Kota Palembang hanya ingin mendapatkan tiket ke surga dengan cara bisa memiliki alat menghisap dosa dengan cepat.

"Kalau saya jadi Wali Kota Palembang ingin masuk surga, contohnya kita salat saja kadang lewat. Saya pernah bertanya kepada ustadz bagaimana cara masuk surga? Kata ustadz jadilah kepala daerah yang amanah itulah alatnya,"diceritakannya.

Prima Salam berkata untuk mengam- bil hati warga Palembang tidak harus melakukan pencitraan di media sosial atau medsos seperti di Instagram dan aplikasi lainnya.

"Mau menang itu ada kekuatan partai ulama dan sebagainya. Palembang ini paku buminya kuat, bukan rakyat Palembang memilih kepala daerahnya tapi Palembang itu sendiri. Di Palembang ini banyak habaib (habib) merekalah yang akan memilihnya,"ceplusnya

Dia berniat apabila benar-benar ditakdirkan menjadi Wali Kota Palembang menang di Pilkada 2024 ada salah satu visi dan misi yang akan diwujudkan-nya.

Visi dan misi itu adalah mau menjadikan kota empek-empek ini, benar-benar mewujudkan dirinya sebagai kota Palembang Darussalam.

"Kekurangan di Palembang banyak sekali seperti banjir, BUMD dan edukasi rakyatnya karena sampai sekarang Palembang belum jadi Palembang Darussalam. Konsep Palembang Darussalam itu adalah kota Palembang agamis penuh tenggang rasa, rakyat makmur tidak sedikit-sedikit fitnah dan bergunjing, itu belum terwujud. Kalau saya jadi kepala daerah nantinya pun cukup gaji saja tidak mau main proyek-proyek,"pungkasnya. •IRY



KOMITMEN GUNAKAN PRODUK LOKAL, PJ BUPATI OKI DIGANJAR PENGHARGAAN

Mengedepankan produk lokal sekaligus mengangkat ekonomi UMKM telah menjadi komitmen Pj Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya. Sehingga selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan berhasil meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Mengedepankan produk lokal sekaligus mengangkat ekonomi dari UMKM telah menjadi komitmen Pj Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Asmar Wijaya. Sehingga selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ilir (OKI) Provinsi Sumatera Selatan berhasil meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Kebijakan tersebut membuat Pemkab OKI meraih penghargaan Penggunaan Produk Dalam Negeri Tahun 2024 Atas Capaian Belanja Produk Dalam Negeri di Tahun Anggaran 2023.

Penghargaan ini diberikan karena Pemkab OKI karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja pemerintah daerah.

Untuk kategori pemerintah daerah, penghargaan hanya diberikan kepada 6 entitas Pemda antara lain, kategori provinsi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Lampung.

Sementara untuk kabupaten/kota diraih Kabupaten OKI, Takalar dan Kabupaten Lembata. Penghargaan diterima langsung Pj Bupati OKI, Asmar Wijaya.

"Berkat dukungan dari seluruh OPD untuk menyukseskan program P3DN. Kami terus berkomitmen meningkatkan serapan produk dalam negeri dalam belanja pemerintah sehingga dapat menopang ketahanan ekonomi daerah dan nasional," ucap Penjabat Bupati OKI, Ir. Asmar Wijaya, usai acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024.

Menteri Perindustrian RI Agus Gumi-

wang mengatakan penghargaan penggunaan produk dalam negeri tahun 2024 merupakan bentuk apresiasi kepada dua pihak yang memiliki peran besar dalam keberhasilan Program P3DN, yakni dari sisi pengguna dan produsen produk dalam negeri.

Pada sisi pengguna, penghargaan diberikan kepada instansi pemerintah dan badan usaha yang terkena

kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Salah satunya Kabupaten OKI Sumatera Selatan yang dinilai banyak menggunakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan di instansi daerah.

Imbas produk-produk usaha kecil dan menengah atau UKM di Kabupaten OKI menjadi hidup sekaligus mampu menggerakkan ekonomi daerah.

Sedangkan dari sisi produsen, diberikan kepada produsen dalam negeri yang tidak hanya melakukan pendalaman struktur industri, namun juga mampu memberikan produk yang berkualitas sesuai harapan konsumen.

"Proses penentuan penerima penghargaan sendiri dapat kami lakukan karena adanya kolaborasi dan interkoneksi data dengan berbagai kementerian dan lembaga," jelas Menperin Agus Gumiwang

Pada kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keberhasilan implementasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam belanja barang dan jasa pemerintah berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.

"Sehingga meski pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi melambat, ekonomi Indonesia dinyatakan mampu tumbuh positif sekitar 5,05 persen," ujarnya. Menurut Luhut, aksi afirmasi be-



lanja produk dalam negeri selama dua tahun terakhir sudah pada jalur yang tepat.

"Untuk itu, saya sampaikan apresiasi ke seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD atas upaya meningkatkan belanja produk dalam negeri," ujarnya.

Raih Tiga Penghargaan

Selain berkomitmen menggunakan produk lokal, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga dinilai baik dalam mengelola dana transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun 2023.

Atas kinerja tersebut, Pemkab OKI memborong tiga kategori penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemkeu) RI antara lain, Realisasi DAK fisik peringkat I se Sumsel, peringkat II Pengelolaan Dana Desa dan Peringkat III Transfer Keuangan Daerah (TKD)



paian tersebut merupakan komitmen jajaran Pemkab OKI untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik dalam peman-

ini, Pemkab OKI akan terus menguatkan komitmen menjaga transparansi, akuntabilitas dan efisiensi dalam mengelola dana publik.

"Sesuai dengan arahan Pj. Bupati Asmar Wijaya bahwa kita berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran, karena akan berdampak terhadap laju pembangunan, pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga pelayanan kepada masyarakat," terang dia.

Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto mengatakan, satker pemerintah dan Pemda dapat membantu berjalannya fungsi pemerintahan melalui penyerapan anggaran yang efisien.

"Highlight-nya bukan di penghargaan, tetapi pada tanggung jawab kita sebagai penerima penghargaan. Akuntabilitas, itu yang harus kita bangun untuk kepercayaan masyarakat," pung-



Penghargaan diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto kepada Pj. Sekda OKI, M. Refly pada Rakor penyerahan TKD 2024 di Palembang.

Pj. Sekda OKI, Refly mengatakan ca-

gunakan daerah.

"Apresiasi ini tak lepas dari kerjasama semua pihak dalam penyerapan anggaran yang optimal, serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel," tambah Refly.

Refly menegaskan dengan capaian

kasnya.

Besaran pagu yang dapat direalisasikan terang dia mencerminkan berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan, mendorong pertumbuhan ekonomi, distribusi yang merata dan stabilitas ekonomi yang terjaga. •



SOSOK PENANTANG KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

**Khofifah Indar Parawansa
mulus melaju menuju
Pemilihan Gubernur Jawa
Timur (Pilgub Jatim) 2024.
la mendapat dukungan
dari empat partai poli-
tik, yakni PAN, Gerindra,
Demokrat dan Golkar.**

Partai lain, antara lain PKB dan PDIP juga mengisyaratkan bakal mendukung Khofifah pada Pilgub Jatim tahun depan.

Lantas, siapa saja yang berpotensi menjadi lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024?

Pengamat politik sekaligus Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menyebutkan potensi lawan Khofifah bergantung pada sikap PKB dan PDIP di Pilgub Jatim 2024.

"Lawannya siapa? Ya, tergantung PKB dan PDIP. Kalau PKB dan PDIP memutuskan mendukung Khofifah, oposisi di Pilgub Jatim 2024 mungkin akan menjadi lapangan kosong," kata Baihaki.

Meski lawan Khofifah di Pilgub Jatim belum jelas, Baihaki mencatat beberapa nama yang berpotensi mencalonkan diri melawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024, asalkan PKB atau PDIP tidak mengusungnya.

PKB punya Gus Halim Iskandar, Thoriqul Haq, dan Badrut Tamam. Di PDIP ada Tri Rismaharini, Achmad Fauzi, dan Eri Cahyadi.

"Di luar afiliasi partai ada Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Namun, kendaraan partainya masih belum ditentukan," im-

buhnya.

Baihaki menjelaskan, lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 masih belum pasti. Parpol saat ini fokus pada pemilu legislatif 2024 dan pemilu presiden 2024. Apalagi, kriteria pencalonan calon di Pilgub Jatim didasarkan pada hasil pemilu legislatif 2024 yang membutuhkan dukungan minimal 20 persen atau setara dengan 24 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim).

Syarat untuk mengusung calon minimal 20 persen, artinya membutuhkan 24 kursi di DPRD Jatim.

Saat ini masih belum jelas partai mana yang bisa meraih jumlah kursi tersebut.

"Merujuk pada Pileg 2019, hanya PDIP dan PKB

bisa saja mengusung calon secara mandiri. Namun pada pemilu legislatif 2024, saya perkirakan akan banyak kejutan, dan dominasi PDIP dan PKB bisa saja tertantang oleh partai lain," ungkapnya.

Baihaki menyatakan, bagi partai yang ingin kadernya berpeluang menjadi Gubernur Jatim 2029, harus mengikuti Pilgub Jatim 2024. Kalau pun kalah di 2024, setidaknya punya cadangan elektabilitas di 2029. Baihaki menyoroti potensi yang ada pada kader PKB dan PDIP.

Namun partai-partai besar seperti PDIP dan PKB pasti akan mempertimbangkan dengan matang untuk mengusung calonnya di Pilgub 2024. Ini saatnya mengajukan calonnya sendiri.

Perhitungannya, jika calonnya kalah, setidaknya mereka punya cadangan elektabilitas terhadap seorang calon.

Siapa yang bisa dicalonkan kembali di Pilgub Jatim 2029, dimana Khofifah tidak bisa maju untuk periode ketiga, artinya tidak akan ada petahana yang dominan.

"Melihat arah politik saat ini, baik PKB maupun PDIP belum menyatakan secara terbuka apakah akan mencalonkan sendiri atau paling tidak



mencap salah satu tokoh kedua partai tersebut. Kita hanya melihat aktivitas Achmad Fauzi dari PDIP yang mendapat perhatian di baliho dan di media," tambahnya.

Terkait calon perse-orangan, Baihaki menyebut potensi yang ada, namun ia menegaskan kekuatan mereka akan sulit bersaing dengan Khofifah.

"Jadi posisi Khofifah diuntungkan, sudah mendapat dukungan resmi dari empat partai, dan kemungkinan besar akan bertambah. Partai yang belum mengusung calon pasti akan berpikir dua kali untuk bersaing melawan Khofifah karena persaingan itu membutuhkan popularitas dari calonnya dan tentu saja, logistik memadai. Kalau salah satu dari itu tidak ada, maka sulit mengalahkan Khofifah sampai saat ini," tutupnya.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, terus terang membicarakan kriteria Cagub Jatim yang akan menjadi pilihan PKB. Menurutnya, sosok yang diusung harus memiliki ideologi NU.

Saat ini, PKB masih belum menentukan langkahnya dalam Pilgub Jatim. Partai tersebut masih dalam pertimbangan apakah akan mengajukan calon sendiri atau bergabung dalam koalisi yang mendukung petahana, Khofifah Indar Parawansa.

Sebelumnya, Muhaimin Iskandar telah mengisyaratkan bahwa ada perbedaan pandangan dengan Khofifah, baik dalam Pilgub maupun dalam dukungan pada Pilpres 2024.

Meskipun begitu, Muhaimin Iskandar mengakui bahwa pihaknya belum menentukan calon mana yang akan diusung. Saat ditanya mengenai hal ini, Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, hanya menjawab belum tahu.

"Belum tahu," katanya.

Ketika ditanya apakah PKB akan berkoalisi dengan PDIP, Cak Imin tidak memberikan jawaban yang pasti. Ia menyatakan bahwa yang menjadi

fokusnya adalah mengusung calon yang berideologi NU.

"Saya hanya ingin mengusung yang berideologi NU di Jatim," katanya.

Meskipun PKB dan PDIP merupakan dua partai dengan elektabilitas dan jumlah kursi yang signifikan di Jawa Timur, keduanya masih meragukan siapa calon yang akan diusung. Sementara itu, partai lain seperti PAN, Gerindra, Demokrat, dan Golkar sudah memberikan rekomendasi kepada Khofifah untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur pada 2024.

Cak Imin sebelumnya telah mengakui perbedaan pandangan dengan Khofifah, terutama terkait dukungan pada Pilpres 2019. Perbedaan politik mereka juga terlihat pada Pilgub 2018, di mana PKB mendukung Saifullah Yu-

"Kan kita sudah tahu, sudah lama. Kan sudah lama," sambungnya.

Deretan partai politik yang telah menyatakan dukungan kepada Khofifah untuk kembali maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur adalah PAN, Gerindra, Demokrat dan Golkar.

PAN merupakan partai pertama yang merekomendasikan Khofifah Indar Parwansa sebagai calon gubernur Jawa Timur 2024. Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan bahwa rekomendasi tersebut hanya untuk calon gubernur, bukan calon wakil gubernur.

Emil Elistiano Dardak, kader PAN, dijadikan sebagai calon wakil gubernur pendamping Khofifah.

Partai Gerindra, yang diwakili oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Hashim Djojohadikusumo, memberikan rekomendasi kepada Khofifah untuk kembali maju di Pilgub Jawa Timur 2024. Hashim mengungkapkan bahwa Partai Demokrat akan mendukung den-



suf dan Puti Guntur Soekarno, sementara Khofifah didukung oleh beberapa partai besar.

Cak Imin menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak akan berdampak negatif pada PKB. Menurutnya, PKB optimis dapat mempertahankan dukungan terbanyak di Jawa Timur, dan perbedaan pandangan merupakan hak demokrasi masing-masing individu.

Mengenai dukungan Khofifah pada pasangan Prabowo-Gibran, Cak Imin mengaku sudah mengetahui hal tersebut sejak lama.

gan mengusung Emil Dardak sebagai calon wakil gubernur.

Partai Demokrat juga memberikan dukungan kepada Khofifah melalui Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Murti Yudhoyono (AHY). AHY menyerahkan surat rekomendasi secara langsung kepada Khofifah, menegaskan bahwa partai ini telah lama mengenal dan mendukungnya.

Partai Golkar memberikan dukungan langsung kepada Khofifah, yang diterima secara resmi dari Ketua Umum Airlangga Hartarto pada tanggal 23 Desember 2023. • IRY

PEMBANGUNAN LAMPUNG JADI PRIORITAS

Umar Ahmad diakui sebagai salah satu kader PDIP yang terkemuka di Lampung. Namun, keterlibatannya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) atau Pilkada 2024 di Lampung masih menjadi isu yang perlu dicermati.

Meskipun demikian, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan resmi terkait Pilkada, karena fokus mereka saat ini adalah menghadapi Pilpres dan Pileg 2024.

"PDIP dari awal hingga sekarang masih berfokus pada Pilpres dan Pileg," ujar Sutono, beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Sutono, rencana Pilkada akan dibahas setelah Pilpres dan Pileg.

"Rencana untuk Pilkada akan dibahas setelah 14 Februari 2024 (Pilpres dan Pileg)," tambahnya.

Sutono menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi hasil Pemilu 2024 setelah melihat persentase perolehan suara.

"Setelah melihat hasil berapa persen, barulah kita bisa membahas terkait Pilkada. Saat ini, di PDIP belum ada pembahasan mengenai hal tersebut," jelasnya.

Sutono menjelaskan bahwa elektabilitas partai dan kader-kadernya akan dipengaruhi secara otomatis jika partai berhasil meraih 35 persen suara dalam Pemilu nanti. Dalam konteks ini, jika partai meraih persentase tersebut, PDIP akan segera mengambil langkah untuk mendukung calon yang dianggap layak, termasuk Umar Ahmad.

Ditanya mengenai bocoran bakal calon gubernur Lampung dari PDIP, Sutono menyebut Umar Ahmad sebagai salah satu kader terbaik.

Menurutnya, mantan Bupati Tulangbawang Barat tersebut memiliki potensi untuk maju dalam Pilkada 2024.

"Kita sudah mengenal kader-kader terbaik kita saat ini, termasuk Umar Ahmad dan masih banyak kader lainnya yang berpotensi," pungkasnya.

Penunjukan Umar Ahmad sebagai Wakil Ketua DPD PDIP Lampung dalam Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dianggap sebagai ujian atau tes dari PDIP untuk potensi pencalonannya dalam Pilgub 2024 yang akan datang.

Mengenai hal tersebut, Umar Ahmad, menyatakan bahwa belum ada pembicaraan terkait pencalonan kepala daerah. Dia menegaskan bahwa keputusan mengenai calon Gubernur merupakan kewenangan dari DPP PDIP.

"Masih terlalu awal untuk membahas hal tersebut," ujar Umar.

Ketika ditanya mengenai kesiapannya untuk maju dalam Pilgub, Umar menyatakan kesiapannya jika memang partai menugaskannya.

"Tentu saja, saya siap. Bahkan sebagai Ketua Bappilu pun saya sudah siap," ungkapnya.

Umar Ahmad menekankan bahwa pembangunan Lampung ke depan harus memperhatikan prinsip-prinsip budaya agar daerah ini dapat berkembang lebih baik.

Ia mengajak untuk tidak hanya melihat Lampung sebagai sekadar wilayah geografis, melainkan sebagai entitas yang telah lama memiliki visi bersama.

"Pembangunan di Lampung harus didasarkan pada prinsip-prinsip budaya yang telah lama menjadi ciri khas daerah ini. Visi yang telah kita sepakati harus menjadi landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, dengan memperhatikan piil pesengiri, nemui nyimah, nenggah-ngapur, bejuluk adat, dan sakai sembayan," ujar Umar Ahmad.

"Sejak zaman Lampung belum berdiri sebagai daerah otonom, kita telah menyatukan berbagai kelompok di wilayah ini menjadi satu, dengan tujuan memiliki visi bersama yang menjadi dasar pembangunan Lampung," ulasnya.

Menurut Umar Ahmad, penting bagi masyarakat Lampung untuk terus mengembankan pikiran dan gagasan, karena segala sesuatu yang muncul saat ini berasal dari ide dan konsep yang lahir dari pemikiran tersebut.

Namun, sebelumnya muncul wacana kemungkinan Umar Ahmad berpasangan dengan Sutono pada Pilgub Lampung 2024.

Akademisi dari Universitas Lampung, Darmawan Purba SIP MIP mengungkapkan wacana ini dapat menjadi alternatif yang baik untuk memajukan Provinsi Lampung ke depan.

"Umar Ahmad-Sutono dapat menjadi pasangan alternatif yang baik, mengingat Umar Ahmad sebagai tokoh muda yang banyak didukung oleh berbagai pihak," ungkap Darmawan Purba.

Sutono, yang merupakan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, dianggap dapat memberikan

kontribusi yang signifikan dalam pasangan ini.

Darmawan Purba meyakini bahwa Umar Ahmad, dengan dukungan dari partai pemenang pemilu, dapat mengakselerasi pembangunan di Provinsi Lampung.

"Umar Ahmad, sebagai bagian dari keluarga besar PDIP dan dengan kinerja yang telah teruji, bersama Sutono, memberikan alternatif kandidat yang membawa perubahan positif bagi Provinsi Lampung," tambahnya.



PDIP dianggap sebagai kendaraan politik yang potensial untuk membantu Umar Ahmad dan Sutono meraih kemenangan pada Pilgub Lampung 2024.

Darmawan Purba menyatakan bahwa PDIP, sebagai partai pemenang dalam dua pemilu terakhir, memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat.

"Secara elektoral, PDIP telah meraih dukungan masyarakat dalam pemilu, sehingga tanggung jawabnya adalah melayani masyarakat," paparnya.

Menanggapi hal ini, Darmawan menyoroti bahwa PDIP di Lampung belum berhasil memenangkan kader-kadernya pada Pilgub Lampung dalam dua periode sebelumnya.

Saat ini, mayoritas masyarakat melihat PDIP berpotensi memenangkan Pemilu 2024 untuk ketiga kalinya dengan mengusung calon presiden Gan-

jar Pranowo yang memiliki elektabilitas tinggi.

"Wacana Umar Ahmad dan Sutono akan menjadi modal besar bagi tokoh-tokoh politik lokal di Lampung, terutama kader PDIP," kata Darmawan.

Umar Ahmad, berpasangan dengan Sutono, dianggap sebagai pasangan ideal untuk Pilgub Lampung 2024.

"Meskipun tidak ada rumusan representasi, kombinasi dua tokoh politisi dan birokrat ini merepresentasikan dua etnis terbesar di Lampung, yaitu Jawa-

Lampung, yang umumnya dipasang dalam setiap pilkada di Lampung," jelas Darmawan.

Umar Ahmad, seorang politisi berpengalaman dalam kepemimpinan daerah, dinilai sukses membawa perubahan di Kabupaten Tulangbawang Barat. Pengalaman ini dianggap sebagai modal sosial yang dapat membantu perubahan di tingkat Provinsi Lampung.

Sementara itu, Sutono, yang memiliki latar belakang sebagai mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris PDIP Lampung, dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

"Dengan perpaduan modal sosial dan dukungan politik, PDIP Lampung dapat efektif mengusung Umar Ahmad-Sutono di Pilgub Lampung 2024," kata Darmawan.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai wacana tersebut, Sekretaris DPD PDIP Lampung, Sutono, tidak memberikan tanggapan. ●

IJECK ATAU BOBBY NASUTION UNTUK SUMUT

Dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara 2024, Partai Golkar telah menunjuk Wali Kota Medan, Bobby Nasution dan Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah alias Ijeck, sebagai bakal Calon Gubernur (Cagub) Sumut.

Surat tugas yang diberikan kepada keduanya disampaikan melalui surat resmi dari DPP Partai Golkar dengan nomor Sund-308/GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Sekretaris DPP Golkar, Lodewijk F Paulus.

Mengenai pilihan antara Ijeck dan Bobby, Ketua Umum DPP Golkar, Airlangga Hartarto enggan memberikan jawaban konkret. Menurut Menko Perekonomian tersebut, fokus Partai Golkar saat ini masih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Jadi kita Pileg Pilpres dulu, Pak Ijeck juga akan maju di Pileg," ujar Airlangga Hartarto setelah Rapat Pimpinan Daerah III Golkar Sumut, belum lama ini.

Saat ditanya mengenai kriteria atau metode penentuan dukungan terhadap Ijeck atau Bobby, Airlangga Hartarto tetap menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah Pileg dan Pilpres.

"Pileg Pilpres dulu," tambahnya.

Sebelumnya, surat resmi dari DPP Partai Golkar telah mengindikasikan dukungan terhadap Bobby dan Ijeck sebagai calon Gubernur Sumut. Dalam surat tersebut, terdapat undangan untuk menghadiri pengarahannya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai Golkar.

Lampiran kedua surat tersebut secara eksplisit

menyebutkan bahwa Bobby Nasution dan Ijeck adalah dua nama yang akan diusung sebagai Calon Gubernur Sumut.

Sekretaris Golkar Sumut, Datuk Ilhamsyah mengonfirmasi penunjukan kedua nama tersebut.

"Betul (Golkar usulkan Bobby dan Ijeck jadi Cagub Sumut), di Medan Bobby dapat juga," ujar Ilhamsyah.

Ijeck sendiri adalah Mantan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023 dan saat ini memimpin Partai Golkar Sumut sejak tahun 2020. Ia dianggap kuat sebagai calon Gubernur Sumut berkat pengalamannya dan dukungan yang besar di Sumut.

Ilhamsyah menyatakan dukungan yang solid dari pihaknya terhadap mantan Wakil Gubernur Sumut ini. Ia menambahkan bahwa Ijeck telah aktif dalam konsolidasi politik, berinteraksi dengan masyarakat, dan merancang program-program yang bermanfaat bagi masyarakat Sumut.

"Kita terus membuat program yang bermanfaat untuk masyarakat bukan hanya karena saat kepentingan politik saja. Golkar tetap harus hadir kapan pun untuk masyarakat," ujar Ilhamsyah.

Dengan arahan dari Ijeck, mereka berkomitmen untuk terus mengembangkan program-program pro-masyarakat di sepanjang perjalanan politik mereka.

Nama Ijeck itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut, Ijeck lahir dari kalangan keluarga



yang cukup berada, sang ayah H.Mussanif merupakan seorang pengusaha dan pemilik Group Anugerah Langkat Makmur (ALAM) yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, properti, pupuk kompos, sarang burung walet, hingga SPBU.

Tak hanya berkecimpung di dunia politik, Ijeck juga menjabat beberapa organisasi dengan rentang waktu yang cukup lama.

Musa Rajekshah lahir di Medan, Su-

matra Motor Indonesia.

Meski Ijeck tidak pernah sekalipun terlibat langsung di dalam berbagai aktivitas politik, namun ia tetap bersikeras untuk bisa terjun di dunia politik.

Sampai pada tahun 2018, namanya terpampang menjadi calon Wagub Sumut mendampingi Edy Rahmayadi.

Tak disangka, ia bersama Edy Rahmayadi telah memikat hati para warga Sumut itu berhasil memenangkan suara di Pemilihan Gubernur dan Wakil

sannya terjun ke dunia politik tidak melibatkan campur tangan atau intervensi dari Jokowi. Selain menjadi kader PDIP, ia juga sempat mendaftarkan diri melalui Partai Golkar, tetapi lebih memilih berada di bawah panji PDIP.

Pada Maret 2020, Bobby secara resmi menjadi kader PDIP setelah mengajukan diri dan mengisi formulir pendaftaran di Kantor DPD PDIP Sumut di Medan. Keputusan ini mengikuti langkah kakak iparnya, Gibran Rakabuming



matra Utara pada 1 April 1974. Ia merupakan anak kedelapan dari sembilan bersaudara pasangan H.Musannif dan Hj. Syarifah Rahmah.

Ijeck telah mengenyam pendidikan hingga S2 di Universitas Sumatra Utara (USU) pada tahun 2007 sampai 2009. Aktivitas non pendidikan Ijeck adalah seorang pengusaha sukses yang cukup terkenal di Medan.

Beberapa bidang usaha yang Ijeck geluti mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga dunia otomotif. Selain itu, Musa Rajekshah juga cukup berprestasi di kancah olahraga dan kerap terlibat dalam aktivitas sosial.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ijeck pernah menduduki posisi penting di beberapa perusahaan ternama, mulai dari PT Anugerah Sawindo, PT Kembang Sepatu Alam Abadi, dan PT Su-

Gubernur Sumut.

Sementara, nama Bobby Nasution yang menjabat sebagai Wali Kota Medan juga diusung Partai Golkar untuk Pilgub Sumut 2024 memiliki perjalanan politik yang cukup panjang.

Bobby Nasution mulai menarik perhatian publik setelah menikahi putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pada tahun 2017.

Meskipun memiliki latar belakang sebagai pengusaha sebelum terjun ke dunia politik, Bobby memutuskan untuk mengikuti jejak mertuanya, Jokowi, dan terlibat dalam Pilkada Kota Medan tahun 2020.

Pada awal Desember 2019, Bobby secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Medan dengan dukungan dari PDIP.

Bobby menegaskan bahwa keputu-

Raka, yang maju dalam Pilkada Kota Solo.

PDIP secara resmi mengusung Bobby sebagai calon Wali Kota Medan bersama Aulia Rahman pada Agustus 2020. Pasangan ini diusung oleh PDIP, PAN, Golkar, PSI, Gerindra, Nasdem, Hanura, dan PPP, dengan koalisi partai pengusung memiliki 39 kursi di DPRD Kota Medan.

Dengan dukungan koalisi, Bobby berhasil memenangkan Pilkada Medan 2020, mengalahkan pasangan petahana, Akhyar Nasution-Salman Alfarisi.

Setelah sukses dengan PDIP dan memenangkan Pilkada Medan 2020, Bobby kemudian dikabarkan berpaling dari PDIP. Dalam Pilpres 2024, ia mendukung pasangan Prabowo-Gibran, kakak iparnya. •IRY

ANGKAT ISU KESETARAAN PEMBANGUNAN DI KALTENG

Nadalsyah telah memastikan pencalonannya sebagai Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Selaku Ketua Umum Partai Demokrat Kalteng, H. Nadalsyah menegaskan, surat penugasan resmi DPP Partai Demokrat yang ditujukan kepadanya sebagai Pengurus Daerah (DPD Partai Demokrat Kalteng) secara tegas menyikapi keresahan masyarakat, keraguan mengenai pencalonan gubernurnya.

Ia mengklarifikasi, ada spekulasi mengenai pencalonannya tahun lalu, namun tidak menjadi kenyataan.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan surat penugasan resmi dari DPP Partai Demokrat, saya (H. Nadalsyah) mengukuhkan pencalonan saya sebagai Gubernur Kalteng," ujar Nadalsyah, Sabtu, 20 Januari 2024.

Lebih lanjut Nadalsyah menegaskan, pembahasan mengenai calon Wakil Gubernur Kalteng belum terjadi, dan belum ada informasi siapa yang akan dicalonkan untuk mendampingi.

Ia menyampaikan niatnya untuk mengevaluasi situasi politik di Kalteng pasca pemilu Presiden dan Legislatif.

Terkait pemilihan calon wakil

gubernur, H. Nadalsyah mengutarakan keinginan adanya kemitraan yang kolaboratif dan sinergis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah yang dikenal dengan Bumi Tambun Bungai, sebutan lain Kalteng.

"Kami mencari sosok yang bisa bekerjasama dan berkolaborasi antara calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Tidak saling bersaing dan sebagainya. Kami mencari wakil yang bisa memotivasi, memberikan masuk a t a s

kekurangan-kekurangan Gubernur," jelasnya.

Niat Nadalsyah untuk maju Cagub Kalteng bukan untuk Cawagub.

"Saya tidak memiliki niatan untuk menjadi bakal calon wakil gubernur, melainkan bakal calon gubernur. Jika tidak mampu menjadi bakal calon gubernur, saya lebih memilih untuk mengelola perusahaan. Jangan memberikan dukungan kepada saya sebagai bakal calon wakil gubernur," ucap Nadalsyah.

Bupati Barito Utara ini mengakui bahwa dirinya terus melakukan sosialisasi, termasuk di Kotawaringin Timur.

Selain karena kabupaten ini memiliki jumlah pemilih terbesar di Kalteng, Nadalsyah merasa Kotawaringin Timur sebagai rumah kedua baginya, terutama karena diterima dengan baik oleh masyarakat.

Pada tahun 2019, ia pernah melakukan sosialisasi, namun pada saat itu, niatnya untuk ikut dalam Pilkada dibatalkan. Beberapa alasan yang dia kemukakan termasuk baru satu tahun menjabat sebagai bupati, belum adanya persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat, dan keluarganya yang meminta untuk menyelesaikan tugas di daerah.

"Tidak ada alasan untuk membatalkan pada pemilu 2024. Mohon doa semoga saya diberikan umur panjang dan kesehatan. Insyaallah, saya siap maju dan berkontribusi untuk menciptakan sejarah kemajuan di



Kalteng,” ujar Nadalsyah.

Nadalsyah menyatakan bahwa ia telah menyiapkan langkah-langkah politik untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur 2024. Salah satu langkah tersebut adalah maju sebagai calon anggota DPR RI dari Kalteng sebelumnya.

Menurutnya, langkah ini bukan hanya untuk duduk di Senayan, tetapi juga untuk mengukur potensinya dalam Pemilihan Gubernur nantinya, dengan target meraih suara terbanyak di antara calon legislatif DPR RI lainnya.

“Parameter atau titik awalnya akan terlihat dari hasil pemilu legislatif nanti. Saya berharap perolehan suara saya

ta, dan pemerintah provinsi harus bekerja sama dengan semua pemerintah kabupaten dan kota, mengingat bupati dan wali kota lebih memahami kondisi di daerah masing-masing.

“Tidak boleh ada ketidaksetaraan pembangunan di Kalteng. Jika saya terpilih sebagai gubernur, saya tidak akan hanya fokus membangun daerah asal saya di Barito. Semua daerah akan mendapatkan pembangunan yang merata,” tambah Nadalsyah.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Kalteng, Junaidi menyatakan kesiapan dan optimisme mereka menghadapi pesta demokrasi pada 14 Februari 2024, serta pemilihan

keras,” ujarnya.

Junaidi juga menekankan perlunya doa restu dari DPD Partai Demokrat Kalteng serta mengajak semua pihak untuk bersama-sama berjuang agar Nadalsyah dapat terpilih sebagai Anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Kalteng, serta dirinya sendiri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Kalteng dari daerah pemilihan Kalteng I.

“Kami juga mengajak semua calon legislatif Partai Demokrat di daerah pemilihan Kalimantan Tengah II, Kalimantan Tengah III, Kalimantan Tengah IV, dan V, baik yang sedang menjabat maupun calon baru, bersatu dalam



Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan surat penugasan resmi dari DPP Partai Demokrat, saya (H. Nadalsyah) mengukuhkan pencalonan saya sebagai Gubernur Kalteng.

tidak lebih rendah dari calon legislatif DPR RI lainnya. Jika saya di bawah mereka, bisa menjadi bahan olok-olok. Sebelum berpikir menjadi calon gubernur, saya harus memastikan kinerja saya sebagai caleg tidak kalah. Oleh karena itu, saya meminta dukungan dari seluruh kader partai, terutama di Kotawaringin Timur,” jelas Nadalsyah.

Dia menambahkan bahwa setiap bakal calon gubernur pasti memiliki visi dan misi. Menurutnya, Kalimantan Tengah harus mengejar ketertinggalan dari daerah lain dengan menetapkan target dan sistem pembangunan, terutama dalam bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, olahraga, dan lainnya.

Nadalsyah menekankan bahwa pembangunan di Kalteng harus mera-



kepala daerah yang akan dilaksanakan pada November 2024 mendatang.

Dalam rangka menjalankan mandat DPP untuk persiapan majunya Ketua Partai Demokrat Kalteng, Nadalsyah sebagai bakal calon gubernur Kalteng pada tahun 2024, Junaidi mengajak seluruh kader, simpatisan, dan masyarakat Kalteng untuk bersiap-siap bersama dalam perjuangan memajukan daerah tersebut.

“Kami siap menjaga dan mendukung Nadalsyah untuk maju sebagai bakal calon gubernur Kalteng. Tentu, kami berharap kerjasama seluruh lapisan masyarakat, partai politik, dan pihak terkait untuk bersatu dan bekerja

perjuangan ini,” tegasnya.

Menurut Junaidi, jika jumlah kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Kalteng mencukupi untuk mengusung Nadalsyah sebagai bakal calon gubernur Kalteng pada tahun 2024, hal tersebut akan memberikan semangat dan optimisme tambahan untuk mewujudkan kepemimpinan H. Nadalsyah sebagai pemimpin di Bumi Tambun Bungai.

“Kami tidak akan melupakan pentingnya komunikasi dan silaturahmi politik dengan partai-partai sahabat di Kalteng, sebagai langkah persiapan untuk membentuk koalisi sesuai dengan arahan DPP Partai Demokrat sebelumnya,” tutupnya. •IRY

3 KALI GAGAL, BENNY K HARMAN MAJU LAGI

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mendorong Benny Harman, Wakil Ketua Umum (Waketum), untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2024.

Benny tetap dicalonkan, meskipun sebelumnya telah mengalami tiga kegagalan dalam Pilgub NTT.

Juru Bicara Demokrat NTT, Frids Wawo Lado, mengonfirmasi bahwa terdapat perintah resmi dari DPP Demokrat kepada Benny, yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR RI.

"Demokrat NTT siap melaksanakan perintah dari DPP. Setiap kader Demokrat di Provinsi NTT diharapkan untuk menyosialisasikan sosok Benny K Harman dan mendukungnya secara terbuka. Seluruh kader Demokrat diwajibkan untuk mematuhi perintah dari DPP," ungkap Frids.

Frids menyatakan bahwa Benny telah diberikan mandat oleh Partai Demokrat melalui surat tugas nomor 39/INT/DPP.PD/XII/2023, yang dikeluarkan pada 19 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya.

"Walaupun kami di DPD NTT telah menerima surat mandat dari pusat, namun bukti fisik

surat tersebut belum diterima. Surat tersebut memberikan mandat kepada Benny K Harman untuk berkomunikasi dengan partai lain guna memenuhi syarat minimal 20 persen dukungan koalisi. Benny juga diminta untuk mencari dan mengusulkan pasangan calon wakil gubernur (cawagub)," jelas Frids.

Frids menegaskan bahwa sesuai dengan mandat tersebut, Partai Demokrat NTT akan berupaya mendekati partai lain untuk mendapatkan dukungan bersama agar Benny dapat maju dalam Pilgub 2024.

Dia menambahkan bahwa DPP melihat

Benny K Harman sebagai sosok berpengalaman dalam politik dan memiliki kemampuan untuk memimpin NTT lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, Frids menjelaskan bahwa DPP Demokrat belum menentukan calon pendamping untuk Benny sebagai bakal cawagub. Keputusan mengenai pasangan cawagub diberikan kepada Benny sendiri, dengan kriteria yang mencakup aspek politis, populis, dan kemampuan pelayanan masyarakat yang sesuai untuk lima tahun mendatang.

Benny K. Harman sebelumnya pernah mencalonkan diri dalam tiga Pilgub NTT. Ia pertama kali mencoba pada Pilgub NTT 2008 bersama dengan Alfred Kase, kemudian pada Pilgub 2013 berpasangan dengan Willem Nope.



Pada Pilgub NTT 2018, Benny K. Harman kembali mencalonkan diri bersama dengan Benny Litelnony, namun sekali lagi mengalami kegagalan.

Selain tugas tersebut, Partai Demokrat juga memberikan tanggung jawab kepada Benny untuk mencari dan mengusulkan nama calon wakil gubernur yang akan mendampingi.

Benny juga diminta untuk melaporkan hasil survei elektabilitas terbaru serta perkembangan kerja sama dengan partai politik yang mendukungnya sebagai calon gubernur.

Teuku Riefky Harsya menekankan

(DPR RI) empat periode sejak 2004. Pada periode pertamanya, Benny terpilih melalui kendaraan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia).

Selanjutnya, ia menjadi bagian Partai Demokrat sejak 2008 hingga saat ini. Pada 2009-2012, ia menjabat Ketua Komisi III yang membidangi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan Hak Asasi Manusia DPR RI.

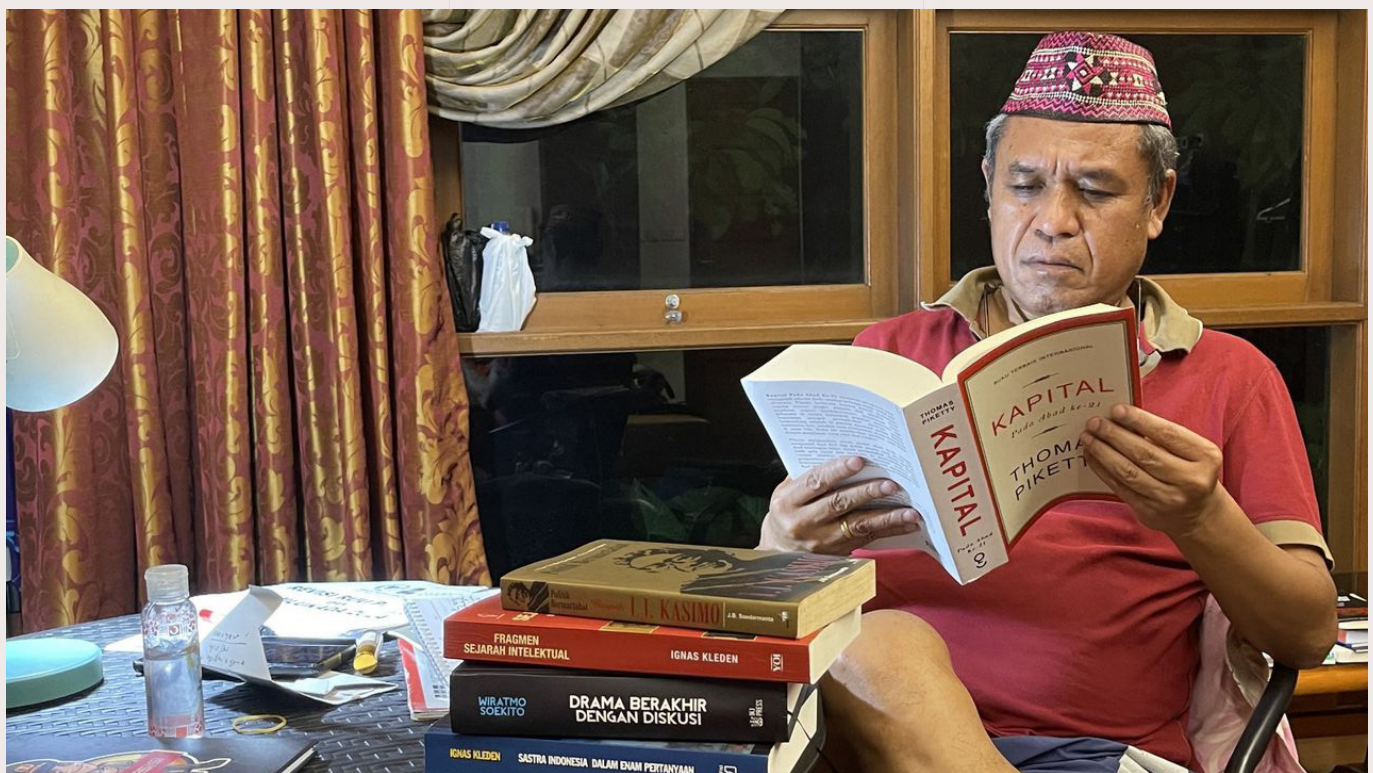
Kurun 2012-2014, Benny dipercayakan sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI.

Selanjutnya pada periode 2014-

syarat dukungan 15 persen total suara DPRD NTT. Paket Harkat diusung oleh PPD, Demokrat, PPP, PPD, dan PKB yang tergabung dalam Koalisi NTT Bangkit.

Adapun Pilgub 2008 dimenangkan paket Frans Lebu Raya-Esthon Foenay yang diusung PDI Perjuangan.

Pada edisi Pilgub 2013, Benny Harman kembali maju dan berpasangan dengan Willem Nope. Dalam Pilgub yang diikuti empat paket itu, pasangan Benny Harman - Willem Nope mendapat 242.610 suara atau 10,61 persen atau menempati peringkat



pentingnya Benny Harman melaporkan hasil survei terbaru dan kerja sama dengan partai politik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh DPP Partai Demokrat.

Sepak terjang politisi senior Partai Demokrat, Benny Kabur Harman atau Benny Harman di panggung politik tanah air tak diragukan.

Pria yang lahir di Manggarai Flores pada 19 September 1962 saat ini tercatat sebagai anggota Komisi III yang membidangi politik dan pemerintahan di dalam negeri yang termasuk didalamnya urusan-urusan politik dan Pemilu.

Benny yang dikenal BKH telah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat

2019, Benny menjadi Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan saat zaman kejayaan Partai Demokrat.

Ia juga menjadi Ketua Departemen Penegakan Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

Selain itu, ia juga menjadi Wakil Presiden South-East Asian Parliamentary Forum Against Corruption (2005-2010), bagian dari organisasi parlemen dunia untuk antikorupsi.

Benny Harman tercatat pernah mengikuti Pilgub NTT sebanyak dua kali yaitu pada edisi 2013 dan 2018.

Sebelumnya pada Pilgub 2008, Benny Harman yang berpasangan dengan Alfred M Kase (Harkat) tidak memenuhi

empat.

Pasangan Frans Lebu Raya dan Ben Alexander Lytelnoni menjadi pemenang setelah Pilgub dilaksanakan dua putaran.

Selanjutnya pada edisi Pilgub NTT 2018 Benny Harman berpasangan Benny Litelnony yang merupakan Wakil gubernur NTT incumben juga kalah dan menempati posisi buntut dari empat paket yang bertarung.

Pasangan Benny - Beny meraup 443.796 suara atau 18,63 persen dari total suara. Pada edisi Pilgub 2028, pasangan Viktor Bungtilu Laiskodat dan Josef Nae Soi menjadi pemenang dengan perolehan 838.213 suara atau setara 35,20 persen. • IRY

MEMBELI KUCING DALAM KARUNG

Banyak tokoh dan politisi telah mencuat dan bahkan secara terbuka menyatakan keinginan untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh 2024.

Fenomena ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam ranah demokrasi di Aceh, memberikan harapan akan munculnya pemimpin terbaik yang dapat memimpin pembangunan daerah ini, yang saat ini masih tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Pengamat sosial dan politik dari Universitas Abulyatama (Unaya), Usman Lamreung mengatakan sejumlah tokoh telah mencuat sebagai potensial kandidat dalam kontestasi Pilkada Aceh mendatang.

Beberapa nama yang telah muncul antara lain Abdullah Puteh, Nasir Jamil, Muzakir Manaf, Sudirman atau Haji Uma, dan mantan Walikota Banda Aceh Aminullah Usman.

Selain itu, hasil survei juga menyebutkan beberapa nama lain seperti Tarmizi Karim, Yusuf A. Wahab atau Tu Sop, Muhammad Nazar, dan beberapa tokoh lainnya.

Berdasarkan hasil survei elektabilitas, Nasir Jamil tampak menempati posisi puncak, diikuti oleh Haji Uma, Muzakir Manaf, Tarmizi Karim, dan Tu Sop yang masuk dalam lima besar dengan tingkat elektabilitas tertinggi.

"Formasi elektabilitas para kandidat masih bersifat dinamis dan dapat men-

galami pergeseran," ungkapnya.

Usman Lamreung juga menyoroti bahwa kandidasi gubernur Aceh dan hasil Pilkada 2024 nanti akan sangat menentukan masa depan Aceh dalam lima tahun ke depan.

Oleh karena itu, ia menekankan bahwa penilaian terhadap kandidat tidak hanya boleh dilihat dari angka elektabilitas semata, tetapi juga dari perspektif kepentingan calon gubernur dan wakilnya serta kepentingan rakyat sebagai pemilih.

Para calon diharapkan memahami bahwa elektabilitas menjadi fokus utama mereka untuk meraih kursi kepala daerah.

Namun, di sisi rakyat, kepentingan mereka adalah mendapatkan pemimpin yang kompeten dan visioner, yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan mereka.

"Dalam konteks ekspektasi Aceh menjadi lebih baik, kandidasi gubernur Aceh tidak bisa dilihat semata-mata dari angka dan persentase elektabilitas belaka," tegas Usman Lamreung.

Terlihat bahwa kebanyakan dari mereka hanya mengandalkan popularitas, kekuatan mesin politik, dan hasil survey untuk membangun citra elektabilitas mereka.

Aminullah Usman adalah salah satu yang tampil cukup elegan dan percaya diri saat mendeklarasikan diri sebagai calon gubernur. Ia juga mempublikasikan visi misinya kepada publik, memberikan langkah yang seharusnya diikuti oleh calon lainnya.

"Meskipun narasi visi-misinya masih dapat dikritisi, pendekatan seperti yang dilakukan oleh Aminullah seharusnya diadopsi oleh calon lain agar publik dapat menilai kapasitas intelektual mereka dalam memimpin Aceh ke arah yang lebih baik," jelasnya.

Di sisi lain, calon seperti

Nasir Jamil masih
m e n g -



gunakan strategi standar dengan pertemuan-pertemuan simpatik dan menunjukkan keberpihakan terhadap isu-isu tertentu.

Namun, kemunculan nama-nama calon Gubernur Aceh ini masih kabur. Hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah secara terang-terangan mengusung kandidatnya untuk Pilgub 2024, yaitu M. Nasir Djamil.

Usman Lamreung menyatakan bahwa dari nama-nama calon yang telah muncul, belum terlihat adanya gagasan yang menarik untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Aceh, termasuk masalah kemiskinan.

Usman Lamreung menyebut bahwa gerak-gerik para calon saat ini masih terbatas pada kegiatan seremonial dan kegiatan sosial lainnya.

"Mereka belum berani secara tegas menyampaikan visi-misi mereka kepada publik," ungkapnya.

Dengan demikian, Usman menyimpulkan bahwa para calon yang muncul belum memiliki gagasan yang konkret, konsep yang matang, atau ide-ide kreatif.

Usman Lamreung juga menekankan pentingnya para calon gubernur ini untuk mengungkapkan dengan jelas visi dan misi mereka kepada masyarakat Aceh, sehingga masyarakat dapat memahami dasar dari pencalonan mereka sebagai Gubernur Aceh.

Kekhawatiran muncul jika calon-calon tersebut tidak mampu mengungkapkan tujuan, gagasan dan visi mereka dengan jelas, karena hal ini dapat menyebabkan situasi di mana masyarakat hanya "membeli kucing dalam karung" dalam pemilihan kepala daerah.

"Berbagai masalah yang masih belum terselesaikan di Aceh, terutama masalah kemiskinan, yang tidak bisa diabaikan karena memiliki dampak dari lima tahun sebelumnya," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak para calon untuk memiliki gagasan yang

jelas, konsep yang solid dan rencana yang kuat dalam menangani masalah-masalah tersebut dan membawa Aceh ke masa depan yang lebih baik.

"Padahal di antara mereka ada yang sudah pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode yang lalu, seperti Abdullah Puteh dan Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. Jika dilihat mereka ini punya potensi lebih, namun sampai detik ini tidak terlihat gagasan

dan teman-teman. Dalam pernyataannya, ia menyampaikan keyakinannya bahwa pengalaman sebagai anggota DPR RI selama beberapa periode menjadi modal berharga dalam kepemimpinan Aceh di masa mendatang.

"Kami yakin dengan pengalaman pernah jadi anggota DPR RI beberapa periode menjadi modal bagi kami dalam memimpin Aceh ke depan," ujarnya.

"Kedepan kita terus mendorong dan mengawal kebijakan Pemerintah Pusat



yang konkret," ulasnya.

Anggota DPR RI Fraksi PKS, H Nasir Djamil, telah mengumumkan kesiapannya untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh pada Pilkada 2024 mendatang.

Nasir Djamil menegaskan langkah politiknya untuk ikut dalam Pilkada Aceh merupakan hasil pertimbangan matang, telah mendapatkan restu dari keluarga

memihak kepada Aceh."

Nasir Djamil juga menambahkan bahwa setelah Pilkada Aceh, ia berencana mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPR RI. Ia meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kota Langsa.

"Insya Allah, bila dipercayakan saya siap memimpin Aceh dimasa yang akan datang," tambahnya. •IRY

BOLEH PINTAR JANGAN MENGAKU PINTAR

Eddy Santana Putra secara tegas menyatakan akan maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024, meski ada nama mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya yang digadang-gadang bakal maju sebagai Cagub Sumsel.

Bahkan, baru-baru ini Mantan Wali Kota Palembang dua periode ini menyebutkan siap bersaing dengan Mawardi Yahya.

"Tidak masalah, bersaing kita, siapa yang terbaik," ungkapnya, saat menjadi bintang tamu podcast Info Indonesia, belum lama ini.

Eddy Santana Putra atau dikenal dengan nama ESP berjanji akan membawa Sumsel menjadi lebih baik dari sebelumnya pada masa jabatan Herman Deru, yang dinilai tidak ada perubahan dan hanya begitu-begitu saja.

"Mawardi kan sudah ada pengalaman mendampingi Herman Deru sebagai Wakil Gubernur Sumsel, tapi apa hasilnya biasa saja," tegasnya.

ESP, Anggota DPR dari Partai Gerindra, optimis dengan hasil survey di Dapil-nya yang menunjukkan Gerindra meraih 2 kursi, menjadi nomor 1.

"Insya Allah tetap ya, kalau di kursi pertama dengan 24,7%, kedua 17%, ketiga 13%, dan jika suara Gerindra saya hitung-hitung mencapai 500 ribu ke atas, mudah-mudahan itu juga

mencerminkan dukungan bagi saya. Jadi, Insya Allah kita bisa menjadi semakin hebat," tandasnya.

Tentang keinginannya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumsel, alasan utamanya adalah untuk membesarkan Sumsel dari segi pembangunan.

"Harus ada pembangunan. Ini urusan Kota Palembang, tapi jika saya jadi Gubernur, saya juga bisa memengaruhi sebagai wali kota dengan otoritas kewenangan dan anggaran. Saya akan ajak Wali kota untuk membahas mengapa Palembang gelap dan semakin kotor," ujarnya.

Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi Palembang yang mandek setelah dirinya meninggalkan kota pempek ini.

Ia berharap dapat mendapatkan dukungan untuk menjadi gubernur agar dapat me-

nanngani masalah kota maupun kabupaten, termasuk masalah lingkungan.

ESP juga membahas masalah bandara internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, yang sebelumnya melayani rute Palembang-Singapura dan Palembang-Malaysia sebelum pandemi COVID-19.

Ia mencatat bahwa semua penerbangan berkurang selama pandemi dan beberapa rute penerbangan hilang. ESP menyebutkan akan menyampaikan permasalahan ini kepada Menteri Perhubungan pada pertemuan selanjutnya.

Mengenai program kedepan bagi pengusaha, ESP berbagi pengalaman tentang pembuatan acara untuk pengusaha. Ia menekankan pentingnya memperkenalkan kewirausahaan kepada anak-anak sejak dini, karena tidak semua orang dapat menjadi pegawai negeri atau bekerja pada sektor formal.

Menurutnya, menjadi pengusaha adalah salah satu cara untuk meraih kesuksesan ekonomi.

Jika terpilih menjadi Gubernur Sumsel, Eddy akan merubah suasana Sumsel menjadi lebih baik.

Terutama pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat yang harus bisa direalisasikan, termasuk jalan dari Palembang menuju Pelabuhan Tanjung Carat harus bagus.

"Paling utama nanti Pelabuhan Tanjung Carat itu harus terbangun, termasuk jalan menuju Tanjung Carat harus bagus," katanya.

Tidak hanya jalan yang harus bagus, Eddy juga menyebut akan dibangunnya jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat.





Ditegaskan Eddy jalan tol Lampung-Bakauheni ke Palembang, Palembang Jambi, Palembang Bengkulu harus selsai.

"Semua jalan tol ini harus selsai, lalu bagaimana caranya? Kan saya anggota DPR RI Komisi V, gampang bisa kita carikan solusinya," jelas Eddy.

Dia juga mengadakan tempat rekreasi bagi warga Palembang yang sudah lama menghilang. Misal akan dibuatnya pelataran mulai dari Jembatan Ampera terhubung ke Jembatan Musi VI, Seberang Ulu dan Seberang Ilir terhubung ke Jembatan Musi IV.

"Bisa jadi tempat rekreasi, bersepeda, jalan kaki, senam dan lainnya," sambung dia.

Tidak adanya tempat rekreasi, bisa dilihat saat ini anak-anak dan keluarga lebih memilih ke Mall karena tidak ada kebun binatang, tidak dunia fantasi.

"Jadi seorang gubernur harusnya bisa membangun itu," sambungnya.

Tidak hanya itu, seluruh Kabupaten/ Kota harus bisa menikmati air bersih, tidak hanya di Ibu Kota Kabupaten, dengan cara kerjasama antara Pemerintahan Provinsi dan perusahaan air bersih.

Jalan tol Lahat Pagaralam harus dipercepat, jika sebelumnya Lahat ke Pagaralam memakan waktu 1,5 jam akan dipersingkat menjadi 40 menit.

Diakui Eddy, menjadi kepala daerah sebaiknya jangan terlalu asyik hingga lupa diri dengan masa jabatan lima tahun. Hingga pada akhir masa jabatan baru menyadari tidak ada pembangunan saat menjabat sebagai kepala

daerah

"Jika terlalu asyik hingga tidak menyadari bahwa jelang akhir masa jabatan tidak ada pembangunan yang



Paling utama nanti Pelabuhan Tanjung Carat itu harus terbangun, termasuk jalan menuju Tanjung Carat harus bagus

dilakukan sehingga zonk," ulasnya.

Menjadi kepala daerah boleh pintar tapi jangan mengaku pintar, tidak akan

bisa menguasai masalah sehingga membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait lain.

Karena terlalu asyik dengan jabatan sehingga terjebak dalam kasus korupsi, perlu diingat bahwa jabatan ini adalah amanah yang diberikan oleh rakyat. Artinya harus diingat fungsi dan tugas pokok untuk mensejahterakan rakyat.

"Saya akan menempatkan orang-orang yang bertanggung jawab," sambungnya.

Jika ingin menyelesaikan masalah di Sumsel harus dimulai dari masalah yang besar sehingga masalah kecil akan mudah diselesaikan

"Mau jadi kepala daerah tapi tidak tahu apa yang akan dibuat, malu. Atau sudah tidak berhasil masih mau nyalon, kalau tidak berhasil ya sudah jangan maju lagi," tegasnya dengan lantang ●





HARGA PANGAN STABIL DALAM 2 BULAN

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa dalam satu hingga dua bulan ke depan harga pangan di tengah masyarakat dapat stabil.

"Perkiraan harga-harga pangan akan mulai stabil satu sampai dua bulan ke depan. Karena di April sudah mulai panen raya, sekarang harga sudah mulai berangsur stabil juga," kata Zulkifli Hasan di Lampung Selatan, Jumat, 8 Maret 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, fluktuasi harga pangan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir akibat mundurnya masa panen berbagai komoditas, sehubungan fenomena iklim El Nino yang terjadi pada tahun lalu.

"Harga pangan di pasar sudah mulai turun. Harga-harga ini mahal karena ada perubahan iklim, di mana Janu-

ari harusnya panen ternyata mundur di April-Mei karena fenomena iklim El Nino di September sampai Desember tahun lalu," ungkapanya.

Zulhas menjelaskan, akibat hal tersebut, maka produksi komoditas pangan banyak yang berkurang dan tidak bisa memenuhi kebutuhan, sehingga mengakibatkan fluktuasi harga.

"Karena El Nino produksi kurang, panen bergeser dan harga naik turun. Seperti beras dan jagung contohnya pasokan berkurang karena belum panen raya, meski sudah mulai turun sedikit demi sedikit," ucap dia.

Menurut dia, dengan segera datangnya musim panen raya berbagai komoditas, salah satunya padi di April mendatang, diharapkan dapat menjaga kembali stabilitas harga pangan.

"Beras ini sudah turun harganya tapi hanya sedikit, namun diharapkan panen raya ini bisa kembali stabil harga-harga. Kalau beras ingin yang harganya terjangkau ada beras SPHP dari Bulog," tambahnya.

Politikus asal Lampung ini mengatakan, menjelang Ramadhan dan Idul

Fitri 2024, diharapkan semua kebutuhan konsumsi masyarakat dapat terus terjaga.

"Saat Natal dan tahun baru kemarin kita bisa mengatasi ini dengan sukses. Semoga menjelang Ramadhan serta Idul Fitri kali ini bisa diatasi gejolak harga pangan agar stabil," sambungnya.

Zulhas juga menjamin stok kebutuhan pokok dan ketersediaan beras melimpah di tengah kenaikan harga menjelang bulan suci Ramadhan 2024. Meskipun harga masih tinggi, Zulhas mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir akan ketersediaan pasokan kebutuhan pokok.

Saat memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Kangkung, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Jumat, 8 Maret 2024, Zulhas bersama pejabat Pemkot dan Pemprov Lampung, berdialog dengan pedagang. Zulhas memastikan bahwa stok pangan mencukupi untuk kebutuhan selama Ramadhan 2024.

"Antisipasi menjelang Ramadhan ini yang terpenting adalah barang cukup. Ya kita lihat stok barangnya ada apa



enggak ternyata banyak. Jadi tidak usah khawatir, menjelang Ramadan, daging ayam banyak, telur, beras, cabai, dan bawang banyak,” kata Zulhas.

Mengenai kenaikan harga beras yang disebabkan oleh fenomena El Nino, Zulhas mengajak masyarakat untuk membeli beras impor milik Bulog, yang harganya tetap stabil. Dia juga mengeklaim pemerintah sedang berupaya membanjiri pasar dengan beras produksi Bulog untuk mengatasi lonjakan harga beras lokal.

“Bulog ada SPHP, ada beras premium Rp14.000-14.500 per kilogram ada barangnya. Kalau mau cari beras lokal ya memang barangnya kurang, karena kemarin musim kemarau,” kata Zulhas.

Zulhas juga mengeklaim terjadi stabilitas di beberapa harga kebutuhan pokok lainnya. Komoditas yang mengalami penurunan harga, di antaranya bawang putih, bawang merah, dan beras.

“Bawang putih harganya termasuk di bawah standar, Rp36.000 per kilogram. Bawang merah masih murah Rp30.000 per kilogram. Cabai turun Rp58.000 per kilogram,” ujar Zulhas.

Dalam kunjungannya, Zulhas juga memborong puluhan sak beras kemasan 5 kilogram untuk dibagikan gratis kepada warga. Warga rela berdesak-desakan untuk mendapatkan beras gratis dari Zulhas.

Siklus Tahunan

Pengamat Pertanian Center of Reform on Economic (CORE), Eliza Mardian, mengatakan, kenaikan harga pangan jelang Ramadan adalah siklus tahunan. Dia menilai, tren berulang yang terjadi setiap tahun seharusnya diantisipasi dari jauh-jauh hari.

“Kenaikan harga menjelang Ramadan ini memang menjadi siklus tahunan yang berulang setiap tahun. Ini semestinya diantisipasi jauh-jauh hari sebelumnya,” ungkap Eliza, Minggu, 10 Maret 2024.

Adapun sejumlah komoditas pangan yang belakangan mengalami tren kenaikan dan hingga kini masih berada di level harga yang cenderung mahal adalah beras, baik kualitas premium maupun medium. Kenaikan juga disusul oleh telur ayam, daging ayam, dag-

ing sapi, hingga cabai rawit merah dan cabai merah keriting.

Berdasarkan pantauan dari Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu, 10 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, secara rata-rata nasional, harga beras premium berada di angka Rp16.470 per kilogram dan beras medium Rp14.360 per kilogram.

Kemudian, komoditas telur ayam ras berada di harga rata-rata Rp31.630 per

pada peningkatan biaya produksi.

“Untuk menjaga agar petani untung, maka petani harus meningkatkan harga jual gabahnya. Jadi, beras naik, karena gabah di level petani naik,” jelas Eliza.

Kondisi ini semakin diperparah dengan fenomena iklim El Nino. Kemudian, berbarengan juga dengan momentum pesta demokrasi dan puasa Ramadhan, yang semakin meningkatkan ke-



kilogram, daging sapi Rp135.990 per kilogram, daging ayam ras Rp38.390, cabai merah keriting Rp65.050 per kilogram, dan cabai rawit merah Rp63.020 per kilogram.

Eliza menilai, kenaikan harga beras merupakan akumulasi dampak dari berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari kebijakan mengurangi BBM subsidi yang berdampak pada harga BBM, biaya transportasi dan upah tenaga kerja yang terkerek, hingga pengurangan pupuk bersubsidi yang berdampak

butuhan pangan di level konsumen.

Eliza menambahkan, harga daging ayam, telur ayam dan komoditas lainnya memang konsisten mengalami tren kenaikan dari tahun ke tahun.

“Secara pola tahunan memang harga akan cenderung naik di awal tahun dan nanti akan melandai atau turun pada Maret-April. Kemudian, akan naik kembali pada Juni-Juli dan melandai turun mulai bulan Agustus. Setelahnya, naik lagi pada November-Desember. Ini karena pola budidaya,” terangnya. •

PASOKAN BERAS AMAN HINGGA LEBARAN

Kementerian Pertanian memastikan kebutuhan beras pada Maret, April hingga Mei 2024 dalam kondisi aman, sehingga masyarakat tak perlu khawatir akan kekurangan pangan selama Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

// nsya Allah sesuai dengan data BPS (Badan Pusat Statistik), kebutuhan beras kita untuk Maret, April, dan Mei dalam kondisi aman. Akan tetapi untuk kebutuhan bulan Juni kita bisa menghitung dari pertanaman sekarang (Maret),” kata Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, di Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2024.

Amran mengatakan, kepastian itu merujuk pada data BPS terkait panen raya petani yang berlangsung pada Februari dan Maret tahun ini.

Menurut Amran, sedikitnya pertanaman 1 juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang, terutama untuk mengamankan stok beras di tiga bulan ke depan. Hitungan pertanamannya adalah Maret 1 juta Ha, April 1 juta Ha, dan Mei 1 juta Ha.

“Kita harus menanam minimal 1 juta Ha per bulan, kalau 1 juta Ha per bulan berarti produksinya bisa 3 juta sampai 3,5 juta ton. Sedangkan kebutuhan kita hanya 2,5 juta ton. Artinya beras kita surplus,” ujar Mentan.

Amran juga mengatakan bahwa produksi yang melimpah pada tahun ini kurang lebihnya akan memberi pengaruh besar pada pe-

nurunan harga beras di pasaran. Meski demikian, dia berharap penurunan tersebut tidak terjadi pada hasil panen raya gabah petani.

“Maret harga beras pasti turun. Aku pastikan turun. Kalau ada yang bilang beras mahal hari ini sudah turun, aku pastikan turun dan Ramadan aman, Idul Fitri aman, lewat dua bulan Idul Fitri masih aman. Nah, kalau mengatakan Juni kita lihat tanam hari ini,” katanya lagi.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhammad Suyamto, juga memastikan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama bulan Suci Ram-

adan hingga Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah.

“Stok cadangan beras pemerintah yang dikuasai Bulog saat ini ada 1,4 juta ton, dan juga masih ada sisa kuota penugasan impor tahun ini sebanyak 1,5 juta ton. Jadi, jumlahnya sangat cukup untuk kebutuhan penyaluran kebutuhan selama puasa dan Lebaran,” kata Suyamto.

Bahkan menurut Suyamto, stok beras yang saat ini ada di gudang Bulog mampu memenuhi kebutuhan penyaluran beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang disalurkan ke pasar induk, pasar tradisional dan ritel modern. Kemudian stok beras Bulog juga mampu untuk memenuhi penyaluran bantuan pangan beras yang menasar 22 juta keluarga penerima manfaat yang direncanakan hingga Juni 2024.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Suwandi, menjelaskan, potensi produksi beras nasional dari hasil panen raya yang akan berlangsung pada Maret-April 2024 diprediksi mencapai 8,46 juta ton, sehingga pasokan beras dalam negeri hingga Ramadhan 1445 Hijriah dipastikan aman.

“Produksi beras awal tahun 2024 ini mencukupi kebutuhan nasional. BPS telah merilis data perkiraan produksi beras Maret-April sebesar 8,46 juta ton. Total produksi beras ini cukup besar, mampu m e n -



cukupi kebutuhan nasional,” tegas Suwandi, Sabtu, 2 Maret 2024.

Suwandi menuturkan, sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kementan fokus meningkatkan produksi padi dan jagung melalui tiga strategi, yakni meningkatkan perluasan areal tanam (PAT), peningkatan indeks pertanaman (PIP) serta produktivitas.

“Langkah yang dilakukan adalah gerakan percepatan tanam, pompanisasi sungai pada lahan kering dan tadah hujan, sumur dangkal dan sumur dalam untuk memasok air, optimalisasi lahan rawa, juga menyelesaikan masalah langsung di lapangan dan hadir di tengah-tengah petani,” jelasnya.

Sementara itu, Deputy Bidang Statistik Produksi BPS, M Habibullah, mengatakan potensi produksi beras nasional pada Maret diperkirakan mencapai 3,54 juta ton dan April sebesar 4,92 juta ton.

la menyebut produksi beras pada Maret 3,54 juta ton ditopang sekitar 87 persen oleh 10 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa barat, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.

Sementara potensi produksi beras April sebesar 4,92 juta ton sekitar 80 persen tersebar di 10 provinsi yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Banten, Aceh, dan Sumatera Utara.

la menerangkan potensi produksi beras Jawa Timur sebesar 840,94 ribu ton, Jawa Tengah sebesar 819,03 ribu ton, dan Jawa Barat sebesar 358,61 ribu ton.

“Kalau kita lihat secara detil, kabupaten/kota dengan potensi produksi beras relatif besar pada Maret 2024 antara lain ada di Banyuasin Sumatera Selatan, Lamongan Jawa Timur, dan di Grobogan Jawa Tengah,” jelas Habibullah.

Kemudian untuk panen pada April, potensi produksi beras terbesar terdapat di Jawa Timur sebesar 1,08 juta ton, Jawa Tengah 893,28 ribu ton, dan Jawa Barat sebesar 734,79 ribu ton.

“Sementara kabupaten dengan potensi produksi berasnya besar yaitu Indramayu 114,53 ribu ton, Cilacap

102,05 ribu ton dan Oku Timur 94,14 ribu ton,” ujar Habibullah.

Percepatan Tanam

Dalam Rapat Koordinasi bersama kepala dinas pertanian provinsi dan kabupaten/kota di Jakarta, 9 Maret 2024, Amran Sulaiman juga mengingatkan semua pihak untuk segera turun ke sawah atau percepatan tanam sebagai upaya meningkatkan produksi pangan demi mencapai swasembada pangan.

“Saudara sekalian, Merah Putih memanggil kita semua. Segera turun ke sawah memastikan pertanaman, kita tidak bisa menunda lagi,” kata Amran.

Amran menegaskan, tidak ada waktu

“Merah putih memanggil kita semua. Segera turun ke sawah memastikan pertanaman dan lakukan pompanisasi,” tegas Amran.

Mentan juga berharap bendungan dan embung yang dapat dipompa segera lakukan, khususnya yang ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Banten.

“Kami siapkan pompa. Kami harapkan segera memulai percepatan tanam. Saat ini Tim Satgas Darurat Pangan telah terbentuk dan turun ke lapangan,” tutur Amran.

Menurutnya dengan adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan target swasembada pangan Indonesia



untuk ditunda lagi dalam mempercepat proses tanam. Lebih dari 700 pejabat pertanian dari seluruh Indonesia hadir dalam rapat tersebut untuk mendengarkan arahan dan strategi yang akan diterapkan.

Amran juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan Kepolisian dalam mengejar target pertanaman. Dia menekankan perlunya bersinergi untuk menutup defisit produksi yang terjadi pada tahun sebelumnya akibat fenomena alam El Nino yang berkepanjangan.

Dalam upaya memastikan kelancaran proses tanam, Amran juga mendorong penggunaan sistem pompanisasi di lahan pertanian. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dan mempercepat proses pertumbuhan tanaman.

dapat tercapai dalam waktu yang lebih cepat dan efisien. Semua pihak diharapkan dapat bersatu dalam menjawab panggilan Merah Putih untuk memperkuat ketahanan pangan negara.

Kementerian Pertanian menggalakan program pompanisasi sungai untuk 1 juta hektare di 500 ribu hektare lahan wilayah Pulau Jawa, dan 500 ribu hektare lahan di luar Pulau Jawa. Selain itu optimalisasi lahan sehingga mampu menambah produksi.

“Kami meminta gunakan padi gogo atau padi ladang. Saat ini optimasi lahan rawa juga kita perkuat. Ayo kita ganden-gan tangan turun ke sawah, merah putih memanggil,” tutur Amran.

Amran optimistis bila hal tersebut dilakukan, maka Indonesia akan lolos dari ancaman krisis pangan dan membantu negara lain di dunia. ●

KUA UNTUK SEMUA AGAMA

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan gagasan menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan semua agama. Gagasan ini bertujuan memberikan kemudahan masyarakat mengakses layanan yang diberikan pemerintah, terutama bagi masyarakat dengan keterbatasan akses. Namun, gagasan ini menuai pro kontra dari sejumlah pihak.

// ntinya, Kemenag berkeinginan menjadikan KUA sebagai pusat layanan semua agama untuk mempermudah masyarakat yang selama ini punya keterbatasan memperoleh akses,” ujar Gus Men, sapaan Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

“Bayangkan, saudara kita non muslim selama ini melakukan pencatatan nikahnya itu di Dukcapil, bagaimana jika tinggal jauh dan harus datang ke ibu kota kabupaten atau kota untuk mencatatkan pernikahan, bayangkan berapa waktu dan biaya yang dibutuhkan. Nah, kita bantu dengan KUA yang kita jadikan hub (pusat pelayanan) atas pencatatan nikah. Artinya KUA jadi hub untuk dukcapil,” sambung dia.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Yaqut menilai perlu ada perubahan UU 24/2014 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satunya terkait pencatatan nikah.

“Kalau bisa itu jauh lebih bagus. Namun jika perubahan UU tersebut sulit dilakukan, nanti kita akan menawarkan MoU dengan Kemendagri untuk menjadikan KUA sebagai pusat pencatatan nikah,” ucap Yaqut.

Meski demikian, Gus Men menekankan bahwa layanan KUA tidak terbatas

pada layanan pernikahan.

“Tapi intinya, layanan untuk umat beragama itu kan tak hanya pernikahan, banyak layanan lain yang bisa didapatkan umat nanti di KUA,” kata Menag.

Terkait pro kontra atas gagasan ini, Gus Men mengatakan, setiap orang bisa dan boleh berpendapat. Namun, gaga-

nah, Zainal Mustamin, mengatakan, pihaknya telah memetakan 40 layanan keagamaan yang potensial untuk disediakan di KUA. 40 jenis layanan ini masih potensial dan perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Ditjen Bimas selain Islam untuk memilih layanan yang benar-benar dapat diimplementasikan di KUA.



san ini dibuat untuk mengakomodir keperluan masyarakat sehingga mempermudah pemerintah memberi pelayanan kepada mereka.

“Ini adalah gagasan yang kita berikan agar warga negara mendapat kemudahan terhadap pelayanan dari negara. Kedua, warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama apapun latar belakangnya,” jelasnya.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Saki-

Kasubdit Bina Keluarga Sakinah, Agus Suryo Suropto, menambahkan, ada sejumlah layanan lintas agama yang dapat segera dijalankan di KUA. Misalnya, bimbingan perkawinan dan konsultasi keluarga bagi Non Muslim.

“Ada beberapa layanan yang dapat segera dilaksanakan di masyarakat, yakni bimbingan perkawinan bagi pemeluk agama Non Islam dan konsultasi keluarga bagi pemeluk agama Non Islam,

yang dilakukan oleh masing-masing penyuluh agama,” terangnya, Jumat, 1 Maret 2024.

Agus Suryo berharap, program transformasi KUA ini dapat meningkatkan toleransi dan kerukunan anta-rumat beragama di Indonesia. KUA akan menjadi tempat yang nyaman bagi semua masyarakat untuk mendapat layanan keagamaan yang dibutuhkan.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi, mengatakan pihaknya akan mencermati rencana revitalisasi KUA menjadi sentra pelayanan keagamaan bagi semua agama dari aspek esensi dan praktik yang terjadi di berbagai negara.

“Saat ini akan kita cermati dari aspek esensi dan praktik-praktik yang terjadi di berbagai negara di dunia,” ujar Teguh melalui keterangan tertulisnya, Sabtu, 2 Maret 2024.

Tak hanya itu, Kemendagri juga menaruh atensi pada sisi hukum hingga asas kebermanfaatannya bagi masyarakat. Dia pun ikut mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak terkait rencana itu.

“Pastinya dari Kemendagri inginnya yang terbaik bagi masyarakat, negara dan bangsa,” tegasnya.

Kendati demikian, Teguh enggan menjelaskan lebih detail terkait rencana Kementerian Agama bersama Kemendagri berkoordinasi untuk melakukan penyesuaian maupun penataan regulasi usulan KUA bagi semua agama.

Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Dhahana Putra, menyebutkan rencana Kemenag menjadikan KUA sebagai pusat layanan bagi semua agama membutuhkan kajian. Menurutnya, wacana Kemenag merupakan terobosan yang baik, karena menjadi upaya memudahkan warga negara mengakses layanan.

Meski demikian, Dhahana mengingatkan bahwa pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan kajian menyel-

luruh mulai dari regulasi, birokrasi, hingga sosiologis. Menurutnya, realisasi rencana Kementerian Agama itu membutuhkan kerja-kerja praktis yang tidak mudah atau sederhana. Dalam hal birokrasi misalnya, umat kristen, budha, katolik, konghucu, hindu, dan penghayat kepercayaan dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Di sisi lain, beberapa aturan mengenai pernikahan juga menjadi tantangan tersendiri bagi KUA jika rencana Kemen-



terian Agama itu akan dilaksanakan.

Dhahana lantas menyatakan pihak Ditjen HAM siap untuk menjadi rekan dialog bagi Kementerian Agama untuk merevitalisasi KUA jika memang revisi beberapa aturan dibutuhkan.

Dhahana juga mengakui pihaknya sedang menyiapkan parameter HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ditjen

HAM bakal menggunakan sejumlah indikator parameter HAM seperti, kesetaraan, inklusivitas, non-diskriminasi, dan aksesibilitas pelayanan. Ia juga mengingatkan agar para pemaku

kepentingan membangun komunikasi yang intens sehingga tidak membuat masyarakat salah paham.

“Yang juga tidak kalah penting, dalam pembahasan revitalisasi KUA itu mungkin juga perlu mendengarkan aspirasi stakeholders terkait khususnya organisasi-organisasi keagamaan,” tutur Dhahana.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mendukung penuh usulan Kemenag menjadikan KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama.

“Pak Menteri Agama, kan sudah beri penjelasan dan saya dukung penuh itu. Namanya saja KUA, Kantor Urusan Agama, bukan Kantor Urusan Agama tertentu. KUA bukan KUI, karena itu kalau semua agama mendapatkan pelayanan yang sama di satu kantor, itu saya kira bagus,” kata Muhadjir, Rabu, 28 Februari 2024.

Muhadjir mengatakan, pelaksanaan nikah di KUA dapat dilaksanakan sesuai aturan masing-masing agama. Bahkan, dirinya mendorong agar KUA memiliki tempat yang representatif untuk menyelenggarakan resepsi.

“Di beberapa daerah saya lihat juga sudah ada aulanya, untuk acara resepsinya di samping gedung misalnya. Saya kira lebih praktis, lebih simpel,” ujar Muhadjir.

Dukungan senada juga muncul dari Ketua MPR, Bambang Soesatyo, yang meminta Kemenag untuk mengoptimalkan rencana pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama tersebut, utamanya dalam hal integrasi data-data pernikahan dan perceraian agar bisa dilakukan dengan lebih baik.

Ia juga mengapresiasi Kemenag yang mengupayakan kemudahan akses bagi seluruh umat beragama di Indonesia melalui keberadaan KUA.

“Semoga KUA dapat sepenuhnya sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama,” kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta Kemenag untuk berkoordinasi dengan seluruh pemuka agama di Indonesia terkait rencana tersebut. “Agar ke depannya bisa dilakukan penyesuaian fungsi KUA tanpa harus mengganggu ketentuan yang berlaku di masing-masing agama,” pesannya. ●



DARI DATA TURUN KE PARTISIPASI

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar berkunjung ke Bengkulu. Berbicara tentang akurasi dan partisipasi pembangunan desa, tentu saja Gus Halim mengangkat isu ini bukan hanya untuk provinsi tuan rumah.

Toh Bengkulu sebagai provinsi bolehlah menjadi benchmark, patokan, dalam konteks Indeks Desa Membangun (IDM) yang memiliki peringkat kategori mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Pada 2023, Bengkulu menjadi provinsi dengan IDM 0,69. Berada di peringkat 21 dari 38 provinsi, Bengkulu tepat berada di angka rata-rata nasional IDM pada 2023 dengan status berkembang.

Ada 20 provinsi dengan nilai lebih tinggi dari Bengkulu, dan 18 provinsi lain dengan nilai IDM lebih rendah. Sebut saja Sumatera Selatan (0,6894), dan Banten (0,6803) yang sama-sama berada dalam kategori IDM berkembang dan berjarak relatif dekat, bahkan berte-tangga dengan Bengkulu. Dengan konteks itu, Mendes Gus Halim tampak jelas ingin mendorong agar provinsi dengan IDM kategori berkembang segera naik peringkat ke status maju dan mandiri.

IDM merupakan indikator yang kom-prehensif yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, in-frastruktur, dan partisipasi masyarakat. Dalam mengukur kinerja desa, IDM memberikan gambaran yang holistik tentang tingkat kesejahteraan dan ke-majuan yang telah dicapai. Salah satu dampak positif dari IDM adalah identi-fikasi kebutuhan dan prioritas pemban-gunan desa.

Dengan menggunakan IDM, pemer-intah dan pemangku kepentingan

dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan program pem-bangunan yang lebih efektif dan efisien. Kritik terhadap IDM ini antara lain adalah akurasi data, selisih perbedaan antara

desa, hingga menentukan arah tujuan pencapaian visi dan misi desa.

Hal itu sangat efektif dalam mengim-plementasikan rencana tahunan desa, maupun Rencana Pembangunan Jang-ka Menengah Desa (RPJMD) secara berkesinambungan. "Data ketika bicara pada level desa itu pasti kita bicara data mikro, bukan data makro. Sementara di



catatan dengan kenyataan di lapangan.

Begitulah maka, dalam acara Gala Dinner bersama Gubernur Bengkulu, yang diwakili oleh Sekda Provinsi Beng-kulu, Isnan Fajri, maka Mendes Abdul Halim Iskandar mengemukakan akurasi data desa akan memudahkan pemer-intah desa (Pemdes) merencanakan kebijakan pembangunan. Mulai dari pokok-pokok kebijakan pembangunan

dalam pembangunan, kunci ketepatan perencanaan, itu satu-satunya tidak ada yang lain yaitu data, data, dan data," ungkap menteri yang akrab disapa Gus Halim dalam acara Gala Dinner yang berlangsung Kamis malam, 7 Maret 2024.

Data paling riil dan terbaru, lanjut Gus Halim adalah data yang berbasis desa. Sebab skalanya mikro dan berkiblat

pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) Desa yang selama ini dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Data berbasis SDGs Desa tersebut adalah pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang sangat detail dan lebih rinci. "Inilah yang terus menjadi tugas kita semua, agar data mikro pada level desa betul-betul bisa terpenuhi. Sehingga paradigma pembangunan secara perlahan-lahan kita lakukan proses transformasi dari membangun berdasarkan keinginan, menjadi membangun berdasarkan masalah," papar Profesor Kehormatan UNESA ini.

Gus Halim meyakini, langkah itu akan mendorong Pemdes untuk meningkatkan akurasi data dan informasi desa secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam data tersebut, kata Gus Halim, juga berisi catatan numerik dan data deskriptif yang menggambarkan kondisi warga secara riil dan komunal, tentang masalah warga di masing-masing desa.

"Itu yang harus terus kita lakukan. Dan data itu akan maksimal dan optimal, ketika keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat semakin ditingkatkan," jelas Gus Halim.

Apakah provinsi dengan status IDM berkembang dan kategori di bawahnya menunjukkan tanda-tanda akurasi data pembangunan desanya rendah? Boleh jadi jika melihat begitu banyak masalah dalam pencatatan data Pemilu 2024 misalnya. Jangankan di provinsi dengan status IDM berkembang, di provinsi dengan IDM maju dan mandiri pun akurasi data perlu perhatian meskipun tingkat atau skalanya lazimnya lebih kecil.

Kaitan antara data dengan pembangunan desa adalah akurasi yang tinggi akan memudahkan peningkatan partisipasi warga dalam membangun wilayahnya, dan karena itu kesejahteraannya. Masih di Bengkulu, Gus Halim pun mengingatkan partisipasi seluruh warga desa menjadi kunci dalam mempercepat keberhasilan pembangunan desa.

Dengan partisipasi warga yang tinggi, pengambilan suatu kebijakan publik akan lebih terjamin kuantitas dan kualitasnya. Alhasil, sambung Mendes Gus Halim, partisipasi yang tinggi berbuah

kepastian bahwa tidak ada satu pun persoalan dan kebutuhan warga yang ditinggalkan dalam pembangunan desa.

"Kunci dari keberhasilan pembangunan di desa, mulai dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, maupun dari sisi pengawasan ini kuncinya kalau kita melibatkan partisipasi masyarakat," ungkap Gus Halim dalam Rapat Koordinasi Pendampingan Tenaga Pendamping Profesional Provinsi Bengkulu, siang hari sebelum acara Gala Dinner.

Perencanaan pembangunan desa disebut baik apabila prosesnya melibatkan partisipasi kelompok-kelompok penting masyarakat desa. Dengan keterlibatan itu, masyarakat akan tahu skala prioritas kebutuhan yang dituangkan dalam program serta akan berperan aktif pada proses pelaksanaan dan monitoring hasil pembangunan secara

dengan itu, terbangun pula kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa.

Melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendidikan masyarakat, agar mereka dapat memahami pentingnya partisipasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi. "Dan hanya di desa, yang kita bisa melakukan upaya partisipasi masyarakat secara lebih maksimal, hanya di desa," tegas Gus Halim.

Gus Halim berharap dari partisipasi masyarakat secara total itu dapat mendorong pemerataan dan kesetaraan dalam akses dan pemanfaatan sumber daya. Selain itu, melalui partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan dan terpinggirkan.

Dengan demikian, pemerataan akses



bertahap.

Terbukti sejak 2014, kinerja transparansi pemerintah desa telah membaik, melalui penyampaian hingga berbagi informasi secara lebih luas dan terjangkau. "Bicara tentang pemberdayaan, pasti selalu berbicara tentang peningkatan partisipasi masyarakat desa. Tidak mungkin kita ngomong pemberdayaan tanpa peningkatan partisipasi masyarakat," kata Gus Halim.

Dalam membangun, sambungnya, kita harus terus berupaya agar tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi dan semakin maksimal. Bersamaan

terhadap infrastruktur, layanan publik, dan sumber daya dapat tercapai. Sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. "Level atasnya sudah tidak bisa lagi, level kabupaten ngomong partisipasi pasti cenderung representatif. Bukan keterlibatan secara total," tandasnya.

Nah, dalam konteks pembangunan desa, peringkat IDM 2024 masih dalam proses penilaian. Hasilnya sekaligus menjadi catatan untuk kinerja Kementerian Desa PDTT sepanjang 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin. •



AGENDA WISATA DI TAHUN POLITIK

Ingar-bingar politik silakan berlanjut, agenda pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga jalan terus. Ramadan? Tentu saja bukan halangan.

Demikianlah maka pada pertengahan Maret 2024, sudah terjadwal penyelenggaraan festival Arakan Sahur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Salahuddin Uno digadang-gadang akan hadir di kabupaten yang beribu kota di Kuala Tungkal itu.

"Ya, kehadiran Bapak Menteri Parekraf dalam rangka memenuhi undangan pembukaan Festival Arakan Sahur 2024," kata Rengga Sekarsari, Kabid Pariwisata di Dinas Pariwisata Parpora di Kuala Tungkal, Senin, 11 Maret 2024.

Rengga juga mengemukakan, jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah siap menyambut kedatangan Sandi. Terlebih lagi, Festival Arakan Sahur kali ini sudah menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN).

"Jadi, sebelumnya hanya Festival Arakan Sahur saja, tapi pada 2024 ini akan kita buat banyak berbagai rangkaian kegiatan," sambungnya. Antara lain, kata Rengga, Bazar Ramadan Ekonomi Kreatif dan berbagai lomba serta acara di ruang terbuka.

Oya, pembukaan Festival Arakan Sahur ini terjadwal pada Minggu malam, 17 Maret 2024. "Kita menyesuaikan dengan jadwal Bapak Menteri karena beliau bisa hadir pada hari itu," ungkapnya.

Toh sudah ada acara sebelum Sandi datang. Bazar Ramadan terjadwal pada 15-19 Maret 2024 di Alun-alun Kuala Tungkal. Selain event yang bernuansa Ramadan, rupanya Festival Arakan Sahur di Tanjung Jabung Barat ini juga menghadirkan seni barongsai yang berlatar etnis Tionghoa.

Terkait barongsai dalam konteks KEN 2024, Menteri Sandi sudah hadir di Singkawang, Kalimantan Barat, dalam rangka Festival Cap Go Meh, sekitar sepekan setelah hari H Pemilu yang jatuh pada 14 Februari 2024.

Sempat muncul kekhawatiran Festival Cap Go Meh di Singkawang pada 2024 ini terimbas oleh rangkaian kegiatan Pemilu 2024. Namun, Kemenpar mendorongnya dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional tahunan serangkaian dengan festival. Alhasil, Festival Cap Go Meh 2024 tetap berlangsung meriah.

Alhasil, Sandi angkat jempol untuk penyelenggaraan Festival Cap Go Meh di Singkawang. Meski lebih sederhana karena berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu 2024, festival itu sanggup menghadirkan warga setempat serta wisata-

wisata alam dan wisata budaya, kita juga mempunyai daya tarik wisata event. Ini tidak kalah dengan konser musik artis top,” kata Sandi kepada media di Singkawang, Sabtu, 24 Maret 2024.

“Kalau konser Taylor Swift di Singapura bisa memunculkan Swiftnomics, yang akan mendatangkan pengunjung dari berbagai negara Asia ke Singapura, saya rasa ini juga bisa dibuat sebagai Singkawangnomics. Cap Go Meh di sini memiliki daya tarik yang luar biasa, bisa mendatangkan wisatawan asing dari mana-mana dan wisatawan domestik dari daerah lain,” ujar Sandi.

tem parekraf di Singkawang diperkuat, karena sudah ada bandara. Juga nanti kalau traffic studynya memungkinkan pembangunan jalan tol, akan dipertimbangkan dan akan ada pengaturan travel pattern-nya,” kata Sandi.

Ia juga mengundang diaspora Singkawang untuk berinvestasi terkait pengembangan parekraf di sana. “Banyak diaspora Singkawang, yang sukses bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, akan kita ajak untuk berinvestasi hotel dan penginapan di Singkawang,” kata Sandi.

Sebagai catatan, Cap Go Meh Sing-



wan domestik maupun turis asing.

Jadi, Singkawang tetap ramai pengunjung pada pekan keempat Februari 2024 itu. Indikasinya, tingkat hunian hotel-hotel di Singkawang mendekati 100 persen, penerbangan dari Jakarta ke Pontianak juga penuh. Tambahan pula rental kendaraan tak kalah laris ordernya.

“Ini bukti betapa luar biasanya Cap Go Meh di Singkawang. Ternyata, selain

Masalah yang kemudian muncul, perjalanan dari ibu kota Kalbar Pontianak ke Singkawang menjelang Cap Go Meh menjadi semakin padat. Toh ada rencana mengoperasikan Bandara Singkawang dan pembangunan jalan tol dari Pontianak ke Singkawang. Tujuannya tentulah menghemat waktu perjalanan yang sekitar empat jam dari normalnya dua jam saja.

“Akan saya sampaikan bahwa ekosis-

kawang merupakan festival unggulan pertama dari 10 agenda KEN 2024. Sembilan agenda unggulan KEN 2024 lainnya adalah Pesta Kesenian Bali (15 Juni–13 Juli 2024), Semasa Piknik Jakarta (5–7 Juli 2024), F8 Makassar (24–29 Juli 2024), Jember Fashion Carnaval (1–4 Agustus 2024), Festival Budaya Lembah Baliem (7–10 Agustus 2024), Festival Pacu Jalur Tradisional (20–25 Agustus 2024), Dieng Culture Festival

• INFO NASIONAL

(23–25 Agustus 2024), Wayang Jogja Night Carnival (7 Oktober 2024), Indonesian Contemporary Art & Design, ICAD (10 Oktober–10 November 2024).

Yang menjadi agenda unggulan biasanya dapat mengundang wisatawan mancanegara lebih banyak dari festival KEN lain yang pada 2024 ini mengendakan 110 festival secara keseluruhan. Toh untuk Maret 2024 saja, sudah

hari ini menandai kemenangan kebaikan (dharma) atas kejahatan (adharma) dan menyambut kembalinya roh leluhur ke alam duniawi.

Tiang-tiang bambu menjulang tinggi yang dihiasi dengan persembahan, yang disebut “penjor,” berjejer di jalanan, melambangkan hubungan antara dunia fisik dan spiritual. Tarian tradisional, upacara pura yang rumit, dan per-

Nyepi ini Bali menjadi sunyi saat Nyepi. Ini adalah festival penting Hindu Bali yang dirayakan pada hari setelah bulan gelap ekuinoks musim semi, dan menandai awal Tahun Baru Bali. Periode 24 jam Nyepi diisi dengan introspeksi dan pemurnian. Implikasinya, Bali tanpa lampu dan nyala api, kebisingan, atau perjalanan. Jalanan menjadi sangat sunyi, bisnis tutup, dan bahkan bandara tanpa penerbangan. Ada yang menganggap Nyepi merupakan pengalaman wisata spiritualitas Bali yang mendalam dan menyaksikan rasa hormat penduduk pulau yang mendalam terhadap tradisi dan kedamaian batin.

Sabang Marine Festival

Sabang Marine Festival 2024 berlangsung pada 1–3 Maret di Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pada 2024, festival ini terpilih untuk kedua kalinya masuk dalam agenda KEN. Kali ini slogan festival di Sabang adalah “Perayaan Budaya Bahari Terbesar di Aceh”.

Event di ujung barat Indonesia ini diinisiasi oleh Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, serta pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mempromosikan potensi bahari, pariwisata dan ekonomi kreatif Kota Sabang. Event yang rutin berlangsung sejak 2015 ini awalnya dikhususkan untuk menyambut para yachter (kapal layar wisata) yang berlabuh di Kota Sabang. Namun, kini konsep pelaksanaan event SMF sudah berubah menjadi sebuah festival pesta rakyat yang dinanti-nantikan banyak pengunjung.

Batam Wonderfood & Art Ramadhan

Berlangsung selama bulan suci Ramadhan, festival ini merupakan sebuah bazar yang memadukan masakan lezat, pertunjukan budaya, dan kompetisi menarik. Festival keagamaan yang merupakan acara tahunan ini, yang kini memasuki tahun kelima, merupakan daya tarik yang signifikan bagi penduduk lokal dan wisatawan.

Pengunjung dapat menikmati beragam kuliner, mulai dari masakan tradisional Indonesia hingga makanan



banyak agenda wisata yang dapat memikat wisatawan:

Festival Galungan dan Nyepi, Bali

Hari Raya Galungan memiliki siklus 210 hari sekali menurut kalender Pawukon Bali. Galungan penuh dengan warna-warni dan perayaan yang menggembirakan. Perayaan sepuluh

temuan keluarga memenuhi suasana dengan semangat pembaruan dan rasa syukur. Pada 2024, Festival Galungan terjadwal antara 28 Februari 2024 – 9 Maret 2024.

Usai Galungan, munculah Hari Nyepi. Nyepi 2024 berlangsung pada 11 Maret, mulai pukul 06.00 pagi selama 24 jam hingga esok harinya. Pada masa

modern yang trendi. Selain makanan, acara ini menawarkan suasana yang meriah dengan pertunjukan musik dan tari tradisional, pembacaan puisi, dan bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan dan kerajinan klasik.

Ini adalah salah satu festival paling terkenal yang unik karena budaya dan tradisi lokalnya. Sebagai bagian dari Kharkisma Event Nusantara (KEN) 2024, perayaan ini menjanjikan peristiwa penting dan pengalaman Ramadan yang tak terlupakan. Pada 2024, acara pembukaan berlangsung pada 9 Maret 2024 di Taman Dang Anom, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Event ini berlangsung sepanjang bulan Ramadhan 9-30 Maret 2024 dan tersebar di tiga lokasi yaitu Taman Dang Anom, Pollux Habibie, dan Taman Pacific. Rangkaian dari event ini antara lain bazaar kuliner dan ekraf, kesenian bernuansa islami, fashion show, kesenian melayu, community gathering, dan shalat tarawih berjamaah.

Festival Arakan Sahur

Bertempat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi, Indonesia, Festival Musik Arakan Sahur adalah tradisi unik dan penuh warna yang dirayakan selama bulan suci Ramadhan. Acara tahunan yang diterjemahkan menjadi "Parade Sahur" ini menampilkan ratusan peserta berkumpul untuk memulai prosesi budaya dan tradisi yang meriah melalui jalan-jalan.

Kendaraan berhias yang membawa warga, seringkali mengenakan pakaian tradisional, memenuhi udara dengan

nyanyian keagamaan, doa, dan musik tradisional Melayu yang dimainkan dengan alat musik seperti kompang (gendang) dan rebana (frame drum). Suasana meriahnya merupakan salah satu semangat kebersamaan masyarakat

siapkan puasa hari itu. Festival ini dirayakan di Indonesia sebagai pengingat keagamaan dan merayakan warisan budaya lokal, menarik banyak orang dan menumbuhkan rasa kebersamaan selama Ramadan.



Pesta Adat dan Budaya Lom Plai

Pesta Adat dan Budaya Lom Plai adalah festival tradisional suku Dayak Wehea di Kalimantan Timur, Indonesia. Merupakan perayaan syukur atas hasil panen dan doa agar panen baik di tahun mendatang.

Festival ini biasanya diadakan pada Mei atau Juni setelah panen padi. Namun pada 2024 berlangsung pada Maret. Pesta Adat dan Budaya Lom Plai merupakan bagian penting dari budaya Dayak Wehea. Ini merupakan perayaan budaya bagi masyarakat untuk mengungkapkan rasa syukur atas hasil panen dan mendoakan kebaikan hasil usaha pada tahun mendatang.

Suku Dayak Wehea menggelar pesta adat tahunan ini untuk mengungkapkan rasa syukur, penyucian, hingga harapan. Nuansa budaya dayak yang menjaga kuat warisan leluhurnya terasa kental dalam pesta adat ini.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pun memasukkan Pesta Adat Lom Plai sebagai festival budaya yang jadi agenda rutin kebudayaan setiap tahun dan telah masuk dalam Karisma Event Nasional (KEN). KEN merupakan strategi kolaborasi Kementerian Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan Parekraf. •

SETELAH JAKARTA BUKAN IBU KOTA

Pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) berimplikasi luas. Bagaimana Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota?

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, perlu landasan hukum yang jelas tentang Jakarta. Salah satu yang mendesak adalah penentuan statusnya sebagaimana yang menjadi pembahasan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah berharap pemba-

hasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) dapat segera diselesaikan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan keberadaan Ibu Kota Jakarta sehingga statusnya jelas.

"Kita harus konsisten dengan amanat dalam UU IKN (Ibu Kota Negara), UU Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 41 ayat 2, yang mengamanatkan bahwa revisi UU Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah UU IKN diundangkan," ujarnya pada Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI dengan agenda Pembahasan RUU tentang Provinsi DKJ di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Mendagri mengemukakan, UU IKN sudah disahkan pada 15 Februari 2022, sehingga revisi UU tentang DKJ mestinya telah selesai pada 15 Februari 2024.

Karena itu, Mendagri mendorong DPR RI agar segera menyelesaikan pembahasan revisi regulasi tersebut.

Sejauh ini Kemendagri telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR RI pada Januari 2024. Namun pembahasan itu diundur karena pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari.

Apabila pada masa sidang DPR ini pembahasan berlangsung, diharapkan revisi dapat segera rampung. Waktu yang tersedia hingga masa sidang selesai adalah sekitar satu bulan hingga 4 April 2024.

Mendagri menyampaikan, upaya penyelesaian itu dapat dilakukan dengan bekerja maraton baik oleh Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin) dengan membahas satu per satu DIM. Jika langkah itu diterapkan, Mendagri Tito optimistik revi-



si UU tentang Provinsi DKJ dapat segera diselesaikan, sehingga tidak menjadi beban moral atas ketentuan yang sudah disepakati bersama.

"Oleh sebab itu untuk kepastian hukum kami mohon dengan segala hormat kita konsekuen menyelesaikannya. Konsisten menyelesaikannya di masa sidang ini," ujarnya.

Menanggapi soal partisipasi publik, Mendagri menyampaikan dalam proses revisi UU upaya tersebut harus dilakukan. Sebelumnya, Kemendagri maupun DPR RI juga telah menghimpun partisipasi publik dalam merumuskan draft RUU tentang Provinsi DKJ. "Kalau masih ada yang menganggap kurang nanti dari Tim Panja, bisa saja diundang," ungkap Tito.



Oleh sebab itu untuk kepastian hukum kami mohon dengan segala hormat kita konsekuen menyelesaikannya.

Dari sisi parlemen, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengemukakan, lembaganya menargetkan RUU DKJ selesai pembahasannya dan diajukan pengesahannya di rapat paripurna DPR pada 4 April 2024. Ia berharap komitmen DPR dan pemerintah dalam menuntaskan beleid hukum yang mengatur tentang pemindahan ibu kota negara ini.

"Jadwal ini tentatif. Ini bisa diterima Pak ya? Pemerintah DPD dan teman-teman DPR, bisa ya?" kata Supratman meminta persetujuan seluruh hadirin dalam rapat Baleg bersama pemerintah, pada Rabu, 13 Maret 2024.

Supratman mengatakan bahwa rapat pembahasan RUU DKJ bersama pemerintah dimulai pada 13 Maret, sebulan sebelum jadwal Rapat Paripurna. "Kemudian akan diisi mulai besok dengan pembahasan di tingkat panja. Kemudian akan diakhiri pada 3 April hari Rabu,

dalam hari kerja," ujarnya.

Harap maklum, pada awal April sudah ada cuti panjang menjelang Idul Fitri. Jadi, tenggat waktunya memang ketat.

Toh politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, pemerintah dan DPR harus menyelesaikan dua kesepakatan awal. Pertama, soal jadwal rapat bersa-

antardaerah penunjang yang ada, baik Jakarta itu sendiri, Bogor, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, maupun Cianjur," ucap Supratman.

Ketiga, kata dia, soal pengangkatan kepala daerah DKJ serta pemberhentian oleh presiden dan beberapa kewenangan khusus dalam penyelenggaraan



ma. "Kedua, soal mekanisme. Kalau kita bisa menyepakati kedua hal ini, maka raker (rapat kerja) kita bisa kita akhiri dan kita lanjutkan dalam rapat berikut," ucap Supratman.

Ia lantas mengungkapkan empat materi muatan utama RUU DKJ. Secara umum, materi muatan RUU DKJ terdiri dari 12 Bab dan 72 Pasal dengan sistematika dan materi muatan yang terkait.

"Pertama, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.

Kedua, pengaturan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Jakarta dan wilayah sekitarnya serta menyinergikan

pemerintahan daerah.

"Walaupun ini sudah menimbulkan perdebatan, tapi kita akan menunggu sikap akhir dari pemerintah dan diskusi kembali dengan fraksi-fraksi di DPR RI. Empat, pengaturan tentang paman-tauan dan peninjauan atas undang-undang ini," ucapnya.

Memang, substansi masalah yang menjadi materi RUU itu pun sudah menjadi wacana publik. Dalam sebulan seiring jadwal yang sudah disepakati Pemerintah dan DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU DKJ, akan lebih terbuka bagaimana rancangan masa depan Jakarta setelah tak lagi menjadi Ibu Kota. ●



SUKSES TURUNKAN KEMISKINAN EKSTREM HINGGA NOL PERSEN

Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) menjadi salah daerah yang menjadi percontohan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Kabupaten Muba berhasil menurunkan angka kemiskinan yang cukup besar dari 4,9 persen menjadi 0,9 persen saja.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan mencatat, penurunan angka kemiskinan ekstrem di Muba turun tersebut dampak dari masifnya penanganan inflasi yang sangat baik dilakukan Pemkab Muba.

"Kemiskinan ekstrem Muba di tahun 2023 turun drastis dari sebelumnya tahun 2022 4,7 persen di tahun 2023 turun menjadi 0,9 persen," ungkap Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto.

Ia mengapresiasi inovasi dan program terobosan yang dilakukan Pj Bupati Apriyadi Mahmud sejak hampir dua tahun belakangan seperti program Bantu Umak, Desa Cantik dan beberapa inovasi lainnya.

"Misalnya saja Program Desa Cantik, dimana Muba dua tahun berturut-turut meraih juara di level nasional, kami sangat bangga," ungkap dia.

Menanggapi keberhasilan tersebut Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud mengaku dengan turunnya angka kemiskinan ekstrem di Muba tersebut merupakan kerja keras semua pihak terutama OPD di lingkungan Pemkab Muba.

"Saya sangat bangga punya rekan-rekan OPD yang sangat bekerja dengan keras berupaya mengentaskan kemiskinan di Muba. Hasilnya, di tahun 2023 kemiskinan ekstrem di Muba turun drastis dari 4,7 persen menjadi 0,9 persen," ucapnya.

Kandidat Doktor Universitas Sriwijaya

ini merinci, salah satu realisasi konkrit untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem yakni program Bantuan Tunai untuk Masyarakat Miskin atau Bantu Umak. Program ini konsisten memberikan bantuan uang kepada masyarakat kategori miskin ekstrem.

"Kita akan sisir dari sektor lain dalam upaya pengentasan kemiskinan di Muba. Baik dari pangan hingga sektor lainnya yang tentunya bisa meminimalisir kemiskinan di Muba," pungkasnya.

Model Baru Penanggulangan Kemiskinan

Keberhasilan Pemkab Muba dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dari 14,9 persen tahun 2023, turun men-



jadi 4,7 persen dan akhirnya berada di angka 0,9 persen di tahun 2024 ini menjadi fenomena.

Namun hal itu bukanlah hal yang tidak disengaja melainkan telah dilakukan melalui riset atau penelitian oleh Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud sendiri.

"Jadi nantinya ada model konseptual dan model intervensi yang akan dilakukan dan saya tuangkan dalam penelitian ini," ungkap Pj Bupati Apriyadi Mahmud yang juga Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel.

Menurutnya, persoalan tata kelola data menjadi hal yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Melalui data inilah berbagai persoalan di masyarakat dapat diselesaikan satu persatu. Bahkan nantinya akan dibuatkan tim khusus pengelola data dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan tata kelola data di Kabupaten Muba.

Model penanggulangan ini diakui langsung Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI, Arif Rohman sekaligus mengapresiasi Pj Bupati Muba Apriyadi yang melakukan riset langsung dan dituangkan dalam disertasi untuk upaya penanggulangan kemiskinan.

"Ini sangat positif selalu, dan sangat effort dalam pengentasan dan penanggulangan kemiskinan di wilayah pak Bupati Apriyadi. Kami sangat apresiasi komitmen dan konsistensi tersebut," ungkap dia.

Apresiasi yang sama dilakukan Ketua Tim Big Data Kementerian Kominfo, Shinta mengungkapkan, apa yang diteliti Pj Bupati Apriyadi Mahmud lewat disertasinya tersebut sangat menarik sekali terutama persoalan data.

"Ini sangat menarik sekali, semoga nantinya bisa menjadi solusi baru dalam kaitan data untuk pengentasan kemiskinan di wilayah," tuturnya.

Senada dikatakan Kepala Bappeda Pemprov Sumsel Regina Ariyanti. Ia mengatakan, selama ini persoalan penanggulangan dan penanganan kemiskinan dihadapkan pada persoalan data.

"Dengan adanya riset dari pak Apriyadi ini semoga nantinya bisa menjadi solusi dari apa yang kita hadapi selama ini terutama persoalan data," ulasnya.

Garap 549 Rumah Tidak Layak Huni
Pengentasan kemiskinan di Musi

Banyuasin bakal lebih disebut lagi. Tidak tanggung-tanggung, di tahun anggaran 2024 ini Pj Bupati Apriyadi Mahmud bakal menggarap sebanyak 549 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Serasan Sekate.

Pemkab Muba dibawah komando Pj Bupati Apriyadi Mahmud sangat menggencarkan program pengentasan kemiskinan, tidak hanya mengandalkan beberapa program saja namun di setiap OPD terlibat aktif memasifkan program pengentasan kemiskinan.

Alhasil, kemiskinan ekstrem di Muba pada tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0.9 persen dari sebelumnya di tahun 2022 4.7 persen.

"Jadi di tahun 2024 ini akan ada 549 rumah yang akan mendapatkan ban-

sebanyak 459 unit rumah.

"Nama programnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program ini diyakini dapat dengan masif mengurangi kemiskinan," ucapnya.

"Program bedah rumah ini akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat," tambah Ridho.

Kadinsos Muba Ardiansyah merinci, adapun 80 unit bantuan bedah dari Dinsos Muba menyasar di tiap kecamatan di Kabupaten Muba.

Dinsos Muba telah menyiapkan anggaran Rp3.2 Miliar untuk bedah 80 unit RTLH yang menyasar 15 Kecamatan di Muba, diantaranya 5 unit di Sanga Desa, Babat Toman 3 unit, Batanghari Leko 10 unit, Plakat Tinggi 7 unit, Lawang Wetan 5 unit, Sungai Keruh 3 unit, Sekayu 28



tuan program RTLH. 459 unit dari Dinas Perkim, 80 unit dari Dinas Sosial dan 10 unit dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Muba," jelas Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

Ia merinci, di tahun 2023 lalu Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan program bantu umak dalam upaya pengentasan kemiskinan, tetapi juga menjalankan program RTLH yang menyasar ke 834 rumah warga.

"Diantaranya 670 unit bedah RTLH dari Dinas Perkim, 99 unit dari Dinsos Muba, dan 65 Baznas Muba. Jadi sistemnya keroyokan, semua pihak terkait terlibat. Alhamdulillah berdampak ke masyarakat," tuturnya.

Pemkab Muba di tahun 2024 ini mengucurkan anggaran sebesar Rp 22,95 miliar untuk melakukan bedah rumah ke

unit, Lais 7 unit, Keluang 8 unit.

Sebelumnya, Susi Susanti (45) warga Desa Tenggaro Kecamatan Keluang, mendapatkan jatah bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program Dinas Sosial Muba yang sudah selesai dilakukan.

"Alhamdulillah kondisi rumah kami sudah sangat baik yang diperbaiki pak Bupati Apriyadi, kami tidak menyangka kalau pak Bupati Apriyadi ingin bertandang langsung," ungkap ibu satu orang anak ini.

Ia mengaku, jatah perbaikan bedah rumah yang diberikan sangat bermanfaat terlebih kondisi kehidupan sehari-hari terbatas karena hanya mengandalkan pendapatan suami yang bekerja serabutan. ●

PEMKAB MUBA GARAP 549 RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terus dilakukan Pemkab Muba. Sebagai bentuk keseriusan, tidak tanggung-tanggung, di tahun anggaran 2024 ini Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud menggarap sebanyak 549 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Bumi Serasan Sekate.

Pemkab Muba dibawah komando Pj Bupati Apriyadi Mahmud sangat menggencarkan program pengentasan kemiskinan, tidak hanya mengandalkan beberapa program saja namun di setiap OPD terlibat aktif memasifkan program pengentasan kemiskinan.

rumah yang akan mendapatkan bantuan program RTLH. 459 unit dari Dinas Perkim, 80 unit dari Dinas Sosial dan 10 unit dari Badan Zakat Nasional (Baznas) Muba,” jelas Pj Bupati Apriyadi Mahmud.

la merinci, di tahun 2023 lalu Pemkab Muba tidak hanya mengandalkan program bantu umak dalam upaya pengan-

Muba, dan 65 Baznas Muba. Jadi sistemnya keroyokan, semua pihak terkait terlibat. Alhamdulillah berdampak ke masyarakat,” tuturnya.

Sementara di tahun 2024 ini Pemkab Muba mengucurkan anggaran sebesar Rp 22,95 miliar untuk melakukan bedah rumah ke sebanyak 459 unit rumah.

“Nama programnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program ini diyakini dapat dengan masif mengurangi kemiskinan,” ucapnya.

“Program bedah rumah ini akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambah Ridho.

Kadinsos Muba Ardiansyah merinci, adapun 80 unit bantuan bedah dari Dinsos Muba menyasar di tiap kecamatan di Kabupaten Muba.

Dinsos Muba telah menyiapkan anggaran Rp 3,2 miliar untuk bedah 80 unit RTLH yang menyasar 15 kecamatan di Kabupaten Muba, diantaranya 5 unit di Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Babat Toman ada 3 unit.

Di Kecamatan Batanghari Leko ada 10 unit, Plakat Tinggi terdata 7 unit, Lawang Wetan ada 5 unit, Sungai Keruh 3 unit, Sekayu 28 unit, Lais 7 unit, dan Kecamatan Keluang ada 8 unit.

Sebelumnya, Susi Susanti (45) warga Desa Tenggaro Kecamatan Keluang, mendapatkan jatah bedah rumah atau perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) program Dinas Sosial Muba yang sudah selesai dilakukan.

“Alhamdulillah kondisi rumah kami sudah sangat baik yang diperbaiki pak Bupati Apriyadi, kami tidak menyangka kalau pak Bupati Apriyadi ingin bertandang langsung,” ungkap ibu satu orang anak ini.

la mengaku, jatah perbaikan bedah rumah yang diberikan sangat bermanfaat



Alhasil, kemiskinan ekstrem di Muba pada tahun 2023 turun drastis menyentuh angka 0,9 persen dari sebelumnya di tahun 2022 4,7 persen.

“Jadi di tahun 2024 ini akan ada 549

atasan kemiskinan, tetapi juga menjalankan program RTLH yang menyasar ke 834 rumah warga.

“Diantaranya 670 unit bedah RTLH dari Dinas Perkim, 99 unit dari Dinsos

terlebih kondisi kehidupan sehari-hari terbatas karena hanya mengandalkan pendapatan suami yang bekerja serabutan.

"Sekarang kalau hujan deras kami tidak was was lagi tinggal di rumah, rumah kami sudah sangat layak dihuni berkat pak Apriyadi," terangnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Muba, Muhammad Ridho mengatakan pihaknya mengucurkan anggaran sebesar Rp22,95 miliar pada tahun anggaran 2024 ini untuk melakukan bedah rumah ke sebanyak 459 unit rumah.

"Nama programnya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diyakini dapat dengan masif mengurangi kemiskinan. Program bedah rumah ini akan terus berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Dinsos Muba juga telah menyiapkan anggaran Rp 3,2 miliar untuk bedah 80 unit RTLH lalu dari Baznas Muba 10 unit mengucurkan anggaran sebesar Rp 291,37 juta. Semoga program RTLH ini dapat berdampak lebih baik bagi masyarakat yang membutuhkan serta menurunkan angka kemiskinan di Muba.

Sesuai Program Daerah

Langkah yang dilakukan Pemkab Musi Banyuasin itu sejalan dengan strategi yang dilakukan Pemprov Sumsel dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerah. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni menuturkan Pemprov Sumsel menginisiasi Gerakan Bedah Rumah Serentak di Sumatera Selatan.

"Dari laporan para kepala daerah, didapat 6.106 unit rumah yang akan dibedah. Ini masih akan terus bertambah menunggu laporan hasil koordinasi dengan BUMD dan BUMD di wilayah masing-masing," ujarnya.

Agus Fatoni menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka merayakan hari jadi ke-78 Sumatera Selatan yang akan diperingati pada 15 Mei.

"78 merupakan angka minimal kita dalam melaksanakan bedah rumah di masing-masing daerah, tadi yang daerahnya masih belum mencapai angka tersebut semoga nantinya dimudahkan dan dilancarkan untuk mencapai angka tersebut," ucap Fatoni.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

menjelaskan, program BSPS dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat

dan nyaman," kata Menteri Basuki.

Program BSPS pada dasarnya merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang rumahnya tidak layak huni guna mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya.

Pemerhati kebijakan publik daerah Abdul Nadjib mengapresiasi Pemkab Muba yang serius menangani dan menurunkan angka kemiskinan di daerahnya secara terintegrasi dan holistik. ●

KOMENTAR:

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono

Mampu Kurangi Pengangguran



Program BSPS yang dilakukan daerah sesuai dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih

layak, sehat dan nyaman. ●

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni

Semoga Semua Dilancarkan

Dari laporan para kepala daerah, didapat 6.106 unit rumah yang akan dibedah. Ini masih akan terus bertambah menunggu laporan hasil koordinasi dengan BUMD dan BUMD di wilayah masing-masing

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka merayakan hari jadi ke-78 Sumatera Selatan yang akan diperingati pada 15 Mei.

Angka 78 merupakan angka minimal kita dalam melaksanakan bedah rumah di masing-masing daerah, tadi yang daerahnya masih belum mencapai angka tersebut semoga nantinya dimudahkan dan dilancarkan untuk mencapai angka tersebut. ●



Akademisi Universitas Sriwijaya, Abdul Nadjib

Bukti Keseriusan Pemkab Muba



Kita sangat mengapresiasi upaya Pemkab Muba yang serius menangani dan menurunkan angka kemiskinan di daerahnya secara terintegrasi dan holistik.

Ini bagian dari upaya penurunan angka kemiskinan, karena salah satu indikator kemiskinan adalah perumahan, terutama rumah tidak layak huni.

Meskipun demikian, program ini bukan satu-satunya upaya dalam mengentaskan kemiskinan dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. ●

PERJUANGKAN NASIB HONORER DEWA DAPAT PENGHARGAAN MENTERI PANRB

Kepemimpinan Ratu Dewa sebagai Penjabat Walikota Palembang memang patut diakui kemampuannya. Keberhasilannya dalam mengatasi berbagai persoalan di Kota Palembang membuat Ratu Dewa meraih berbagai penghargaan. Salah satunya penghargaan bergengsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang sukses menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) pada kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta beberapa waktu lalu.

Penghargaan yang diterima langsung Pj Walikota Palembang Ratu Dewa itu karena telah berkomitmen dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga Non ASN berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN.

Secara nasional hanya lima Instansi yang berhasil meraih penghargaan tersebut, diantaranya Kementerian ATR BPN, Pemkot Palembang, Pemkab Bandung, Pemkab Banyuwangi dan Pemerintah Provinsi Aceh.

Penghargaan ini diberikan kepada instansi yang dinilai memiliki kerja nyata yang luar biasa

dalam pemenuhan kebutuhan ASN dan penataan tenaga Non ASN.

Penghargaan ini juga menjadi bukti bahwa Pj Walikota Ratu Dewa bersama jajaran benar-benar peduli dan serius terhadap kesejahteraan para pegawai Non PNSD di Kota Palembang untuk menjadi ASN.

Pj Walikota Ratu Dewa mengucapkan terimakasih kepada Menpan RB Abdulah Azwar Anas dan jajaran atas penghargaan

yang diberikan.

"Alhamdulillah syukur Kota Palembang mendapatkan penghargaan yang luar biasa pada hari ini," ujar Ratu Dewa.

Ia menuturkan bahwa ini merupakan kesungguhan dalam melaksanakan pembinaan dan membuka kesempatan yang besar bagi Non PNSD di Pemkot Palembang.

Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024 Pemkot Palembang telah mengusulkan sebanyak 6211 jumlah formasi CASN.

CPNS 157 formasi, PPPK guru 1504, PPPK tenaga kesehatan 439, dan PPPK tenaga teknis sebanyak 4111 formasi.

"Tiada lain, ini merupakan komitmen kita melaksanakan beberapa pembinaan termasuk kita memberikan formasi seluas luasnya kepada para Non PNSD, maupun itu tenaga kesehatan, guru termasuk formasi-formasi lainnya dan Alhamdulillah ini diapresiasi oleh Kemenpan RB se-



hingga kita mendapatkan penghargaan pada hari ini," ujarnya.

Dengan formasi sebanyak itu, ia berharap agar para Non PNSD dan pelamar umum di Kota Palembang bisa memanfaatkan dengan baik peluang tersebut.

"Mudah-mudahan saja ini kita persembahkan untuk Non PNSD di kota Palembang dan juga formasi umum untuk mengikuti seleksi CPNS dan kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar," tuturnya.

Tertinggi Dalam Kepatuhan Pelayanan Publik

Sebelumnya Pemkot Palembang juga berhasil meraih penghargaan predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik dengan nilai 93,75 zona hijau kualitas tertinggi dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. Hal tersebut menunjukkan kinerja Pemkot Palembang dibawah kepemimpinan Pj Walikota Ratu Dewa sangat tinggi.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Pj Walikota Ratu Dewa yang diserahkan Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah di Griya Agung.

Penilaian ini sudah dilakukan jajaran Ombudsman lebih kurang selama 4 bulan, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2023.

Pj Walikota Ratu Dewa mengucapkan terimakasih kepada Ombudsman yang sudah melakukan survey dan memberikan penilaian positif terkait kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang sudah dikerjakan oleh Pemkot Palembang.

"Dalam hal ini tentunya kami sampaikan terimakasih sekali lagi kepada Ombudsman RI Perwakilan Sumsel, ini menjadi komitmen kami untuk terus memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Kami akan terus tingkatkan," ujar Ratu Dewa.

Wakil Ketua Ombudsman RI Robby Hamzar Rafinus mengungkapkan, yang menjadi responden dalam penilaian survey kepatuhan ini adalah apa yang sering dilaporkan oleh masyarakat.

Di tingkat pemerintah daerah, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) yang dinilai. Diantaranya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

"Kenapa tidak semuanya disurvei hanya beberapa saja, karena memang itu adalah produk maupun layanan yang sering diadukan oleh masyarakat. Untuk itu Ombudsman terus mendorong agar pelayanan semakin hari semakin baik,"

lama semakin membaik, namun ada juga Kabupaten/Kota dari tahun 2015 dari seluruh penilaian belum pernah mendapatkan nilai hijau.

"Mudah-mudahan dibawah kepemimpinan kepala daerah yang baru sekarang, ini bisa merubah untuk penilaian tahun depan. Peran serta dari kepala daerah menjadi kunci yang sentral ka-



ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumsel, M Adrian Agustiansyah menjelaskan, nilai yang diperoleh oleh masing-masing daerah semakin

rena ada daerah yang konsisten setiap tahun mempertahankan posisinya di puncak, dan ada juga daerah yang naik turun, untuk itu kami mengharapkan komitmen kita bersama," tuturnya. •



GENCARKAN PASAR MURAH, KENDALIKAN HARGA DAN INFLASI

Mengantisipasi kenaikan harga sejumlah pangan pokok yang mulai melonjak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) gencar melakukan kegiatan pasar murah ini sebagai upaya mengendalikan inflasi di Kabupaten OKI yang juga selaras dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Ada banyak kegiatan program pasar murah yang telah dilaksanakan Pemkab OKI, salah satunya membuka Gerai Jam Sembako (GJS) agar masyarakat bisa memperoleh pangan murah dan terjangkau.

Gerai yang dibuka melalui kerjasama Perumda Bende Seguguk, Bulog dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) OKI ini ditujukan untuk menjaga inflasi daerah.

"Gerai Sembako ini disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD Bende Seguguk bekerja sama dengan Bulog dan Dinas terkait. yang tujuan utamanya untuk mengendalikan inflasi," ujar Penjabat Bupati OKI, Asmar Wijaya.

Asmar menyampaikan dibukanya gerai ini untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga murah atau sesuai HET.

"Yang penting harga yang ditawarkan terjangkau oleh masyarakat," terang dia.

Direktur PD Bende Seguguk, Rohmat Kurniawan mengatakan gerai tersebut merupakan kolaborasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas

Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan serta Perum Bulog.

"Untuk Bulog memasok komoditas beras, minyak dan tepung terigu, sementara dinas teknis lainnya untuk komoditas lainnya," kata dia.

Pihaknya juga memastikan harga komoditas pokok yang dijual di kios tersebut akan lebih rendah jika dibandingkan dengan harga komoditas yang sama di pedagang pasar. Salah satunya dengan menyediakan paket beras dan minyak goreng dengan harga murah yakni Rp 65 ribu.

Gerai Jam Sembako ini mendapat apresiasi langsung dari Pemprov Sumsel. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Sumsel, Kurniawan menilai kegiatan yang digagas Pemkab OKI sangat baik.

"Kami mengapresiasi langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan Pemkab OKI", ucap Kurniawan.

Ia menyebut, Pemerintah Provinsi juga akan membantu pemerintah kabupaten/kota dalam mengendalikan inflasi.

"Pemprov Sumatera Selatan juga akan membantu kerja Pemda dalam mengendalikan inflasi. Kita juga akan

terus melanjutkan Gerakan Sum-sel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School and Goes to Office. Manfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah, jadi lahan produktif,” ucapnya.

Maksimal Kendalikan Harga Sembako

Untuk mengendalikan harga sembako ini, Pemkab OKI cukup serius dengan melibatkan semua kalangan dan elemen masyarakat.

“Saya yakin dengan koordinasi dan sinergi yang mantap diantara seluruh stakeholder maka kita dapat melakukan seluruh upaya yang dimungkinkan untuk mendukung upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pengendalian inflasi jelang Ramadhan dan Idul Fitri 2024,” kata Asmar.

Dalam mengendalikan inflasi jelas Asmar, Pemkab OKI telah menyusun peta jalan, petunjuk operasional pengendalian inflasi serta melaksanakan strategi 4K Pengendalian Inflasi.

“Strategi 4K Pengendalian Inflasi itu diantaranya Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif yang di kelas dalam ragam inovasi”, ungkapnya.

Beberapa inovasi dalam upaya pengendalian inflasi dilakukan antara lain PERJAKA atau Perusahaan Jaga Keterjangkauan Harga. Beres Inflasi OKI atau Berita Seputar Inflasi OKI.

Program BISMILAH yakni Baznas Isi Sembako dengan Amal Ibadah. Balap Becak yaitu Bantuan Langsung Percepatan Bertanam Cabe Serentak. Program Gerai Sembako yakni gerakan penjualan sembako murah.

Semua program inovasi itu, diharapkan Asmar akan mampu menjaga Inflasi dengan diperkuat kolaborasi antar pihak.

Sementara Kepala BPS Provinsi Sumsel, Wahyu Yulianto memaparkan, tingkat inflasi Years on Years (y-on-y) Kabupaten OKI mencapai 4,92 persen sementara tingkat inflasi moon to moon diangka -0,11 persen.

“Berbagai indikator menunjukan kondisi sosial ekonomi di Kabupaten OKI terus menguat, namun perlu diantisipasi kenaikan harga jelang hari besar keagamaan,” terang Wahyu.

Sementara perwakilan Bank Indonesia Sumsel, Ricky Perdana Gozali menyebut sejumlah dukungan BI yang dapat dikolaborasikan dengan Pemda dalam pengendalian inflasi.

“BI mempunyai sejumlah program yang dapat berkolaborasi dengan Pemda seperti gerakan budidaya, hilirisasi, perluasan pupuk organik, pemanfaatan alsintan serta kerjasama daerah,” Ujarnya.

Libatkan UMKM dan Gapoktan

Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Pemkab OKI ini juga melibatkan

Perikanan seharga Rp 25.000 perkilo dan Ikan Patin Rp 20.000 perkilo,” Asmar Wijaya.

Pasar murah ini juga melibatkan UMKM Lokal binaan Bhayangkari Polres OKI dengan menawarkan pempek dan cemilan dengan harga 1.000-1.500, kerupuk kemplang Ikan Gabus 120.000 perkilo dan kerupuk kemplang.

Sementara bahan pokok yang disiapkan Perumda Bende Seguguk yaitu sebanyak 250 paket beras dan minyak goreng dengan harga Rp. 65.000/ paket serta 150 paket tebus murah senilai



Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Beragam bahan pangan dari beras hingga ikan segar ditawarkan dengan harga terjangkau.

“Ada Gapoktan yang menawarkan sayur-sayuran dengan harga rata-rata Rp 5000 perkilo, pisang 3000 perkilo, dan Labu Manis 2000 perkilo. Kemudian ada Ikan Nila dari binaan Dinas

Rp 70.000.

Isinya antara lain, 1/2 kg bawang merah, 1/4 kg bawang putih, 15 butir telur ayam, 1 kg gula pasir, 1 kg Tepung Segitiga Biru dan 1 liter minyak sayur.

“Operasi pasar murah ini untuk membantu masyarakat agar memiliki akses membeli bahan pangan dengan harga terjangkau. Mudah-mudahan dapat membantu,” tuturnya. ●

BUPATI OGAN ILIR BERI HADIAH UMRAH UNTUK PEMENANG MTQ XXX 2024

Sedikitnya 448 peserta dari perwakilan 16 Kecamatan di Ogan Ilir mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXX tingkat Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.

MTQ XXX tingkat Kabupaten Ogan Ilir dibuka langsung oleh Bupati Ogan Ilir, Panca Wijaya Akbar didampingi Wakil Bupati, H Ardani bersama Forkopimda Kabupaten Ogan Ilir di Gedung Serbaguna Caram Seguguk KPT Tanjung Senai Indralaya, Kamis 29 Februari 2024.

Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar mengungkapkan, kegiatan ini merupakan pengembangan syiar Islam dan ikhtiar untuk mengagungkan kalam Illahi, untuk meneguhkan kesucian-nya, memperkuat keimanan, dan memperluas fungsi edukatif daripada kitab suci Al-Qur'an bagi umat Islam.

"Kegiatan MTQ ini tidak semata-mata wahana untuk berlatih dan berlomba membaca Al-Qur'an, tetapi menjadi jalan dalam mengedukasi umat untuk semakin mencintai dan membumikan Al-Qur'an," kata dia.

Dikatakannya MTQ juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran beragama yang lebih humanis dan terbuka, selain juga sebagai bentuk dakwah untuk menyem-

akhlak kaum muslimin dan muslimah.

Hal ini sejalan dengan tema MTQ kali ini, Membumikan Al-Qur'an dalam mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang berakhlakul karimah.

"Untuk para peserta MTQ tidak hanya mengejar kemenangan, akan tetapi lebih kepada upaya memupuk motivasi dan keinginan yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu keagamaan yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal," ujarnya.

Lanjut dia, dengan adanya kegiatan MTQ ini dapat terus kita laksanakan setiap tahunnya dalam rangka mengukuhkan silaturahmi dan kebersamaan, sehingga terealisasi Ogan Ilir Bangkit menuju masyarakat lebih sejahtera dan berkualitas berlandaskan iman, taqwa, moral dan etika.

Panca Wijaya Akbar menjanjikan akan memberangkatkan dewan hakim serta pemenang MTQ XXX tahun 2024 tingkat Kabupaten Ogan Ilir umrah gratis.

Pemberangkatan umrah gratis yang diberikan Panca Wijaya Akbar ini, sebagai bentuk perhatian Bupati Ogan Ilir kepada para dewan hakim serta para pemenang MTQ XXX tahun 2024

tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

"Kalau bisa 84 dewan hakim ini kita berangkatkan umrah gratis semua. Tapi, untuk tahun 2024 ini, kita prioritaskan yang belum berangkat umrah," jelasnya.

Panca menambahkan, bahwa pada tahun lalu, pemberangkatan umrah gratis diprioritaskan untuk dewan hakim yang berusia lanjut. Sedangkan tahun ini, Bupati akan memprioritaskan dewan hakim yang belum pernah sama sekali ke Tanah Suci.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ogan Ilir juga mengimbau kepada seluruh dewan hakim untuk bekerja sesuai dengan ketentuan, serta memberikan nilai yang objektif kepada seluruh peserta MTQ XXX tahun 2024 tingkat Kabupaten Ogan Ilir.

"Penilaian harus dilakukan seobjektif mungkin oleh dewan hakim. Jangan sampai melakukan penilaian subjektif, karena saya ingin perwakilan Ogan Ilir bisa menembus internasional," tegas Panca.

Panca juga menyebut, bahwa Kabupaten Ogan Ilir merupakan pemasok qori' dan qori'ah, serta hafidz dan hafidzah. Selain itu, Kabupaten Ogan Ilir juga terkenal dengan pencetak bibit unggul di Tilawatil Quran.

"Apabila di tingkat kabupaten ini lebih ketat seleksinya, Insyaallah hasil yang didapatkan juga akan baik. Demikian pula dengan



perwakilan kita di tingkat provinsi nanti, juga akan bisa berbicara banyak," paparnya.

Disinggung mengenai jumlah peserta yang mengalami peningkatan dibanding tahun lalu, Bupati berharap, hendaknya tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat, melainkan kategori yang diperlombakan juga akan makin banyak pemenang.

"Harapan kita MTQ kali ini benar-benar akan mendapatkan pemenang yang memang benar-benar berkualitas," pungkasnya.

Sementara, sebanyak 20 Peserta hafidz dan hafidzah dari Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir mengikuti lomba MTQ XXX Tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024, yang dibuka langsung oleh Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.

Camat Tanjung Raja, Yus Afriadi mengatakan peserta dari Kecamatan Tanjung Raja sebanyak 20 Orang mengikuti lomba MTQ Tingkat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2024 ini, berharap hafidz dan hafidzah asal dari Kecamatan Tanjung Raja bisa berhasil meraih juara.

"Dari kecamatan Tanjung Raja ada 20 Orang peserta, sebelas orang anak laki-laki dan sembilan orang anak perempuan, berharap di perlombaan MTQ tahun 2024 ini hafidz dan hafidzah dari kecamatan Tanjung Raja bisa menang" Kata dia.

Camat Tanjung Raja berharap semoga di perlombaan MTQ Tahun 2024 ini hafidz dan hafidzah dari Kecamatan Tanjung Raja bisa menang meraih emas, agar bisa mengharumkan nama kecamatan Tanjung Raja.

Sekaligus dengan mengikuti perlombaan MTQ ini, ia berharap bisa menambah meningkatkan dan mendorong semangat bagi generasi muda khususnya pelajar dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Qur'an dan mampu melahirkan generasi penerus yang paham akan Al-Qur'an.

"Kalau generasi muda di setiap kecamatan sudah banyak yang memahami dan menghayati serta mengamalkan isi kandungan kitab suci Al-Qur'an, tentunya secara tidak langsung sudah Membanggakan nama Kabupaten Ogan Ilir", tutupnya. •IRY



ASN PALI BISA UMRAH DULU BAYAR BELAKANGAN

ASN dan PPPK di Pali mendapat tawaran fasilitas pembiayaan umrah. Bagaimana prosesnya?

Bupati PALI Heri Amalindo menandatangani kerja sama berbentuk MoU dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Cabang Palembang terkait pemanfaatan produk dan jasa layanan umrah perbankan syariah untuk seluruh ASN (PNS dan PPPK) dilingkungan Pemkab PALI.

Haji Business Development Head PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk Cabang Palembang, Jusuf Eko mengatakan, melalui perjanjian kerjasama ini memudahkan fasilitas pembiayaan untuk melaksanakan ibadah umrah bagi ASN dilingkungan Pemerintahan Kabupaten PALI.

Dijelaskan Bupati PALI Heri Amalindo, Samira Travel bekerja sama dengan Bank Panin Dubai Syariah Tbk menawarkan untuk melaksanakan umrah dulu bayar belakangan tanpa DP, khusus untuk ASN (PNS dan PPPK) Kabupaten PALI.

"Program ini merupakan sesuatu hal yang sangat menarik, karena untuk berangkat umrah minimal harus menunggu 3 tahun menabung, belum tentu kita masih diberikan umur panjang. Dan yang jelas 3 tahun kedepan biaya umrahnya sudah naik. Tapi dengan adanya MoU ini, ASN PALI dapat umrah dulu bayar belakangan," jelas dia.

Dikatakan Heri Amalindo, tidak semua orang bisa tergugah untuk melaksanakan ibadah spiritual umrah ini.

"Kami melaksanakan ini biar sama-sama dari PALI mengajak mereka untuk umrah dulu bayar belakangan.

Dengan catatan harus dibayar, uang mukanya gratis, asuransinya aman," ucapnya.

Kerja sama ini dilakukan dalam rangka peningkatan iman dan taqwa (Imtaq) kepada Allah, khususnya bagi ASN di PALI.

Perwakilan PT Samira Berkah PALI, Hj Tri Fitrianti menjelaskan, program kerjasama dengan Pemkab PALI ini digagas oleh Bupati Heri Amalindo. Tujuan utama dari program ini adalah sebagai upaya Pemkab PALI untuk memberikan kemudahan kepada ASN yang ingin melaksanakan ibadah umroh di tanah suci Me-

kkah.

"Kami bekerjasama dengan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk dan Pemkab PALI memfasilitasi kepada para ASN yang ingin melaksanakan ibadah umrah. Penting niat umrah dulu, kalau itu sudah dilakukan Insya Allah, apa yang diinginkan tersebut segera tercapai," jelas dia.

Dalam kerjasama Pemkab PALI dan Samira Berkah PALI, pembiayaan ibadah umrah memberikan dua pilihan.

Pertama, pembayaran biaya umrah secara langsung bagi ASN yang memang sudah memiliki dana penuh untuk pergi umrah, itu bisa langsung berangkat. Pilihan kedua pembayaran biaya umrah secara bertahap dengan potongan gaji pegawai melu-



Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

"Insha Allah dalam waktu dekat ini program Umrah Syawal Bareng Mang Heri Tanpa DP, administrasi serta asuransi, paspor gratis semua dibantu Pak Heri Amalindo. Travel Umroh Samira Berkah PALI berusaha memberikan pelayanan yang maksimal kepada para calon jemaah umroh, baik transportasi, akomodasi maupun konsum-

Program umrah gratis ini merupakan inisiatif dari Bupati Heri Amalindo.

Mencerminkan komitmen kepemimpinanannya di Bumi Serepat Serasan.

Jamaah yang berangkat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tenaga medis, dan ASN berprestasi di Kabupaten PALI.

"Pada tahun 2023 ini, kami kembali mengirim puluhan warga Kabupaten PALI untuk mengikuti umroh secara gratis, sejalan dengan visi kami untuk mewujudkan PALI Agamis," ujarnya.

Bupati juga mengajak para jamaah untuk mendoakan keselamatan Kabupaten PALI dari bencana alam dan non-alam di depan Ka'bah, serta mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah



si," jelas dia.

Pemberangkatan pelaksanaan umrah secara perdana ini nantinya akan diikuti langsung Bupati PALI Heri Amalindo.

Sebelumnya, Bupati PALI Heri Amalindo melepas puluhan warga Kabupaten PALI Umrah ke Tanah Suci Mekkah secara gratis.

Pelepasan Bupati Heri Amalindo di halaman Kantor Bupati PALI, Jalan Merdeka Km 10, kelurahan Handayani Mulya, kecamatan Talang Ubi, Minggu 10 Desember 2023.

Kepala Bagian (Kabag) Kesra Setda Kabupaten PALI, Usmanto menjelaskan, bahwa jumlah jamaah umrah yang berangkat kali ini mencapai 95 orang, di antaranya 80 orang dapat menikmati fasilitas gratis yang disediakan oleh Pemkab PALI, sementara 15 orang lainnya memilih jalur mandiri.

Heri Amalindo, dalam keterangannya, menyampaikan selamat menjalani ibadah umrah dan berpesan agar para jamaah menjaga kesehatan selama melaksanakan rangkaian ibadah di Mekkah dan Madinah.

SWT.

"Doakan Kabupaten PALI menjadi daerah Baldatun Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur," ungkapnya.

Ia berharap agar para jamaah umrah asal Kabupaten PALI diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah, serta menjadi jamaah umrah yang mendapat ridha Allah.

"Semoga para jamaah diberikan kelancaran dalam menjalankan rangkaian ibadah umroh dan menjadi jamaah yang Mabruur dan mabrurroh," pungkasnya. • IRY



RUPS Bank Sumsel Babel

MANTAPKAN PERTUMBUHAN SOLID DAN STRATEGI BERKELANJUTAN

PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau Bank Sumsel Babel menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024. Tujuan dari rapat penting ini adalah untuk merumuskan dan memvalidasi strategi pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat fondasi untuk ekspansi lebih lanjut berdasarkan peningkatan kinerja selama tahun sebelumnya.

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel, Moch Robi Hakim, mengatakan pelaksanaan RUPS ini berjalan lancar dan ada sejumlah strategi yang lebih diperdalam.

"Dan ada masukan yang positif dari seluruh pemegang saham untuk Bank Sumsel Babel keseluruhannya, masukan itu menjadi hal yang berharga bagi Bank Sumsel Babel ke depan terkait beberapa kinerja Bank Sumsel Babel,"katanya.

Robi juga menekankan, masukan-masukan tersebut menjadi hal yang luar biasa penting bagi Bank Sumsel Babel ke depannya, terutama terkait dengan peningkatan kinerja dan pengembangan yang lebih besar.

Menurut Robi, rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan dan memvalidasi strategi pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, guna memperkuat pondasi untuk ekspansi lebih lanjut yang didasarkan pada peningka-

tan kinerja selama tahun sebelumnya.

Adapun, selama 2023, Bank Sumsel Babel memperoleh pencapaian kinerja yang mengesankan. Dengan total aset naik sebesar 8,80 persen dari tahun sebelumnya (yoy), Bank Sumsel Babel menunjukkan tak hanya kemampuan mengelola keberlanjutan, tetapi juga potensi pertumbuhan yang signifikan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp27,13 triliun mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat dari para nasabah, serta peningkatan kapabilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

tanah bagi pemegang saham dan para pelanggan.

Kesuksesan Bank Sumsel Babel selama 2023 adalah hasil dari strategi pertumbuhan jangka panjang yang berfokus pada inovasi dan peningkatan efisiensi.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, pun menunjukkan optimisme tinggi dalam penyelenggaraan RUPS kali ini.

"Kami memaksimalkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan merumuskan rencana strategis berikutnya bersama para pemegang saham. Dengan momentum yang kuat ini, kami yakin



Sebagai wujud komitmen tinggi dalam mendukung sektor ekonomi lokal, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Bank Sumsel Babel berhasil menyalurkan kredit dengan kenaikan secara signifikan sebesar 13,35 persen.

Laba sebelum pajak juga menunjukkan peningkatan luar biasa, yaitu sebesar Rp760,503 miliar atau naik 8,40 persen. Ini merupakan bukti bahwa manajemen efisiensi, inovasi produk, dan pelayanan prima memberikan nilai

bahwa Bank Sumsel Babel akan terus menunjukkan kinerja yang positif dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan," terangnya.

Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, mengapresiasi sederet inovasi yang dilahirkan oleh Bank Sumsel Babel, sehingga mengalami kemajuan pesat.

"Sebagai Institusi perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung saat ini telah mengalami kemajuan. Serang-

kaian inovasi telah banyak dilakukan oleh Manajemen Bank Sumsel Babel secara keseluruhan, mulai dari tingkat staf sampai dengan top management yang dalam hal ini meliputi seluruh jajaran pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” ucap Fatoni.

“Hal ini menyebabkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi bank daerah yang dapat diperhitungkan oleh kalangan perbankan dalam kancah penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan pemerintah yang ada di Sumatera Selatan. Adanya kemajuan tersebut diharapkan akan berpengaruh dengan kontribusi PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel terhadap Pendapatan Asli Daerah,” sambungnya.

Menurutnya, kegiatan RUPS dan RUPSLB seperti ini sangatlah penting. Bahkan dirinya juga mengapresiasi seluruh jajaran Bank Sumsel Babel yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pribadi saya menyambut baik dan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya kita untuk memantapkan kinerja seluruh jajaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” kata Fatoni.

Menurutnya, kegiatan kali ini merupakan rapat tahunan yang berisi pertanggungjawaban dari pihak Bank Sumsel Babel di hadapan para pemegang sahamnya.

“Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun setelah selesainya pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Bank Sumsel Babel,” jelas Fatoni.

Fatoni juga membeberkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai oleh Bank Sumsel Babel dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada pengurus yang telah bekerja keras demi kemajuan Bank Sumsel Babel.

“Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya kita semua berharap agar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2023 ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta dapat meningkatkan kualitas kinerja dan dapat menjadikan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi Bank yang sehat sesuai dengan Standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas Fatoni.

Fatoni berharap melalui kegiatan ini, Bank Sumsel Babel dapat terus meningkatkan kinerja. Hal ini tentunya sejalan dengan sejumlah target yang telah disusun guna meningkatkan kualitas manajemennya.

“Ke depan kami berharap ini bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal ZA, berharap hasil RUPS tahun buku 2023 dan RUPSLB 2024 memberikan kemajuan bagi perekonomian masyarakat maupun daerah.

Pria asal Aceh ini mengatakan, bersama Bank Sumsel Babel di masa mendatang tidak terlepas dari pelayanan optimal kepada nasabah yang telah menaruh kepercayaan. Oleh karena itu, hal ini harus dibayar lunas oleh direksi Bank Sumsel Babel dengan memberikan pelayanan yang menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, sehingga memberikan rasa nyaman dan aman dalam bertransaksi.

“Digitalisasi saat ini adalah kenis-

cayaan. Pelayanan hendaknya selalu terdepan, dengan konsep digitalisasi untuk layanan yang lebih mudah dan cepat. Untuk itulah, BSB (Bank Sumsel Babel) harus mengikuti perkembangan layanan kekinian yang betul-betul terkoneksi dengan baik,” ungkap Safrizal.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri ini menambahkan, RUPS dan RUPSLB tersebut menjadi momentum tepat bagi Bank Sumsel Babel untuk dapat menyinergikan usulan tersebut ke dalam rencana bisnis bank untuk 2024, yang akan dibahas bersama pihak-pihak berkepentingan.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, juga atas nama pemerintah kabupaten/kota, serta masyarakat Negeri Serumpun Sebalai, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas komitmen, duduk dan bekerja bersama pemerintah daerah mencetak laba,” sebutnya.

Safrizal kembali menyatakan pentingnya hasil dari RUPS dan RUPSLB ini dalam upaya peningkatan dividen atas penyertaan modal, memberikan pelayanan administrasi, penatausahaan keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah untuk tetap menggeliat menuju ke arah yang lebih baik lagi.

“Ini sungguh penting. Semoga membawa dan memberikan kebaikan untuk daerah dan masyarakat kita, baik di Bumi Sriwijaya, maupun di Negeri Serumpun Sebalai,” ungkap Safrizal. •





PPN JADI 12 PERSEN PILIHAN AGENDA KEBERLANJUTAN

Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah merancang kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen sejak 2021.

Ketentuan kenaikan PPN menjadi 12 persen tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 7 Bab IV beleid tersebut, tercantum ketentuan terbaru terkait tarif PPN. Di mana tarif PPN naik 1 persen menjadi sebesar 11 persen yang telah mulai berlaku sejak 1 April 2022.

"Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025," tulis huruf b ayat (1) Pasal 7 beleid tersebut.

Dalam ketentuan itu pula, Jokowi menetapkan tarif PPN sebesar 0 persen untuk ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak

Tidak Berwujud, dan ekspor Jasa Kena Pajak. Sementara dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen.

Sebagai catatan, bahwa perubahan tarif PPN sebagaimana dimaksud di atas, diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada DPR untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bukan tanpa sebab, Kementerian Keuangan mencatat tarif PPN 10 persen belum pernah berubah sejak pertama kali sistem PPN diperkenalkan di Indonesia pada 1984. Bahkan, rasio pajak atau tax ratio Indonesia,

yang menjelaskan total penerimaan perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB), masih tergolong rendah di antara negara-negara berkembang lain yang rata-rata mencapai 27,8 persen.

Pada 2021, OECD mencatat rasio pajak Indonesia sebesar 10,9 persen dan menjadi lima terbawah di antara 28 negara di Asia Pasifik lainnya. Kalah dari Malaysia dan Thailand yang masing-masing sebesar 11,8 persen dan 16,4 persen.

Untuk menjadi negara maju dan mandiri, sebagaimana cita-cita Indonesia Emas 2045, Kemenkeu menekankan bahwa penerimaan pajak yang memadai menjadi syarat penting. Reformasi perpajakan melalui UU HPP diproyeksi mampu mendongkrak rasio pajak sebesar 0,8 persen terhadap PDB.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu juga mencatat, saat ini, Indonesia belum memaksimalkan pemungutan PPN. Indonesia setidaknya baru mampu menjerang 63,58 persen dari total PPN yang seharusnya dapat dipungut. Tercermin dari belanja perpajakan atau tax expenditure yang didominasi oleh fasilitas PPN hingga mencakup 65 persen pada 2019.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, aturan un - tuk

kenaikan tarif PPN akan dibahas lebih lanjut dan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Kita lihat masyarakat Indonesia sudah menjatuhkan pilihan, pilihannya keberlanjutan. Tentu kalau berkelanjutan, berbagai program yang dicanangkan pemerintah akan dilanjutkan, termasuk kebijakan PPN (12 persen)," kata Airlangga di Jakarta, Jumat .

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN akan dibahas lebih lanjut dalam penyusunan APBN 2025 bulan depan.

"Tentu satu bulan ke depan sudah ada keputusan, 20 Maret (2024). Sehingga dengan demikian, APBN 2025 kan pelaksananya pemerintah yang akan datang. Jadi pemerintah yang akan datang sudah mendapatkan kepastian sesudah pengumuman, dan program yang masuk APBN

adalah program yang akan dijalankan pemerintah mendatang," jelasnya.

A d a p u n dalam proyeksi postur makro fiskal pada 2025, ditetapkan pendapatan negara 12,08-

12,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), belanja negara 14,21-15,22 persen PDB, keseimbangan primer 0,07 persen hingga minus 0,40 persen PDB, dan defisit 2,13-2,45 persen PDB.

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengimbau pemerintah agar berhati-hati dan membuat kajian yang matang atas rencana kebijakan tersebut. Ia menilai rencana kebijakan kenaikan PPN memang akan memberi



Kemungkinan besar laju konsumsi akan semakin melambat akibat kebijakan ini. Hal ini karena saat ini saja daya beli sudah tertekan oleh kenaikan harga bahan pokok.

dampak kenaikan pendapatan negara antara Rp350-375 triliun, namun juga memberi dampak perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional 0,12 persen.

Selain itu, kenaikan PPN juga akan membuat konsumsi masyarakat turun 3,2 persen, upah minimal anjlok, dan munculnya berbagai risiko ekonomi di tengah ketidakpastian global.

"Berdasarkan Undang Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah memang diberikan kewenangan untuk menaikkan atau menurunkan PPN. Namun dalam hemat saya, pemerintah harus berhati hati atas rencana kebijakan tersebut. Pada tahun 2022 lalu pemerintah telah menaikkan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Dalam waktu tak



berselang lama, PPN akan dinaikkan lagi, saya kira ini jalan pintas untuk menaikkan perpajakan, tidak kreatif, bahkan akan berdampak luas membebani rakyat,” ujar Said dalam keterangannya, Kamis, 14 Maret 2024.

“Mandat UU HPP adalah mendorong reformasi perpajakan secara menyeluruh, mulai dari pembenahan administrasi data perpajakan, memperluas wajib pajak, termasuk mendorong transformasi shadow economy masuk menjadi ekonomi formal agar bisa ter-

masyarakat. Menurutnya, daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih jika dibandingkan dengan periode sebelum 2019, atau sebelum pandemi COVID-19.

“Konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 memang tumbuh 4,82 persen, tapi perlu kita ingat, pertumbuhan ini masih lebih rendah dibanding dengan rata-rata periode 2011-2019 yang berada di level 5,1 persen. Kita juga bisa mencermati angka Indeks Penjualan Riil (IPR) antara periode sebelum

mengimbau pemerintah agar mengkaji rencana kebijakan tersebut dengan melihat seluruh aspek, tanpa membebani masyarakat.

“Prinsipnya, saya meminta pemerintah untuk membuat kajian atas rencana kenaikan PPN ini lebih komprehensif, mempertimbangkan semua aspek, bukan semata mata keinginan untuk menaikkan pendapatan negara, tetapi menimbang bagaimana kondisi perekonomian kita di tahun 2025, terutama daya beli masyarakat, tingkat inflasi di consumer good, perumahan, transportasi, pendidikan dan kesehatan. Pemerintah harus banyak akal untuk menaikkan pendapatan negara tanpa harus membebani rakyat,” terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W Kamdani, mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen pada 2025 sebetulnya sudah diatur dalam UU HPP sejak diundangkan Oktober 2021. Dalam UU itu diatur bahwa kenaikan PPN dilakukan bertahap ke 11 persen, yang berlaku saat ini mulai dari April 2022 sampai akhir 2024.

“Pemerintah sudah memberikan masa transisi secara bertahap. Juga sistem administrasi perpajakan terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan kemudahannya,” kata Shinta, Senin, 11 Maret 2024.

Shinta mengakui, kenaikan PPN memang akan membuat sedikit kenaikan harga barang dan jasa. Namun, diharapkan tidak akan



Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah

jangkau pajak, termasuk sektor digital yang tumbuh pesat namun selama ini lepas dari jangkauan pajak. Kenapa hal-hal seperti tidak lebih diutamakan, ketimbang menaikkan PPN,” imbuh politisi PDIP tersebut.

Lebih lanjut, Said mengungkapkan tarif PPN di Indonesia merupakan kedua tertinggi di Asia Tenggara.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara di ASEAN, tarif PPN kita saat ini sebesar 11 persen saja itu sudah tertinggi nomor dua di ASEAN. Filipina tarif PPN-nya tertinggi di ASEAN sebesar 12 persen, Indonesia 11 persen, Malaysia, Kamboja, dan Vietnam masing-masing 10 persen, sementara Singapura, Laos dan Thailand mencapai 7 persen. Kalau tahun depan kita naik 12 persen, menjadi tertinggi di ASEAN,” ungkapnya.

Terkait rencana kebijakan ini, Said juga menyoroti tingkat daya beli

COVID-19 dengan periode pemulihan sejak dua tahun lalu. Pada 2019, IPR sempat menyentuh 250, dengan angka terendah 220, sementara pasca COVID-19, setidaknya di tahun 2023, IPR tahun 2023 rata-rata di bawah 210,” jelas Ketua DPP PDIP ini.

Said pun



Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani

me-nambah beban yang berlebihan.

"Karena Pemerintah juga sudah memberikan insentif berupa barang jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut atau dibebaskan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun depan diyakini akan berdampak terhadap daya beli masyarakat.

Bhima mengatakan, daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, telah menerima sejumlah pukulan, mulai dari kenaikan harga komoditas, suku bunga tinggi, hingga kesulitan mencari kerja. Akibatnya, daya beli masyarakat mengalami pelemahan, ditandai dengan perlambatan pertumbuhan tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal terakhir tahun lalu.

Meskipun terdapat momen Natal dan Tahun Baru serta sejumlah insentif yang digelontorkan pemerintah, konsumsi rumah tangga nasional melambat menjadi 4,47 persen secara tahunan pada kuartal IV-2023, dari kuartal sebelumnya 5,06 persen.

"Ini masih ditambah penyesuaian tarif PPN 12 persen. Khawatir belanja masyarakat bisa turun," kata Bhima, Rabu, 13 Maret 2024.

Dengan melihat potensi tersebut, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kembali wacana kenaikan tarif PPN, mengingat konsumsi rumah tangga merupakan kontributor utama produk domestik bruto (PDB) dengan porsi mencapai lebih dari 50 persen.

"Pemerintah harus memikirkan kembali rencana kenaikan tarif PPN 12 persen karena akan mengancam pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari konsumsi rumah tangga," tuturnya.



Wakil Direktur Indef,
Eko Listiyanto

Meskipun sudah diatur lewat UU HPP, Bhima menilai, momen kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada tahun depan tidak tepat. Alih-alih mengerek tarif PPN, Bhima bilang, pemerintah dapat mempretimbangkan opsi lain untuk mengerek pendapatan negara yang berasal dari pajak, seperti pembahasan pajak kekayaan, pajak anomali keuntungan komoditas, dan penerapan pajak karbon.

"Jelas kenaikan tarif PPN bukan solusi naikan pendapatan negara. Kalau mau dorong rasio pajak, perluas dong objek pajaknya, bukan utak-atik

tarif," ucapnya.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, menjelaskan kenaikan tarif PPN setidaknya akan berimbas pada minat ekspansi usaha yang berkurang, juga berakibat kepada berkurangnya penyerapan tenaga kerja baru.

"Kemungkinan besar laju konsumsi akan semakin melambat akibat kebijakan ini. Hal ini karena saat ini saja daya beli sudah tertekan oleh kenaikan harga bahan pokok. Terlebih lagi di tahun depan yang diperkirakan ekonomi belum akan tumbuh tinggi," ucap Eko.

Sementara, menurut Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, kenaikan PPN akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang lantaran biaya yang harus ditanggung lebih banyak dari proses aktivitas barang ketika dijual melalui penarikan PPN.

"Kita juga menyaksikan ketika pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN di 2022 yang lalu, terjadi kenaikan inflasi yang relatif signifikan, yang saat itu disumbang dari kebijakan tarif baru PPN dan kenaikan permintaan barang dan jasa ketika bulan Ramadhan," ujarnya.

Yusuf menggarisbawahi bahwa yang perlu diantisipasi adalah bagaimana respons pelaku usaha dan juga pedagang retail dalam menerapkan tarif baru PPN 12 persen. •



Ekonom CORE Indonesia,
Yusuf Rendy Manilet

DOMESTIK

Gunawan Effendi

Ingar-bingar politik adalah urusan publik. Pemilu 2024 masih akan berlanjut dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, setelah Pilpres dan Pileg usai. Bagaimana dengan urusan domestik?

Domestik dalam politik dapat mengacu kepada dalam negeri. Domestic and foreign affairs, misalnya, dapat diindonesiakan sebagai urusan dalam dan luar negeri. Namun, domestik juga dapat dihadapkan dengan publik: Sektor domestik dan publik.

Lain lagi dengan domestikasi tumbuhan atau ternak. Domestikasi ini berarti tumbuhan atau hewan liar dimanfaatkan sebagai tanaman maupun ternak budidaya.

Titik temu domestik dan publik, kalau boleh disimpulkan, adalah jarak. Domestik berjarak lebih dekat.

Nah, urusan domestik, karena itu dapat dimaknai sebagai wilayah yang dekat dengan urusan pribadi, keluarga, atau rumah tangga. Sedangkan urusan publik berjarak lebih jauh dan mencakup banyak orang.

Tapi, ada transportasi publik (umum) berhadapan dengan transportasi pribadi (private). Toh ada penerbangan domestik dan penerbangan luar negeri.

Jadi bagaimana? Kita batasi saja domestik kali ini menyangkut urusan yang berkaitan dengan pribadi dan keluarga. Yang muncul di media seiring dengan urusan politik yang bersifat publik adalah soal penurunan angka pernikahan hingga mencapai titik terendah pada 2023.

Catatan penurunan angka pernikahan itu berasal dari Laporan Statistik Indonesia 2024 terbitan Badan Pusat Statistik. Laporan itu mengungkapkan angka pernikahan pada 2023 tercatat 1.577.255.

Angka pernikahan pada 2023 tercatat merupakan yang terendah sejak 1997/1998. Angka lebih rendah tercatat pada 1996/1997, yakni 1.489.765, berdasarkan data Statistik Indonesia 1997. Namun, angka pada Abad XX itu perlu mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang pada 1997 baru melampaui angka 200 juta, sedangkan pada Abad XXI, penduduk Indonesia per 2023 tercatat sudah melampaui 275 juta. Sementara penduduk naik, angka pernikahan malah menurun.

Para ahli demografi, sosiologi, ekonomi, dan cabang-cabang ilmu sosial lainnya memiliki perspektif masing-masing soal turun-naik angka pernikahan dan implikasinya. Juga ahli kesehatan dan kedokteran seperti Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo.

Hasto menjelaskan berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) dari Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 1.544.571 pasangan Muslim menikah pada 2023. Angka ini menurun jika dibandingkan dengan pada 2022 yang mencapai 1,71 juta pasangan. Dokter Hasto mengemukakan, 1,5 juta pernikahan pada 2023 itu dapat menjadi 1,7 juta lebih jika menghitung yang non-muslim.

Apakah karena selisih angka itu muncul gagasan Kantor Urusan Agama (KUA) ikut mencatat angka pernikahan pasangan non-muslim? Jika hanya mencatat, mungkin tak terlalu masalah. Berbeda jika KUA sekaligus menyelenggarakan acara pengesahan pernikahan untuk warga non-muslim. Ini ranah domestik yang bersinggungan dengan urusan publik.

Data lain dari BKKBN menunjukkan, rata-rata usia perkawinan pada 2012 sekitar 20 tahun, sementara pada 2023 menjadi 22,3 tahun. Sementara rata-rata umur melakukan hubungan seks pertama kali pada remaja di usia 15-19 tahun semakin meningkat. Persentase perempuan berusia 15-19 tahun yang telah melakukan hubungan seksual tercatat 59 persen, sedangkan laki-laki 74 persen.

Menurut dokter Hasto, rata-rata menikah pada 22 tahun, tetapi hubungan seksnya 15-19 tahun berarti meningkatnya hubungan seks di luar pernikahan pada penduduk berusia muda. Ia menyebut persoalan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama.

Jika urusan domestik sudah menjadi masalah bersama, maka ia sudah berada di ranah publik. Urusan domestik yang terkait dengan angka pernikahan, angka kelahiran, dan masalah kependudukan pada umumnya sebenarnya akan menentukan masa depan bangsa secara keseluruhan.

Pengalaman negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang, juga Singapura dapat menjadi pelajaran. Biarlah para politisi yang berbicara soal ini. Itu kan foreign affairs, bukan domestik. ●





DANA PILKADA DI TENGAH KISRUH PEMILU

Agenda Pemilu 2024 telah berlangsung dengan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk lima tahun ke depan. Setelah Pemilu, akan ada Pilkada untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.



Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik, menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Adapun Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, "Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024".

Tak hanya itu, Idham mengatakan KPU juga telah menerbitkan Peraturan KPU nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan serentak nasional.

Adapun tahapan Pilkada 2024 yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, yakni pendaftaran pasangan calon pada 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024. Penelitian pasangan calon pada 27 Agustus hingga 21 September 2024. Lalu, penetapan pasangan calon pada 22-22 September 2024. Pelaksanaan kampanye pada 25 September hingga 23 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November 2024. Selanjutnya, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 27 November hingga 16 Desember 2024.

"Jadi, demikian sudah kami tetapkan sesuai dengan norma yang berlaku," tegas Idham, Ju -

mat, 1 Maret 2024.

Ia menyebut KPU sebagai penyelenggara pemilu patuh terhadap perintah undang-undang. Oleh karena itu, kebijakan yang diterbitkan KPU tidak akan melampaui ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlaku," ucapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang jadwal Pilkada serentak diubah. Hal itu tertuang dalam pertimbangan putusan perkara nomor 12/PUU-XXII/2024.

Hakim Konstitusi, Daniel Yusmic P Foekh, menyebut, Mahkamah perlu menegaskan mengenai jadwal yang telah ditetapkan dalam pasal 201 ayat (8).

"Oleh karena itu, Pilkada harus dilakukan sesuai dengan jadwal dimaksud secara konsisten," kata Daniel membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.

Daniel mengungkapkan Pilkada harus dilakukan sesuai jadwal untuk menghindari adanya tumpang tindih tahapan-tahapan krusial Pilkada Serentak 2024 dengan tahapan Pemilu 2024 yang belum selesai.

"Artinya, mengubah jadwal

dimaksud akan dapat mengganggu dan mengancam konstitusionalitas penyelenggaraan Pilkada serentak," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan, pemerintah tidak keberatan jika Pilkada 2024 tetap diselenggarakan pada November mendatang, sejalan dengan keputusan MK. Dia juga menegaskan, pemerintah akan sepenuhnya mengikuti pembahasan revisi UU Pemilu yang akan dilakukan oleh DPR setelah putusan MK tersebut.

"Kalau mau dilaksanakan September (Pilkada Serentak), kita siap. Kalau mau dilaksanakan bulan November juga kita siap, enggak masalah," kata Tito di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

Menurut Tito, UU Pemilu merupakan inisiatif DPR, sehingga pemerintah telah menyampaikan daftar inventaris masalah (DIM) dan sepenuhnya menyerahkan proses pembahasan

kepada DPR. Tito juga menyebutkan, pemerintah akan mendengarkan pendapat partai-partai yang berkontestasi.

"Maka MK di dalam pertimbangan menyampaikan itu, kembali pada idealisme. Anda dipilih menjadi DPR, konsisten



dong di DPR, makannya kalau bisa dilaksanakan tanggal 27 November (Pilkada Serentak)," ujarnya.

Sebelumnya, terdapat wacana untuk mempercepat Pilkada Serentak 2024 dari November menjadi September 2024 untuk menata rentang waktu pelantikan kepala daerah terpilih.

"Intinya, meminta pasal yang utamanya adalah supaya yang selama ini mundur, anggota DPR, DPRD, DPD tingkat satu maupun tingkat dua, itu kalau mau di Pilkada dia harus mundur. Nah ini, tambahannya minta yang sudah terpilih berdasarkan keputusan KPU, yang belum dilantik juga mundur," ujar Tito.

Hibah Daerah

Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mulai membahas kesiapan Pilkada 2024. Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengatakan pemerintah perlu memastikan persiapan daerah, mulai dari aspek ketersediaan biaya, partisipasi pemilih, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga penanganan pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan.

"Penyelenggaraan pemungutan suara di akhir tahun ini, diharapkan kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan Pilkada, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih baik dan paripurna dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," ungkap Yusharto, Rabu, 6 Maret 2024.

Menurutnya, Kemendagri telah mengadakan Forum Diskusi Aktual (FDA) untuk membahas kesiapan Pilkada di Auditorium BJ Habibie, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Selasa, 5 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan bagi Mendagri menjelang Pilkada pada 27 November mendatang.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, mengatakan salah satu komponen yang menjadi fokus pembahasan dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada adalah anggaran. Anggaran tersebut akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Kemendagri juga mendorong daerah untuk menyiapkan biaya Pilkada selama

dua tahun anggaran, dengan alokasi 40 persen dari anggaran 2023 dan 60 persen dari anggaran 2024.

"Kita juga sudah terbitkan dulu di pedoman penyusunan APBD di tahun-tahun sebelumnya. Tolong daerah membuat Perda (terkait) dana cadangan, artinya mencicil di dalam mengalokasikan Pilkada serentak ini," ujar Horas.

Mendagri Tito Karnavian pada akhir 2023 juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan pengesahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini untuk men-

Daerah, TNI/Polri, dan pihak terkait.

"Temuan saya kemarin, ada yang sudah penandatanganan (NPHD) dengan KPUD, ada yang belum. Ada juga yang sama sekali belum dengan Bawaslu daerah, dan TNI/Polri rata-rata belum," tambah Tito.

Apalagi sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran Pilkada Serentak 2024, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun



Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo

dukung kelancaran Pilkada Serentak 2024.

"Mungkin (ada) yang sudah mengajukan (NPHD) tapi belum ketemu besaran kesepakatannya. Ada yang sudah kesepakatan besaran, tapi belum tanda tangan. Intinya, tolong masalah NPHD segera di-follow up teman-teman (Penjabat)," ujar Tito, Jumat, 17 November 2023.

Tito mengingatkan para Penjabat Kepala Daerah agar segera mengoordinasikan kebutuhan jumlah anggaran Pilkada yang dibutuhkan dari masing-masing stakeholder terkait. Apabila telah setuju, diminta agar secepatnya melakukan penandatanganan NPHD secara serentak bersama KPU Daerah, Bawaslu

2024.

Dalam SE itu juga dijelaskan, penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada 2024 wajib dianggarkan pada 2023 sebesar 40 persen, dan 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

"Tujuannya karena nanti daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena PAD-nya memang kecil akan berat sekali membiayai 100 persen di 2024," ungkapnya.

Selain itu, porsi 40 persen dan 60 persen di tahun yang berbeda itu tujuannya untuk menjamin anggaran program-program penting lainnya tidak terganggu. Misalnya, anggaran untuk belanja pegawai dan pendanaan urusan wajib lain-

• INFO KHUSUS

nya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanganan sampah yang tidak mungkin ditunda.

Adapun sejumlah provinsi telah menetapkan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan dana hibah bagi penyelenggaraan Pilkada untuk diberikan kepada KPU Jabar

butuhan logistik, pengeluaran barang, dan jasa lainnya.

Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menyatakan, Pemprov Jabar telah mencadangkan dana untuk anggaran Pilkada 2024 yang dimulai sejak 2022 dan telah terkumpul Rp1 triliun. Dana Cadangan sudah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2021 tentang

dana sebesar Rp20 miliar untuk penyelenggaraan keamanan.

Proses penyaluran dana hibah dibagi dalam dua tahap, yaitu penyaluran tahap 1 pada tahun 2023 dengan rincian KPU Jatim menerima Rp488.645.617.000 atau 58 persen dan Bawaslu Jatim menerima Rp111.354.383.000 atau 100 persen.

Sedangkan penyaluran dana hibah tahap 2 dilakukan pada tahun 2024 dan KPU Jatim menerima dana sebesar Rp356.354.383.000 atau 42 persen, Polda Jatim menerima Rp110.000.000.000 dan Kodam V/Brawijaya Rp20.000.000.000.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyerahkan dana hibah Rp985.326.500.000 miliar ke KPU dan Bawaslu Jateng untuk sukseskan Pilkada 2024.

Anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan Jawa Tengah 2023 dan APBD 2024. Secara rinci, dana hibah untuk KPU Jateng senilai Rp791.608.630.000, sedangkan untuk Bawaslu Jateng senilai Rp193.717.870.000.

Pencairan dana hibah tersebut dilakukan dua tahap. Tahap pertama disalurkan paling lambat 14 hari setelah penandatanganan NPHD. Sedangkan untuk tahap kedua disalurkan paling lambat empat bulan sebelum pemungutan suara.

Kemudian, Pemprov Banten menggelontorkan hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. KPU Banten mendapatkan Rp499 miliar dan Bawaslu Banten mendapatkan Rp109 miliar.

Pemberian hibah ke penyelenggara dan pengawas pemilu ini dilakukan di Pemprov Banten dalam penandatanganan hibah daerah. Anggaran diberikan dalam dua tahap yaitu pada 2023 dan 2024. Tahap satu, baik KPU dan Bawaslu mendapatkan 42 persen dari nilai total hibah pada 2023. Sisanya akan diberikan pada 2024.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta



Plh Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan

sebelum tahapan pilkada dimulai. Apabila pilkada berlangsung November 2024, maka tahapan pemilihan bakal dimulai November 2023.

Dana hibah tersebut akan digunakan selama 12 bulan atau satu tahun, dimulai November 2023. Pihak KPU Jabar telah mengajukan dana sebesar Rp1,15 triliun.

Anggaran pilkada itu akan digunakan untuk tahap persiapan seperti pembuatan regulasi, penetapan tahapan, proses pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan pemutakhiran data pemilih, yang antara lain sejumlah tahapan harus sudah dimulai sejak November 2023.

Anggaran dihitung berdasarkan asumsi ada empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta jumlah pemilih sekitar 35,3 juta lebih. Selain itu, dana tersebut juga digunakan KPU Jabar untuk berbagai pos pengeluaran seperti badan ad hoc PPK dan PPS, ke-

Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024.

Lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menandatangani NPHD bantuan keuangan penyelenggaraan Pilkada 2024 demi mewujudkan Pilkada Jatim demokratis.

NPHD yang disalurkan Pemprov Jatim untuk penyelenggaraan dan pengamanan sebesar Rp1.086.354.383.000. Rinciannya, KPU Jatim menerima sebesar Rp845 miliar dan Bawaslu Jatim menerima sekitar Rp111 miliar. Selain KPU dan Bawaslu, dana hibah tersebut juga diberikan kepada Polda Jatim yang menerima dana sebesar Rp130 miliar dan Kodam V/Brawijaya yang menerima



**Direktur Eksekutif
Voxpol Center Research
and Consulting, Pangi
Syarwi Chaniago**

melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengusulkan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 sebesar Rp1,19 triliun.

Penyelenggaraan Pilkada di Sumatera Selatan juga diperkirakan menghabiskan dana sebesar Rp 1,4 triliun. Dana tersebut bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Cegah Intervensi Jokowi

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD, menyambut baik putusan MK yang menegaskan Pilkada 2024 tetap digelar sesuai jadwal pada 27 November 2024. Menurut Mahfud, putusan ini penting untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan pilkada.

"Saya sangat salut dan terkejut karena Putusan MK Nomor 12 Tahun 2024 ini tidak menjadi diskusi publik, tiba-tiba keluar dan putusnya sangat bagus untuk menghentikan dugaan langkah-langkah Pak Jokowi untuk mengendalikan Pilkada 2024," kata Mahfud di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.

Mahfud menilai, usulan pemerintah Presiden Jokowi mengenai percepatan jadwal pilkada menjadi September 2024 mau tak mau menimbulkan

kecurigaan publik. Sebab, jika pilkada digelar September, pemerintahan masih dipimpin oleh Jokowi. Menurut jadwal, presiden dan wakil presiden yang baru dilantik pada Oktober 2024. Sementara, pemerintah sendiri beralasan bahwa pilkada perlu dimajukan agar mempermudah birokrasi, lantaran November 2024 masih dalam masa transisi pemerintah baru.

"Padahal itu kan bisa saja untuk birokrasi. Pemerintahnya tetap, yang ganti hanya menteri dan presidennya. Masyarakat lalu menduga usul pengajuan rancangan undang-undang Pilkada menjadi bulan September itu hanya untuk memberi waktu, memberi peluang kepada Pak Jokowi, atau Pak Jokowi ingin mengambil peluang agar beliau bisa mengatur Pilkada di seluruh Indonesia," terangnya.

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang, kata Mahfud, hari pemungutan suara Pilkada 2024 harus tetap digelar pada 27 November 2024. Itu berarti, pilkada diselenggarakan di masa pemerintahan presiden baru.

"Entah siapa pemerintah baru itu, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Anies, bisa Pak Ganjar, tergantung putusan MK nanti," ucap mantan Ketua MK itu.

Selain mengapresiasi MK

atas putusannya, Mahfud juga menyampaikan rasa salut pada pihak pemohon perkara ini. "Saya salut kepada Ahmad Alfarizi dan Nur Fauzi, mahasiswa yang sangat cerdas dan punya pandangan jauh agar demokrasi ini tidak diolah-olah kembali. Kemudian, saya salut kepada MK, sekarang sudah mulai kembali ke hati nuraninya. Teruskan keberanian ini demi Indonesia yang bagus," tutur mantan Menko Polhukam itu.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengungkapkan, Presiden Jokowi adalah orang dibalik layar yang



Entah siapa pemerintah baru itu, bisa Pak Prabowo, bisa Pak Anies, bisa Pak Ganjar, tergantung putusan MK nanti

meminta Pilkada 2024 dimajukan. Menurutny, alasan Pilkada maju ke September agar Jokowi bisa menyeting dan memenangkan keluarganya serta pihak lain yang punya kepentingan.

"Coba kalau Pilkada Serentak 2024 tetap digelar di November, Jokowi pasti sudah tidak bisa menyeting lagi karena sudah lengser, soalnya pelantikan presiden baru itu di Oktober 2024. Makanya dimajukan dulu Pilkada ke September 2024," tuturnya, Kamis, 14 Maret 2024.

Ipong memprediksi Presiden Jokowi bakal mengamankan posisinya dan ingin landing dengan aman, meskipun sudah lengser dari jabatan presiden. "Kepentingan itu masih jadi cita-cita dan mimpi Jokowi. Memang sulit dibuktikan, tapi kita bisa rasakan tangan dingin dan bau amisnya, meski tidak mudah membuktikan," katanya. ●

Mahfud MD

KARPET MERAH DINASTI POLITIK JOKOWI

Dinasti politik keluarga Presiden Joko Widodo kemungkinan berlanjut pada pertarungan Pilkada Serentak 2024.

Putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, diwacanakan maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Istri Kaesang, Erina Gudono, juga diusulkan Partai Gerindra dan Partai Golkar maju dalam pemilihan bupati Sleman. Terbaru, menantu Jokowi yang menjabat Walikota Medan, Bobby Nasution,



juga berencana maju dalam Pilgub Sumatera Utara.

Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo, menilai, dinasti politik Jokowi masih akan sangat kuat pada Pilkada 2024. Alasannya, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang hampir dipastikan menang Pilpres 2024, masih akan punya kekuatan mobilisasi lewat bantuan sosial dan finansial demi memenangkan anggota keluarga Jokowi yang ikut berkompetisi pada pilkada.

"Dinasti politiknya menurut saya akan semakin menguat karena konsolidasi politiknya sudah tertata rapi," ucap Kunto, Rabu, 13 Maret 2024.

Kunto mencermati, Jokowi sangat piawai membangun dominasi berbasis pencitraan dari bansos, yang didesain untuk memenangkan pertarungan politik elektoral, termasuk pilkada. "Apalagi, Pak Jokowi sudah sangat tahu caranya meraih simpati masyarakat di tengah melonjaknya harga-harga pangan, yang seharusnya menjadi tanggung jawab dia," tutur Kunto.

Di sisi lain, simpati masyarakat yang masih tinggi terhadap Jokowi, juga membuat sebagian besar partai politik mendekat. Bahkan, turut mendukung keluarga Jokowi pada Pilkada 2024. Sebab, peluang kemenangannya jauh lebih besar.

"Daripada menggaet calon lain yang (peluang menangnya) masih 50:50," ujar Kunto.

Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, juga menilai, dinasti politik Jokowi akan sangat memengaruhi Pilkada 2024. Sebab, sebelum cawecaw pada Pilpres

2024, Jokowi sudah sering menunjukkan keterlibatan dalam kontestasi perebutan kursi kepala daerah. Misalnya, kala memenangkan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, pada pemilihan wali kota Solo dan Bobby Nasution dalam pemilihan wali kota Medan.

"Ketika Gibran ikut kontestasi di Surakarta, Jokowi memanggil tokoh yang potensial ikut kontestasi menjadi



Pertama ini bukan republik keluarga ya, bukan kerajaan, bukan juga membangun dinasti para kroni.

lawan Gibran ke Istana. Begitu halnya juga saat Bobby di Medan, Istana juga terkesan ikut berupaya membantu," kata Dedi, Rabu, 13 Maret 2024.

Dedi mengatakan, setiap orang memang berhak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Namun, tidak patut bila mengandalkan kekuatan kekuasaan, yang bakal memanfaatkan sumber daya negara untuk kandidat tertentu.

"Hak setiap orang ikut kontestasi politik, tetapi itu jika dilakukan dengan normal. Bukan dengan mengandalkan kekuasaan. Tentu tidak fair bagi publik," ucap Dedi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut, masuknya anak dan menantu Jokowi di Pilkada 2024 menandakan dinasti politik Jokowi semakin meluas dan merupakan keadaan darurat. Hal itu tidak bisa dipandang sebelah mata atau sekadar menyamakan dengan dinasti politik di luar negeri.

"Ya memang negeri ini darurat dinasti politik. Di luar negeri juga dinasti politik ada, terjadi tapi di luar negeri itu yang dimunculkan itu adalah keluarga-keluarga, anak-anak yang latar belakang bagus, berprestasi, punya pengalaman gitu. Kalau kita ini dinasti-dinasti tidak meritokrasi, tidak berdasarkan prestasi, berdasarkan pada kekeluargaan saja," kata Ujang, Jumat, 15 Maret 2024.

Menurut Ujang, dinasti politik memang tidak dilarang dalam undang-undang. Namun, harus ada batas kewajaran dan publik perlu mengkritisi satu keluarga yang berpotensi menjadi sangat powerfull dalam percaturan politik Tanah Air.

"Ya masa iya gitu anak, menantu maju semua. Walaupun dibolehkan dalam demokrasi, tapi mestinya dinasti politik ini dibatasi gitu," kata dia.



**Pakar Hukum Tata Negara,
Feri Amsari**

Dinasti politik Jokowi yang kian meluas ini tidak terlepas dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat pemerintah. Di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sempat dirancang UU Pilkada yang membatasi dinasti politik. Hal itu guna menjaga situasi politik tetap sehat dan terbuka untuk semua anak bangsa. Namun, hal itu tak kunjung disahkan atau batal un-

itu akan dikuasai orang-orang tertentu, keluarga tertentu,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengungkapkan, jika wacana tentang anak dan menantu Jokowi ikut bersaing dalam Pilkada 2024 terwujud, maka praktik politik dinasti Indonesia dianggap dalam tahap membahayakan demokrasi.

Menurut pengamatan Ray, praktik

“Ini karena bukan hanya berhubungan dengan Pak Jokowi, tetapi di banyak tempat, kita melihat praktik dinasti politik ini sudah terlalu besar,” kata Ray, Kamis, 14 Maret 2024.

Ray mengatakan, sampai 2020 tercatat ada sekitar 117 daerah yang dikuasai oleh dinasti politik atau elite politik yang masih memiliki hubungan keluarga. Dia memperkirakan jika tidak



Ekonom Senior, Faisal Basri

tuk disahkan.

“Dulu zaman SBY dalam UU Pilkada membatasi dinasti politik itu ada jeda lima tahun, tapi faktanya UU itu enggak jadi disahkan, batal. Sehingga ya saat ini darurat dinasti politik, partai ada dinasti politik,” terangnya.

Di era Jokowi, lanjut dia, praktik dinasti politik dilakukan secara terang-terangan. Bahkan, regulasi yang ada dan seharusnya bisa membatasinya, ternyata bisa diterobos demi nafsu politik.

“Memang kita sudah darurat dinasti politik, tapi persoalannya maju dalam pilkada seolah-olah tidak masalah karena dipilih oleh masyarakat. Tetapi kalau kita lihat cara pengembangan demokrasi yang sehat, maka ini sesuatu yang tidak pas, tidak cocok, tidak wajar gitu karena nanti daerah-daerah

politik dinasti sangat rentan mengarah kepada kolusi dan nepotisme yang bisa memicu ketidakadilan dan merusak sendi-sendi demokrasi.



Ya masa iya gitu anak, menantu maju semua. Walaupun dibolehkan dalam demokrasi, tapi mestinya dinasti politik ini dibatasi gitu.

ada langkah dan terobosan diambil buat mencegah hal itu meluas, maka kemungkinan besar elite dinasti politik itu akan merajalela pada Pilkada 2024.

“Bisa-bisa seperempat dari keseluruhan wilayah kita dikuasai oleh para dinasti politik, dan ini tentu tidak wajar ya,” ucap Ray.

Ray juga menyinggung hasil Pileg 2024 yang juga didominasi oleh kalangan dinasti politik. Maka dari itu, para dinasti politik itu tidak hanya menguasai eksekutif tetapi juga legislatif.

“Jelas-jelas ini semua tidak wajar, karena tidak ada basis daripada dinasti politik itu kecuali seutuhnya demi kepentingan pengakomodasian kekuasaan,” papar Ray.

Ray menyatakan sangat khawatir jika kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berada di tangan dinasti-dinasti politik

malah memicu transaksi yang melibatkan kewenangan dengan para pemilik modal buat memuluskan kepentingan bisnis mereka.

"Dan itulah yang sering kali menimbulkan oligarki politik," ucap Ray.

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Feri Am-sari, menyebut, isu tentang anak dan menantu Jokowi maju dalam Pilkada 2024 tidak sesuai dengan cita-cita pendirian Republik Indonesia.

"Pertama ini bukan republik keluarga ya, bukan kerajaan, bukan juga membangun dinasti para kroni. Jadi, aneh saja kalau terjadi perubahan yang luar biasa di era Jokowi dengan menempatkan keluarganya," kata Feri, Kamis, 14 Maret 2024.

Feri juga mempertanyakan kemampuan berpolitik anggota keluarga Jokowi, jika partai politik pendukung pemerintahan menyatakan siap mendukung anak dan menantu

Presiden Jokowi di Pilkada 2024.

Dia mencontohkan, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi cawapres mendampingi Capres Prabowo Subianto. "Saya pikir omong kosong kalau kita bicara prestasi Gibran. Bagaimana prestainya bisa diukur? Keluarga Jokowi apa prestainya? Bukankah Gibran baru dua tahun, belum ada nilainya itu untuk dianggap sebagai layak punya kapasitas," ucap Feri.

Ekonom senior yang juga akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengungkapkan ada sejumlah cara yang dilakukan Presiden Jokowi sebelum merusak demokrasi demi memungkinkan dinasti politik hadir. Guna mewujudkan keinginannya itu, Jokowi merangkul para konglomerat ke dalam lingkarannya.

Setelah demokrasi dirusak, kata Faisal, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, baru bisa maju menjadi cawapres.

"Malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi. Karena dia tahu demokrasi yang genuine (asli) tidak memungkinkan dinasti politik hadir. Dia harus rusak dulu demokrasi, baru Gibran bisa jadi wakil presiden," kata Faisal saat hadir dalam Seruan Salemba di Kampus UI Salemba, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Maret 2024.

"Apa yang dia lakukan, dia perlemah institusi demokrasi. Tapi dia tidak punya modal, apa yang dia lakukan, dia telepon para konglomerat. Dia ajak dalam kekuasaan, pengusaha dan penguasa dalam satu badan," beber Faisal.

Bersatunya kekuasaan dengan pengusaha itu, menurut Faisal menciptakan kekuatan yang luar biasa. Kekayaan Indonesia dikeruk sedemikian rupa. "Sehingga kekuatan mereka luar biasa. Mereka keruk batu bara kita, pendapatan dari ekspor tahun 2022 saja Rp1.000 triliun," ujar Faisal.

"Itulah yang membuat Jokowi bilang, saya dan rekan-rekan perampok kekayaan alam di Indonesia akan memastikan Prabowo menang satu putaran," ujarnya.

Faisal berpendapat hal semacam ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Hal-hal negatif ini harus disingkirkan dari bumi pertiwi.

"Kalau kita biarkan generasi muda kita tidak akan diberikan sisa. Semua digaruk dan dibuang ke luar. Oleh karena itu sudah warning ini, kita harus betul-betul melumatkan kekuatan negatif di negeri ini. Semoga kita diberikan kekuatan, sebagaimana Rasulullah dan sahabatnya bisa memenangkan perang badar tatkala bulan Ramadan," ujarnya •



Kepala Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Unpad, Kunto Adi Wibowo



Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin



Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja

PILKADA LEBIH RAWAN DARI PEMILU

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 disebut-sebut akan lebih rawan konflik dibandingkan dengan Pemilihan Presiden.

Kerawanan konflik tersebut muncul akibat persaingan yang tinggi antar calon kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan, laporan mengenai pelanggaran pilkada pun akan lebih ramai guna mendapatkan posisi pemimpin daerah.

"Waktu berhimpitan, bisa lebih ramai pilkada (laporan pelanggaran) karena semua cakada akan bersaing, itu yang akan kita hadapi pada beberapa bulan ke depan," kata Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, di Gedung Bawaslu, Rabu, 13 Maret 2024.

Bagja berharap, pihaknya bisa mem-

perkuat sinergitas dengan TNI-Polri dan Kejaksaan soal persiapan jelang penetapan hasil, karena akan ada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami juga tengah menyiapkan jajaran kami untuk mempersiapkan berkas, karena hanya tiga hari setelah penetapan laporan tim paslon pasti mulai berdatangan," ucapnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengatakan, pihaknya telah melakukan persiapan untuk pelaksanaan Pilkada 2024, meskipun saat ini proses rekapitulasi Pemilu 2024 masih sedang berlangsung.

"Persiapan kami adalah, pertama,

bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilunya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama, mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc," kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Lolly lantas menjelaskan persiapan tersebut harus dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024. "Kedua, kami tentu mengambil pelajaran dari Pemilu 2024 ini. Ada banyak hal yang kemudian harus dilakukan mitigasi lebih awal lagi, lebih kuat lagi, karena berkaca dari peri-

stiwa pemilu,” ujarnya.

Lolly mengatakan, pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat pengawasan pelaksanaan Pilkada 2024.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, memberikan pesan untuk pesta demokrasi Pilkada pada November mendatang. Haedar berharap agar Pilkada menjadi momen untuk memperbaiki kekurangan yang terjadi pada pemilu sebelumnya.

“Pilkada masih November, ya. Kita harapkan kekurangan-kekurangan yang terjadi di Pilpres dan Pileg itu harus diperbaiki,” kata Haedar di Kampus UMY, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Selain itu, penyelenggara pemilu seperti KPU hingga Bawaslu harus benar-benar memperbaiki kekurangannya saat pilpres dan pileg. “Dan KPU, Bawaslu harus bersungguh-sungguh memperbaiki kekurangan itu,” ucapnya.

Pasalnya, kedua institusi itu bekerja atas nama konstitusi dan mengusung mandat rakyat Indonesia. Sehingga sudah sepatutnya kedua institusi itu tidak asal-asalan dalam Pilkada.

“Mereka bekerja atas nama konstitusi dan atas nama mandat rakyat, tidak boleh lagi main-main dan tidak boleh lagi asal-asalan,” ujarnya.

Caleg Perlu Mundur

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), bernama Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan, terkait UU Pilkada. Keduanya meminta MK menyatakan syarat pengunduran diri tak hanya berlaku bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD, tetapi juga caleg terpilih.

“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” tulis MK dalam amar putusannya, dilihat Kamis, 29

Februari 2024. Putusan itu tertuang dalam nomor 12/PUU-XXII/2024.

Dalam pertimbangannya, MK menilai gugatan pemohon tidak proporsional terkait dengan keharusan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD untuk mengundurkan diri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada. Sebab, dalam syaratnya, hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinan jika maju dalam Pilkada.

“Alasan pembentuk Undang-Undang bahwa jabatan DPR, DPD, dan DPRD adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga jika terdapat anggota DPR, DPD, atau DPRD mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya,

mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan kepala daerah tanggal 22 September 2024, namun demikian dirinya masih menyandang status sebagai calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik pada 1 Oktober 2024. Pasal 53,” ucapnya.

“A quo secara normatif hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif aktif, sehingga akan muncul pertanyaan apakah dalam situasi demikian maka yang bersangkutan ketika sudah dilantik menjadi anggota legislatif 2024 harus mundur dari jabatannya sebagai anggota legislatif untuk kedua kalinya. Ataukah dia tetap berhak menyandang status sebagai anggota legislatif karena pada saat dilantik menjadi anggota legislatif 2024 dirinya sudah melewati tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah,” sambungnya.

Pengamat hukum pemilu dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mengatakan selama jadwal Pilkada 2024



Komisioner KPU,
Idham Holik



Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera

tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut,” tulis MK.

Dalam putusan ini, terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah. Dia menilai anggota legislatif yang harus mundur sejak ditetapkan sebagai peserta Pilkada.

“Sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, anggota legislatif aktif harus

tidak diajukan ke September, maka tidak akan ada potensi konflik kepentingan bagi peserta kontestasi pemilu dan pilkada.

Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UU Pilkada, setiap calon kepala daerah harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota legislatif. Maka, caleg terpilih di pemilu 2024 yang menyatakan diri maju sebagai calon kepala daerah secara otomatis harus mundur dari anggota

legislatif.

"Karena memang kuncinya di jadwal pilkada itu ya. Kekhawatiran kita dan dua mahasiswa yang mengajukan permohonan itu karena jadwal pilkadanya mau dimajukan ke September. Di UU Pilkada, tidak mengakomodir soal pengunduran diri bagi calon legislatif terpilih yang belum dilantik. Jadi ada kekhawatiran konflik status," jelas Titi, Sabtu, 2 Maret 2024.

Titi menjelaskan, secara substansi, apa yang diharapkan para pemohon akan terealisasi atau terwujud karena pilkada yang berlangsung di November.

"Anggota DPR, DPD, DPRD kan dilantik Oktober, dia harus tetap mengundurkan diri. Karena di UU Pilkada, anggota DPR, DPD, DPRD yang maju di pilkada, harus mengundurkan diri kalau sudah ditetapkan sebagai calon tetap di pilkada," tambahnya.

Titi juga mengatakan, Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang terpilih pada Pemilu 2024 harus membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika ingin mendaftar sebagai kontestan Pilkada 2024. KPU perlu memformulasikan aturan itu lewat

Peraturan KPU (PKPU).

Syarat tersebut muncul dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXI/2024 terkait uji materi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada. MK menegaskan agar KPU mempersyaratkan caleg terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi.

Diketahui, pelantikan anggota parlemen terpilih dalam Pemilu 2024 berlangsung pada Oktober 2024. Sementara, MK sendiri menyatakan Pilkada 2024 harus dilakukan pada November mendatang. Adapun berdasarkan PKPU Nomor 2/2024 mengatur jadwal pasangan calon kepala daerah pada 27-29 Agustus 2024.

"Maka anggota DPR dan DPD tetap harus mundur dari jabatannya apabila menjadi calon tetap di Pilkada 2024 yang berlangsung di November 2024," kata Titi.

Menurut

Titi, KPU cukup merumuskan kebijakan itu lewat PKPU. Sebab, syarat tersebut menyangkut otoritas KPU dalam mengatur persyaratan pencalonan.

Dengan ketentuan itu, caleg terpilih 2024 tidak dapat dilantik sebagai anggota DPR. Sebab, anggota DPR tidak boleh menjadi calon di Pilkada.

"Artinya bahkan mereka serta merta harus dilakukan PAW (pergantian antar waktu) sebelum pelantikan. Ini konsekuensi adanya irisan tahapan pemilu dan pilkada akhirnya seperti itu," ujar Titi.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan caleg terpilih memang harus mengundurkan diri apabila ingin migrasi dari legislatif ke eksekutif. Sehingga tidak ada aturan yang berubah. Syarat dari KPU yang mewajibkan caleg terpilih di pemilu 2024 yang ingin maju ke sebagai kepala daerah memang harus mundur.

"Itu memang sudah sesuai dengan aturan. Saat ini migrasi dari eksekutif ke legislatif atau sebaliknya wajib mundur," kata Mardani.

Di sisi lain, Komisioner KPU, Idham Holik, menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih pada Pemilu 2024 baru diwajibkan mengundurkan diri setelah dilantik sebagai anggota parlemen jika ingin maju dalam kontestasi Pilkada 2024.

Menurut Idham, pertimbangan putusan MK itu sebenarnya hanya mempertegas putusan MK sebelumnya. Ia mengatakan, MK sudah mengeluarkan empat putusan serupa dalam kurun waktu 2015 sampai 2020. Bagi KPU, makna pengunduran diri dalam pertimbangan putusan MK terbaru hanya berlaku jika caleg terpilih sudah dilantik.

"Mengundurkan diri apabila caleg terpilih telah dilantik pada saat pendaftaran pencalonan (Pilkada 2024) ke KPU provinsi atau kabupaten/kota," kata Idham, Jumat, 1 Maret 2024. •



Pengamat hukum pemilu UI, Titi Anggraini



Ketua Umum
PP Muhammadiyah,
Haedar Nashir

info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

<https://infoindonesia.id>

EDISI #41 MARET 2024



DINASTI JOKOWI SEMAKIN BERKUASA